

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

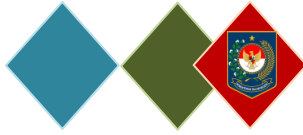
**LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III**

**OPTIMALISASI PEMANFAATAN DATA SEBARAN KEJADIAN
BENCANA MELALUI PEMETAAN TEMATIK MENGGUNAKAN
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) DI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KERINCI**

Disusun oleh:

Nama : Revia Kusuma Wardani
NIP : 20010924 202505 2 001
Jabatan : Analis Kebencanaan Ahli Pertama
Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kelas/Kelompok : 14/4
No. Presensi : 37
Gelombang : 2

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025**



LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

JUDUL : OPTIMALISASI PEMANFAATAN DATA SEBARAN
KEJADIAN BENCANA MELALUI PEMETAAN TEMATIK
MENGUNAKAN *GEOGRAPHIC INFORMATION
SYSTEM* (GIS) DI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KERINCI

NAMA : REVIA KUSUMA WARDANI

NIP : 20010924 202505 2 001

PANGKAT/GOL : IIIa

JABATAN : ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA

INSTANSI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KERINCI

KELAS/KELOMPOK : 14/4

NO. PRESENSI : 37

Disahkan berdasarkan Seminar Aktualisasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober Tahun 2025 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi.

Bukittinggi, 24 Oktober 2025

Coach,

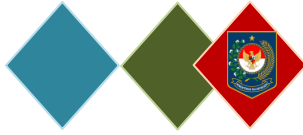
Penguji,

Faizal Roza, S.Kom., M.Kom.
NIP. 19761014 200112 1 001

Shohibul Azmi Rivai, SE. M.Si
NIP. 19751013 200801 1 001

Mengetahui
Kepala Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi
Kementerian Dalam Negeri

SARJAYADI, SS., M.A.P.
NIP. 197003041996031001



BERITA ACARA SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Pada Hari : Jumat
Tanggal : 24 Oktober 2025
Pukul : 08.00 s/d 17.00 WIB
Tempat : PPSPDM Regional Bukittinggi

Telah Diseminarkan Laporan Pelaksanaan Aktualisasi Latsar CPNS Angkatan 14 Tahun 2025

JUDUL : OPTIMALISASI PEMANFAATAN DATA SEBARAN KEJADIAN BENCANA MELALUI PEMETAAN TEMATIK MENGGUNAKAN *GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM* (GIS) DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KERINCI
DISUSUN OLEH : REVIA KUSUMA WARDANI
KELAS/KELOMPOK : 14
NO. PRESENSI : 37
INSTANSI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KERINCI
JABATAN : ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA

Dan telah mendapat pengujian/komentar/masukan/saran dari Penguji, Mentor dan *Coach*/Moderator.

COACH,

PESERTA,

Faizal Roza, S.Kom., M.Kom.

NIP. 19761014 200112 1 001

Revia Kusuma Wardani, S.P.W.K.

NIP. 20010924 202505 2 001

PENGUJI

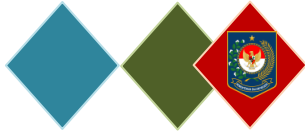
MENTOR,

Shohibul Azmi Rivai, SE. M.Si

NIP. 19751013 200801 1 001

Sepramayatini, S.Hut., MM.

NIP. 19800930 200604 2 020

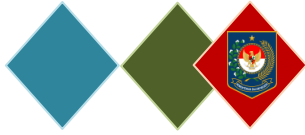


KATA PENGANTAR

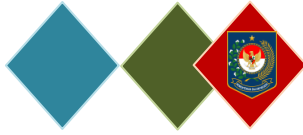
Puji syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan laporan aktualisasi dengan judul **"Optimalisasi Pemanfaatan Data Sebaran Kejadian Bencana melalui Pemetaan Tematik Menggunakan Geographic Information System (GIS) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kerinci"**. Laporan aktualisasi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Latihan Dasar CPNS Golongan III pada PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi Tahun 2025.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan hingga dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bupati Kerinci dan Wakil Bupati Kerinci yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program LATSAR CPNS Tahun 2025.
2. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bukittinggi beserta seluruh jajaran yang telah menyelenggarakan program Pelatihan Dasar CPNS.



3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci yang telah memberi izin dan saran demi kelancaran kegiatan aktualisasi.
4. Bu Sepramayatini, S.Hut., MM selaku Plt. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sekaligus mentor yang telah memberi dukungan, membimbing serta memberi masukan demi keberhasilan penulis selama kegiatan aktualisasi.
5. Bapak Faisal Rozam S.Kom., M.Kom. selaku *coach* yang memberikan motivasi, pendampingan, serta masukan konstruktif selama pembelajaran aktualisasi.
6. Bapak Shohibul Azmi Rivai, SE. M.Si. selaku penguji yang memberi masukan terhadap laporan pelaksanaan aktualisasi.
7. Keluarga yang senantiasa memberikan segala bentuk dukungan dan doa demi kelancaran kegiatan aktualisasi penulis.
8. Teman-teman CPNS BPBD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 yang memberi banyak bantuan, doa dan dukungan untuk sama-sama menyelesaikan kegiatan aktualisasi.
9. Teman-teman LATSAR Angkatan XIV yang sudah saling mendukung dan membantu demi kelancaran kegiatan aktualisasi.
10. Seluruh rekan-rekan di lingkungan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci yang turut memberi dukungan penulis untuk menyelesaikan kegiatan aktualisasi.



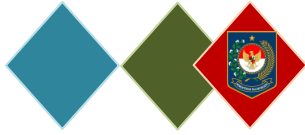
Laporan yang disusun oleh peneliti tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran akan diterima untuk terciptanya laporan aktualisasi yang lebih baik. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, peneliti ucapkan terima kasih tak terhingga bagi semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Semoga laporan aktualisasi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak khususnya dalam pengembangan kompetensi ASN.

Bukittinggi, 24 Oktober 2025

Peserta,

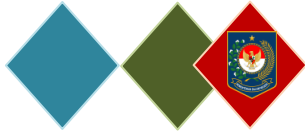
Revia Kusuma Wardani, S.P.W.K.

NIP. 20010924 202505 2 001

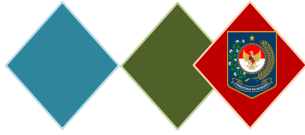


DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI	i
BERITA ACARA SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	6
C. Ruang Lingkup	7
BAB II PROFIL INSTANSI DAN PESERTA.....	8
A. Profil Instansi.....	8
B. Profil Peserta.....	14
BAB III RINGKASAN RANCANGAN AKTUALISASI.....	16
A. Deskripsi <i>Core</i> Isu	16
B. Analisis <i>Core</i> Isu.....	34
C. Rumusan Isu	39
D. Gagasan Kreatif Penyelesaian <i>Core</i> Isu.....	40
BAB IV CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	41
A. Matriks Jadwal Kegiatan Aktualisasi.....	41
B. Matriks Pelaksanaan Aktualisasi	44
C. Matriks Rekapitulasi Realisasi Habitulasi NDD PNS (BerAKHLAK) .	50
D. Capaian Penyelesaian <i>Core</i> Isu	51
E. Manfaat Terselaksainkannya <i>Core</i> Isu	58
F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi	61
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	63
A. Kesimpulan.....	63

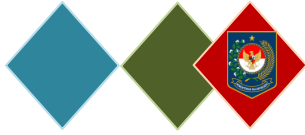


B. Rekomendasi.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	71



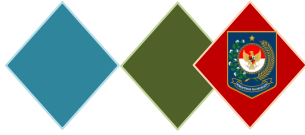
DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Penetapan <i>Core</i> Isu dengan Analisis APKL	35
Tabel 3. 2 Penetapan Penyebab Core Isu dengan Analisis USG	37
Tabel 3. 3 Deskripsi Kriteria <i>URGENCY</i>	38
Tabel 3. 4 Deskripsi Kriteria <i>SERIOUSNESS</i>	38
Tabel 3. 5 Deskripsi Kriteria <i>GROWTH</i>	38
Tabel 4. 1 Jadwal Kegiatan Aktualisasi	42
Tabel 4. 2 Matriks Pelaksanaan Aktualisasi	44
Tabel 4. 3 Matriks Rekapitulasi Realisasi Habituasi NDD PNS (BerAKHLAK) .	50
Tabel 4. 4 Capaian Penyelesaian Core Isu	51
Tabel 4. 5 Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi	61



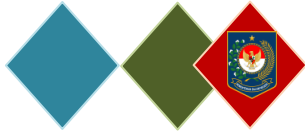
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bencana Banjir dan Longsor Kabupaten Kerinci Tahun 2024.....	2
Gambar 2. 1 Kantor BPBD Kabupaten Kerinci	8
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Kerinci	12



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Mingguan Minggu ke-1	74
Lampiran 2. Laporan Mingguan Minggu Ke-2	85
Lampiran 3. Laporan Mingguan Minggu Ke-3	102
Lampiran 4. Laporan Mingguan Minggu Ke-4	122
Lampiran 5. Laporan Mingguan Minggu Ke-5	142



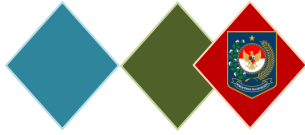
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu kabupten di Provinsi Jambi yang memiliki karakteristik geografis, geologis, dan topografis dan memiliki resiko tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam. Kondisi topografi yang berbukit-bukit dengan kemiringan lereng curam, ditambah dengan keberadaannya di kaki Gunung Kerinci menjadikan Kabupaten Kerinci memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi. Faktor geologis yang kompleks karena berada pada jalur patahan aktif Sumatera juga menambah potensi resiko bencana di Kabupaten Kerinci. Kombinasi dari berbagai kondisi tersebut ditambah dengan kondisi iklim tropis dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun menyebabkan Kabupaten Kerinci menjadi salah satu daerah di Provinsi Jambi yang memiliki multi-risiko bencana mulai dari gempa bumi, tanah longsor, banjir, hingga potensi erupsi gunung api.

Tingginya tingkat risiko bencana di Kabupaten Kerinci tercermin dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dirilis oleh BNPB. Berdasarkan data IRBI, Kabupaten Kerinci menempati urutan ke-4 di Provinsi Jambi dengan indeks risiko bencana sebesar 143,41 pada tahun 2024 yang mengalami peningkatan signifikan dari indeks 140,58 pada tahun 2023. Peningkatan indeks risiko ini mengindikasikan bahwa tingkat kerawanan

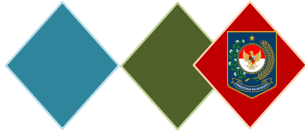


bencana di Kabupaten Kerinci semakin meningkat dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kerinci mencatat bahwa jumlah penduduk yang berada di kawasan rawan bencana pada tahun 2024 mencapai 119.039 jiwa. Angka tersebut cukup signifikan menggambarkan besarnya potensi dampak yang dapat ditimbulkan apabila terjadi bencana. Kondisi ini menuntut adanya upaya sistematis dan terkoordinasi dalam pengelolaan risiko bencana untuk melindungi hidup dan penghidupan masyarakat.



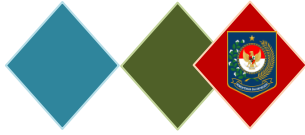
**Gambar 1. 1 Bencana Banjir dan Longsor Kabupaten Kerinci
Tahun 2024**

Berdasarkan data historis yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci bahwa hampir setiap tahun selalu terdapat catatan kejadian bencana yang menimpa ini dengan berbagai tingkat intensitas dan dampak. Bencana yang paling sering terjadi meliputi banjir, tanah longsor, dan angin kencang. BPBD Kabupaten Kerinci mencatat



bahwa pada Tahun 2024 terjadi sebanyak 55 kejadian bencana dimana banjir terjadi sebanyak 36 kejadian, longsor 13 kejadian dan angin puting beliung 6 kejadian. Dari total 55 kejadian bencana tersebut menyebabkan banyak kerusakan baik fasilitas, lahan dan rumah hingga menimbulkan korban jiwa. Tahun 2024 menjadi salah satu tahun yang sangat berkesan dalam sejarah kebencanaan Kabupaten Kerinci karena terjadi banjir besar yang berlangsung hampir satu bulan penuh, menyebabkan kerugian material yang sangat besar dan mengganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat secara signifikan. Kejadian ini menjadi pembelajaran penting bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ada masih perlu dioptimalkan.

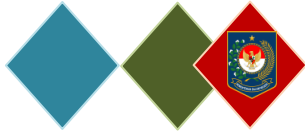
Menghadapi kompleksitas permasalahan kebencanaan tersebut, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi geografis menjadi sangat strategis dalam mendukung upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien. Data kejadian bencana yang selama ini dimiliki dan dicatat oleh BPBD Kabupaten Kerinci masih belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana padahal data-data tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk dianalisis dan dispasialkan melalui pemetaan tematik sebaran kejadian bencana yang dapat memberikan gambaran komprehensif tentang pola dan dampak bencana di wilayah Kabupaten Kerinci. Implementasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk pemetaan sebaran kejadian bencana akan memungkinkan integrasi berbagai layer data spasial seperti topografi,



geologi, demografi dan olahan data sebaran kejadian bencana untuk menghasilkan peta spasial sebaran kejadian bencana yang lebih akurat dan komprehensif.

Era digitalisasi saat ini menuntut setiap organisasi, termasuk BPBD Kabupaten Kerinci sebagai salah satu instansi pemerintah untuk melakukan transformasi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Transformasi digital dalam pengelolaan data kebencanaan tidak hanya akan meningkatkan akurasi dan aksesibilitas informasi, tetapi juga mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh bencana sebagaimana menyelaraskan Misi ke-4 Kabupaten Kerinci yaitu “Meningkatkan Infrastruktur Kewilayahan dan Ketahanan Bencana”.

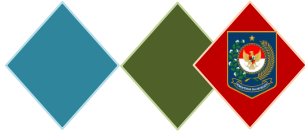
Reformasi birokrasi dan transformasi aparatur sipil negara memberikan momentum yang tepat untuk melakukan pembenahan sistem pengelolaan data kebencanaan di lingkungan BPBD Kabupaten Kerinci. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memberikan landasan hukum baru bagi penyelenggaraan manajemen ASN di Indonesia. UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 ini menekankan pentingnya inovasi, kreativitas, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ASN dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menyikapi hal ini maka sebagai ASN BPBD dituntut untuk dapat mengembangkan solusi inovatif yang berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas sistem penanggulangan bencana. Prinsip-prinsip dasar ASN



dalam setiap aspek pengelolaan data kebencanaan untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan akurat, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk membentuk PNS profesional melalui penguatan sikap dan perilaku disiplin PNS, nilai-nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta penguasaan kompetensi teknis bidang tugas agar mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Salah satu komponen krusial dalam Latsar adalah kegiatan aktualisasi yang mengharuskan peserta untuk mengidentifikasi isu atau permasalahan di unit kerja masing-masing, merancang solusi pemecahan masalah, serta melaksanakannya dengan mengintegrasikan nilai-nilai ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dalam setiap tahapannya. Implementasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) menjadi sangat relevan dalam konteks pengembangan sistem informasi geografis untuk pemetaan sebaran kejadian bencana.

Berdasarkan pada kompleksitas permasalahan kebencanaan di Kabupaten Kerinci, potensi pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal, tuntutan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan,

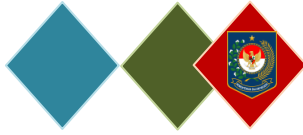


serta komitmen untuk mengimplementasikan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, maka diperlukan upaya konkret untuk mengoptimalkan pemanfaatan data kejadian bencana melalui pengembangan pemetaan tematik sebaran kejadian bencana. Laporan pelaksanaan aktualisasi ini dirancang sebagai bentuk kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BPBD Kabupaten Kerinci dalam menjalankan tupoksi pengelolaan informasi dan data kebencanaan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Oleh karena itu, penulis menyusun laporan pelaksanaan aktualisasi dengan judul **“Optimalisasi Pemanfaatan Data Sebaran Kejadian Bencana Melalui Pemetaan Tematik Menggunakan *Geographic Information System* (GIS) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kerinci”**. Melalui implementasi Sistem Informasi Geografis yaitu dengan aplikasi arcGIS untuk pemetaan sebaran kejadian bencana diharapkan dapat tercipta informasi spasial yang valid bagi masyarakat dan dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data historis dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Kerinci.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya pelaksanaan aktualisasi ini adalah:

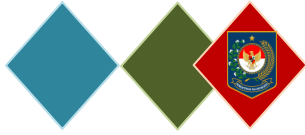
1. Mengimplementasikan nilai-nilai ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif).



2. Mengoptimalkan pemanfaatan data sebaran kejadian bencana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci untuk diolah menjadi peta tematik.
3. Menyediakan informasi spasial sebaran kejadian bencana yang akurat kepada masyarakat.
4. Mendukung transformasi digital dan pengambilan keputusan berbasis informasi spasial dalam rangka penanggulangan bencana di lingkungan BPBD Kabupaten Kerinci.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan pelaksanaan aktualisasi ini difokuskan pada kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan publikasi peta sebaran kejadian bencana di Kabupaten Kerinci berbasis *Geographic Information System* (GIS). Batasan kegiatan meliputi penggunaan data sekunder internal BPBD yang terkait dengan historis kejadian bencana pada Tahun 2024, dengan hasil akhir berupa peta tematik yang dapat menjadi bahan analisis serta pengambilan keputusan sehingga informasi spasial yang dihasilkan lebih mudah dipahami dan dimanfaatkan. Cakupan wilayah pemetaan yaitu wilayah administratif Kabupaten Kerinci.



BAB II

PROFIL INSTANSI DAN PESERTA

A. Profil Instansi

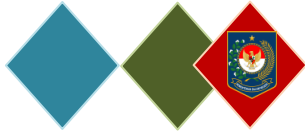
Profil instansi memberikan gambaran umum mengenai keberadaan, peran, serta kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kerinci sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab penting dalam urusan penanggulangan bencana. Berikut profil instansi BPBD Kabupaten Kerinci mencakup sejarah lembaga, visi misi, struktur organisasi, serta tugas pokok dan fungsi yang menjadi landasan BPBD dalam melaksanakan perannya.

1. Sejarah Lembaga



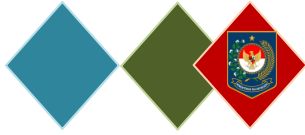
Gambar 2. 1 Kantor BPBD Kabupaten Kerinci

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah, Jl. Ke Bukit
Tengah, Bukit Tengah, Kecamatan Siulak,
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana. Dalam menjalankan tugasnya, BPBD di tingkat daerah berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BPBD resmi dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 sebagai pengganti dari dua organisasi sebelumnya yaitu Satuan Koordinasi Pelaksanan Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten/Kota.

BPBD memiliki kedudukan sebagai lembaga yang berada di bawah pengawasan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Kepemimpinan BPBD dipegang oleh seorang kepala yang dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai pejabat *ex-officio*. Jabatan *ex officio* sendiri adalah jabatan yang diduduki seseorang dalam suatu lembaga berdasarkan jabatannya di lembaga lain, tanpa perlu pengangkatan atau penetapan khusus. Sekretaris Daerah yang menjabat sebagai kepala BPBD ini juga memiliki tanggung jawab penuh kepada Bupati dalam menjalankan tugasnya. BPBD Kabupaten Kerinci memiliki struktur



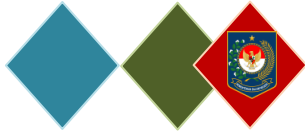
kepemimpinan yang terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai Kepala Badan dan seorang Kepala Pelaksana yang menangani aspek teknis. Sistem kepemimpinan ganda ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan bencana.

Pembentukan BPBD Kabupaten Kerinci secara resmi merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. BPBD Kabupaten Kerinci secara resmi didirikan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2009. Struktur dan tugas BPBD kemudian secara lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2011. Peraturan Bupati tersebut kemudian mengalami revisi pada tahun 2020 melalui Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 32 Tahun 2020 untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi daerah

2. Visi Misi Instansi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029, Visi Kabupaten Kerinci adalah **“Mewujudkan Kerinci yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”**. Dalam Mewujudkan Visi tersebut, maka Misi Kabupaten Kerinci adalah :

1. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Berkualitas dan Pelayanan Publik Adaptif serta Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan.

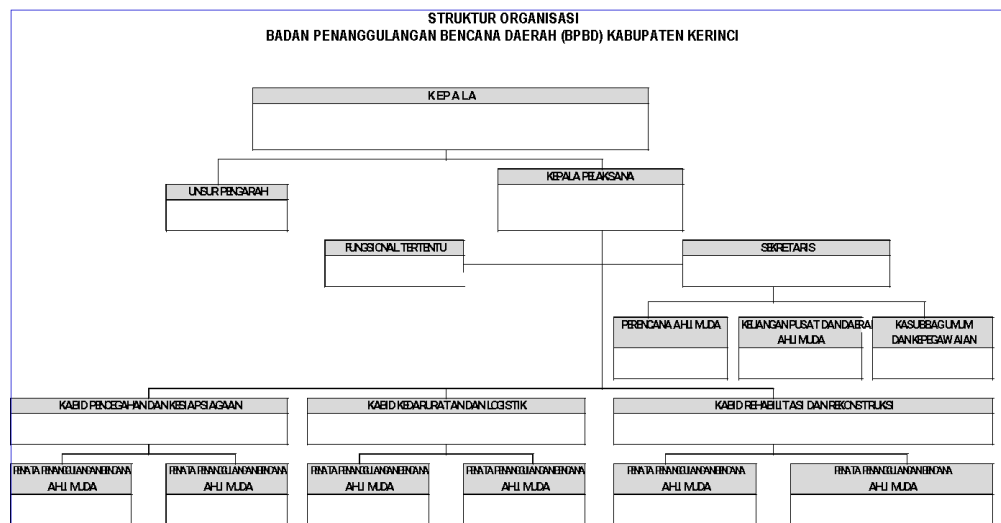
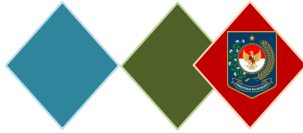


2. Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Inklusif Berbasis Pertanian.
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Pengarustamaan Gender untuk SDM Berdaya Saing serta Ketahanan Sosial Budaya.
4. Meningkatkan Infrastruktur Kewilayahan dan Ketahanan Bencana dan Ekologi.
5. Pengembangan Inovasi untuk Kemandirian dan Daya Saing Daerah serta Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci mendukung pencapaian Visi Kabupaten Kerinci melalui Misi yang ke-4 yaitu **“Meningkatkan Infrastruktur Kewilayahan dan Ketahanan Bencana dan Ekologi”**.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci, struktur organisasi BPBD Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada gambar berikut:

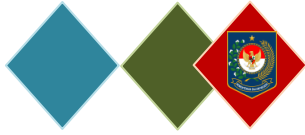


Gambar 2. 2 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Kerinci

4. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci mempunyai tugas untuk membantu Bupati Kerinci dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 pada Pasal 389. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

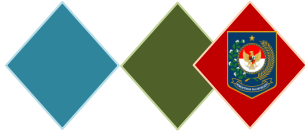
1. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan rencana kerja penanggulangan bencana daerah dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;



2. Pengoordinasian pengintegrasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Pengoordinasian mobilisasi sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Pengendalian penggunaan anggaran dan barang yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah;
5. Pemberian komando dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan bencana daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 392 dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.



Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Kerinci terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

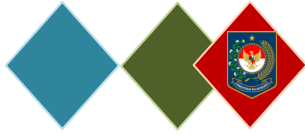
B. Profil Peserta

Berikut merupakan profil peserta yang terdiri dari biodata dan tugas pokok dan fungsi jabatan peserta sebagai Analis Kebencanaan Ahli Pertama.

1. Biodata Peserta



Nama	: Revia Kusuma Wardani
NIP	: 20010924 202505 2 001
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarsari, 24 September 2001
Pendidikan Terakhir	: S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota

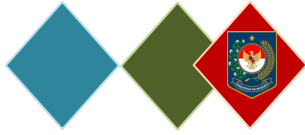


Pangkat/Gol : Penata Muda / IIIa
Jabatan : Analis Kebencanaan Ahli Pertama
Unit Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kerinci
Instansi : Pemerintah Kabupaten Kerinci

2. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Kebencanaan bahwa jabatan Fungsional Analis Kebencanaan adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan analisis kebencanaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyuluhan kebencanaan dan pengembangan strategi kebencanaan. Analis Kebencanaan berkedudukan sebagai pelaksana teknis kegiatan di bidang analisis kebencanaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan pada Instansi Pemerintah. Adapun ruang lingkup kegiatan Analis Kebencanaan Ahli Pertama adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bahan analisis kebencanaan;
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Penyuluhan kebencanaan.



BAB III

RINGKASAN RANCANGAN AKTUALISASI

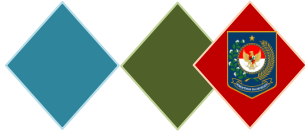
A. Deskripsi Core Isu

Isu merupakan suatu hal yang hangat dibicarakan dan muncul karena adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan realitas yang terjadi. Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama bekerja di BPBD Kabupaten Kerinci, hasil diskusi dengan mentor dan mengaitkan dengan aspek Manajemen ASN serta Smart ASN didapatkan isu-isu yang diidentifikasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Minimnya informasi spasial kejadian bencana di Kabupaten Kerinci

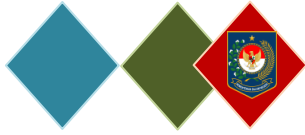
a. Kondisi permasalahan saat ini beserta data dan fakta pendukung

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang memiliki tingkat resiko bencana tinggi. Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia, Kabupaten Kerinci menempati urutan ke-4 di Provinsi Jambi dengan indeks 143,41 di Tahun 2024 yang mengalami peningkatan dari indeks 140,58 di Tahun 2023. Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Kerinci memiliki indeks risiko bencana tinggi di salah satu desa/kelurahannya. Tingginya indeks resiko bencana di Kabupaten Kerinci tersebut juga selaras dengan data historis kejadian bencana BPBD yang terjadi. BPBD Kabupaten Kerinci mencatat bahwa pada Tahun 2024 terjadi



sebanyak 55 kejadian bencana dimana banjir terjadi sebanyak 36 kejadian, longsor 13 kejadian dan angin puting beliung 6 kejadian. Dari total 55 kejadian bencana tersebut menyebabkan banyak kerusakan baik fasilitas, lahan dan rumah hingga menimbulkan korban jiwa. Pada Tahun 2024 dari kejadian bencana banjir, longsor dan angin puting beliung yang terjadi tercatat menyebabkan kerusakan sekitar 7.695 unit rumah dan 54 fasilitas. Selain itu, dari bencana tersebut juga telah memakan korban jiwa sebanyak 2 orang dan menyebabkan sebanyak 25.365 orang menderita. Jadi dari data IRBI dan data historis kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Kerinci memang Kabupaten Kerinci sangat beresiko terjadi bencana-bencana yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

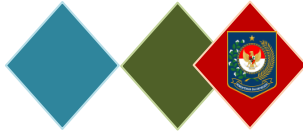
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kerinci merupakan instansi di Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra-bencana, tanggap darurat dan pasca-bencana. Dalam tahapan pra-bencana salah satunya dapat diwujudkan melalui penyusunan Kajian Resiko Bencana yang terstruktur dan terpublikasi yang didalamnya memuat informasi maupun peta bahaya, kerentanan, kapasitas dan resiko bencana yang ada di Kabupaten Kerinci. Selain itu, dokumen tersebut juga menjadi landasan perumusan strategi dan kebijakan penanggulanga



bencana yang efektif. Namun, Kabupaten Kerinci saat ini belum memperbarui dokumen KRB tersebut sehingga masyarakat memiliki keterbatasan untuk mendapatkan informasi kebencanaan di Kabupaten Kerinci.

Upaya yang telah dilakukan BPBD saat ini masih sampai pada perekapan data kejadian bencana bulanan setiap tahun dalam bentuk tabulasi sederhana menggunakan aplikasi *Microsoft Excel*. Data ini memang dapat menggambarkan jumlah kejadian bencana dan dampaknya, namun masih bersifat data mentah internal yang tidak dipublikasikan secara luas dan belum disajikan dalam bentuk spasial. Hal ini mengakibatkan informasi mengenai sebaran wilayah yang sering terdampak bencana, jumlah jiwa terdampak, maupun tingkat kerusakan belum terpetakan secara visual dan sistematis. Padahal sejatinya visualisasi spasial sangat penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat dan mendukung proses mitigasi berbasis komunitas (*community-based disaster risk reduction*).

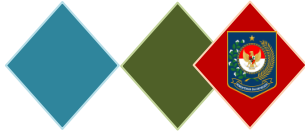
Data sebaran kejadian bencana yang dimiliki BPBD saat ini merupakan salah satu data yang dijadikan dasar dalam perumusan strategi dan kebijakan penanggulangan bencana. Namun permasalahannya adalah data tersebut belum dimaksimalkan menjadi informasi spasial sehingga data tersebut belum dapat memvisualisasikan sebaran bencana yang terjadi di tiap kecamatan



tertinggi/terendahnya, berapa jumlah terdampak, berapa jumlah kerusakan dll. Hal tersebut mengakibatkan keefektifan dan ketepatan sasaran pengambilan kebijakan yang berdasar dari data tersebut masih belum maksimal dan menghambat pemenuhan pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Kerinci.

b. Dampak dan para pihak terdampak

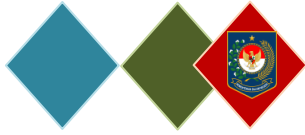
Minimnya informasi spasial kejadian bencana berarti ketersediaan data geografis mengenai sebaran dan area terdampak bencana tidak memadai. Kondisi ini berdampak besar terhadap efektivitas penanggulangan bencana karena menghambat upaya mitigasi, serta penilaian risiko bencana secara menyeluruh. Tanpa adanya peta yang memuat data kejadian, wilayah terdampak, jumlah jiwa, hingga kerusakan sarana dan prasarana maka sulit bagi BPBD maupun masyarakat untuk benar-benar memahami bahaya serta kerentanan yang ada di Kabupaten Kerinci berdasar atas historis kejadian bencana yang benar-benar terjadi di Kabupaten Kerinci. Hal tersebut berarti akan terjadi ketidaktepatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana. Dari hal ini juga akan mengakibatkan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana belum akan menjadi fokus utama penanggulangan bencana karena masih minimnya informasi spasial



sehingga pada akhirnya penanggulangan bencana hanya akan berfokus pada respon darurat ketika saat bencana terjadi.

Minimnya informasi spasial juga berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman di lingkungan tempat tinggalnya. Tanpa adanya informasi spasial sebaran kejadian bencana maka masyarakat sulit untuk memahami potensi bencana di lingkungan mereka hingga bagaimana bertindak saat bencana apalagi untuk mengimplementasikan kesiapsiagaan bencana. Padahal sejatinya budaya kesiapsiagaan hanya bisa tumbuh jika masyarakat tahu kondisi atau resiko bencana apa yang akan mereka hadapi. Kondisi ini membuat peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana rendah. Jika hal demikian terjadi maka potensi dampak bencana dapat meningkat karena salah satu dasar upaya penanggulangan bencana melalui penyediaan informasi spasial masih minim.

Minimnya informasi spasial sebaran kejadian bencana memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebencanaan sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018. SPM tersebut menuntut adanya KRB, data kejadian bencana terdahulu, maupun pemetaan kebencanaan untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat. Jadi, minimnya informasi spasial ini membuat tahapan pra-bencana dalam penyelenggaraan

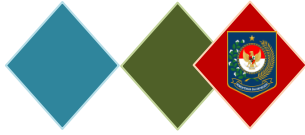


penanggulangan bencana dan pemenuhan SPM secara tidak langsung masih belum optimal. Hal tersebut berarti bahwa tidak hanya masyarakat yang mendapatkan informasi minim terkait kebencanaan melainkan BPBD Kabupaten Kerinci juga kehilangan instrumen utama untuk merancang strategi penanggulangan bencana yang efektif.

c. Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN

1. Keterkaitan dengan Manajemen ASN

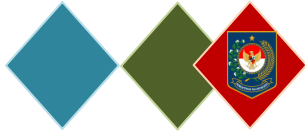
Kondisi terbatasnya informasi spasial kejadian bencana di Kabupaten Kerinci menunjukkan bahwa masih ada ruang yang perlu diperkuat dalam tata kelola pelayanan publik di bidang kebencanaan. Menurut UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik yang dituntut menyediakan layanan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Keberadaan peta sebaran kejadian bencana seharusnya menjadi instrumen penting dalam mendukung tahap pra-bencana untuk mendukung mitigasi, kesiapsiagaan, serta pengambilan keputusan berbasis risiko. Minimnya informasi spasial kejadian bencana ini mencerminkan bahwa aspek kompetensi teknis ASN dalam pengelolaan informasi kebencanaan perlu ditingkatkan, sekaligus memperkuat kompetensi manajerial agar data dapat diolah menjadi kebijakan yang akurat dan tepat sasaran. Namun, karena pengelolaan data spasial di tingkat daerah masih minim



maka layanan informasi yang diberikan kepada masyarakat juga belum maksimal. Hal ini bukan berarti ASN tidak menjalankan peran, tetapi lebih kepada perlunya penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan agar data spasial dapat diolah dan disajikan sesuai prinsip manajemen ASN berbasis kinerja dan akuntabilitas.

2. Keterkaitan dengan Konsep Smart ASN

Isu minimnya informasi spasial kejadian bencana sangat berkaitan dengan tuntutan penguasaan *digital skill* dan *digital ethics* pada konsep Smart ASN. *Digital skill* diperlukan agar ASN mampu memanfaatkan teknologi geospasial dan mengolah data bencana. Sementara *digital ethics* menekankan pentingnya ketepatan, akurasi, dan kejujuran dalam penyajian data, sehingga informasi yang dipublikasikan tidak menyesatkan masyarakat. Ketika ASN memiliki kemampuan menganalisis data, memanfaatkan teknologi, dan memberikan informasi spasial kebencanaan secara tepat maka visi pemerintah dalam mewujudkan ASN yang profesional, adaptif, dan berbasis digital dapat tercapai. Hal ini bukan hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat karena informasi spasial yang akurat menjadi dasar bagi upaya mitigasi, kesiapsiagaan, serta pengambilan keputusan terkait dengan penanggulangan bencana. Jadi, perlunya informasi spasial kebencanaan ini bukan sekadar



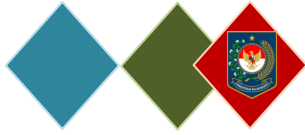
kebutuhan teknis, melainkan bagian dari transformasi menuju birokrasi modern yang mampu menjawab tantangan kebencanaan di era digital.

2) Minimnya penyebaran konten edukatif melalui sosial media sebagai perwujudan komunikasi, informasi dan edukasi

a. Kondisi permasalahan saat ini beserta data dan fakta pendukung

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota terdapat salah satu jenis pelayanan dasar yang wajib dipenuhi yaitu pelayanan informasi rawan bencana dengan kegiatan pelayanan salah satunya adalah komunikasi, informasi dan edukasi. Kegiatan pelayanan tersebut salah satunya dapat dipenuhi melalui komponen sosialisasi melalui media sosial yang mana hal ini berarti menjadi kewajiban BPBD untuk menyampaikan informasi kebencanaan kepada masyarakat melalui media sosial. Namun pada realisasinya, BPBD Kabupaten Kerinci memiliki beberapa permasalahan diantaranya adalah:

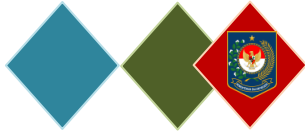
1. BPBD Kabupaten Kerinci hanya memiliki akun sosial media aktif berupa facebook, namun jangkauannya tidak kuat untuk menjangkau generasi mudaa yang lebih aktif di platform visual seperti instagram atau tiktok.



2. BPBD Kabupaten Kerinci sudah memiliki akun sosial media Instagram namun terakhir aktif pada tahun 2023, dan hingga saat ini tidak ada aktivitas konten sama sekali. Hal ini berdampak terhadap terbatasnya arus informasi mengenai kebencanaan baik pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Sejatinya permasalahan tersebut bukan sekadar postingan di media sosial mengenai kebencanaan tetapi juga menyangkut kewajiban pelayanan publik (SPM KIE) dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses informasi kebencanaan yang modern, tervisualisasi dengan baik dan cepat. Dengan kondisi hanya akun facebook yang aktif, instagram mati dan minimnya konten edukatif yang termuat di sosial media BPBD mencerminkan adanya gap antara aspirasi edukasi kebencanaan sebagaimana yang telah dilakukan oleh BNPB.

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa sarana komunikasi publik melalui media yang seharusnya menjadi saluran komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan masih minim dikelola secara konsisten dan belum menyesuaikan dengan kebiasaan digital masyarakat di era digitalisasi ini. Padahal SPM juga mensyaratkan keterjangkauan masyarakat terhadap informasi kebencanaan. Jika dimanfaatkan dengan baik, sosial media sejatinya dapat meningkatkan pemahaman masyarakat secara lebih efektif melalui konten visual yang interaktif sekaligus memenuhi komponen kegiatan

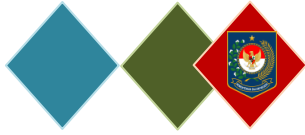


SPM Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui sosialisasi melalui media sosial.

b. Dampak dan para pihak terdampak

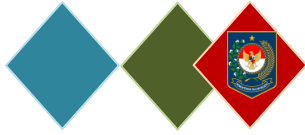
Minimnya penyebaran konten edukatif melalui sosial media sebagai perwujudan komunikasi, informasi dan edukasi menimbulkan berbagai dampak. Kondisi pasifnya media sosial BPBD Kabupaten Kerinci yang hanya aktif akun facebooknya dan akun instagram yang aktif terakhir Tahun 2023 menyebabkan kesenjangan dalam penyampaian edukasi bencana. Jika menyesuaikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan kebencanaan bahwa komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) merupakan layanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah sebagai bagian dari hak masyarakat.

Dampak utama dari isu ini adalah rendahnya literasi kebencanaan masyarakat. Minimnya konten edukatif yang tersebar di masyarakat terlebih untuk kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia dan penyandang disabilitas menyebabkan mereka sulit memahami ancaman yang ada di sekitar mereka serta langkah antisipasi yang harus dilakukan. Hal sederhana seperti cara membuat tas siaga bencana hingga mengenali tanda-tanda longsor atau banjir pun tidak tersampaikan dengan baik kepada publik yang dampaknya adalah masyarakat cenderung tidak siap ketika bencana datang, panik dalam menghadapi keadaan darurat, dan salah mengambil tindakan.



Situasi ini memperbesar potensi korban jiwa dan kerugian harta benda yang seharusnya bisa diminimalisir jika edukasi kebencanaan berjalan efektif. Meskipun terdapat kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang dilakukan secara tatap muka namun jangkauan audiensnya tentu saja tidak seluas apabila diimbangi dengan penyebaran konten edukatif di media sosial. Ketidakaktifan BPBD di platform yang sesuai dengan tren generasi muda menyebabkan adanya gap informasi antar generasi, yang berbahaya karena kelompok usia produktif justru kurang teredukasi. Generasi muda yang seharusnya menjadi agen perubahan dengan literasi digital yang tinggi justru kehilangan kesempatan untuk belajar dari kanal resmi pemerintah mengenai kebencanaan.

Kondisi tersebut juga memengaruhi tingkat ketahanan daerah. Ketahanan daerah tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pemerintah, tetapi juga oleh pengetahuan dan kesiapan masyarakat. Tanpa adanya edukasi kebencanaan yang terdistribusi luas melalui media sosial, masyarakat tetap berada dalam posisi rentan. Hal tersebut memperbesar risiko kerugian ketika bencana terjadi, baik berupa korban jiwa, kerusakan infrastruktur, maupun kerugian ekonomi. Jadi, minimnya penyebaran konten edukatif melalui media sosial merupakan persoalan strategis yang memengaruhi keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat Kabupaten Kerinci.

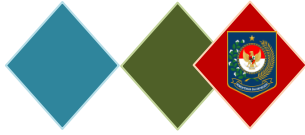


c. Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN

1. Keterkaitan dengan Manajemen ASN

Kondisi yang terjadi di BPBD Kerinci di mana akun Instagram resmi tidak aktif sejak 2023 dan komunikasi publik hanya bertumpu pada Facebook menunjukkan bahwa pengelolaan ASN, khususnya dalam aspek kompetensi dan kinerja, belum berjalan optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan publik menuntut adanya kemampuan adaptif dalam memanfaatkan media digital untuk lebih dapat mencakup jangkauan masyarakat luas. Kewajiban memberikan pelayanan dasar melalui komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan (KIE) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 menuntut ASN untuk hadir secara aktif di ruang digital yang digunakan masyarakat.

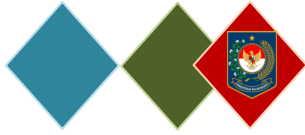
Dalam Modul Manajemen ASN menekankan bahwa kompetensi ASN meliputi aspek teknis, manajerial, dan sosial-kultural. Minimnya aktivitas media sosial BPBD menandakan bahwa aspek kompetensi teknis khususnya kemampuan komunikasi digital belum dikembangkan secara optimal. Indikator kinerja ASN seharusnya mencakup keterlibatan dalam penyusunan dan penyebaran konten edukatif kebencanaan. Pada



kenyataannya kegiatan tersebut belum menjadi tolok ukur kinerja di BPBD Kabupaten Kerinci sehingga komunikasi dalam rangka edukasi kebencanaan hanya dilakukan secara minimal. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip sistem merit, yaitu pengelolaan ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil.

2. Keterkaitan dengan Konsep SMART ASN

Isu minimnya penyebaran konten edukatif melalui sosial media sebagai perwujudan komunikasi, informasi dan edukasi mencerminkan lemahnya penerapan prinsip transformasi digital dalam pelayanan publik. Sejatinya hadirnya Smart ASN menuntut aparatur menguasai literasi digital agar mampu menyebarkan informasi secara efektif di ruang publik. Adanya isu ini menunjukkan bahwa keterampilan digital ASN (*digital skill*) belum memadai. ASN seharusnya memiliki kemampuan teknis membuat konten edukatif yang sederhana namun menarik, seperti infografis atau video singkat mitigasi bencana yang disebar ke sosial media untuk dapat menjangkau masyarakat luas. Jika prinsip Smart ASN ini dijalankan maka BPBD Kerinci dapat memperluas jangkauan edukasi bencana dan memenuhi kewajiban pelayanan dasar dalam konteks komunikasi, informasi dan edukasi yang disampaikan di media sosial

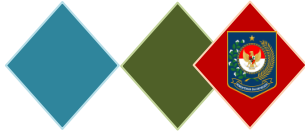


3) Belum tersedianya pengarsipan laporan kejadian bencana secara digital yang terakses secara publik

a. Kondisi permasalahan saat ini beserta data dan fakta pendukung

Kabupaten Kerinci setiap tahunnya pasti memiliki historis kejadian bencana yang terjadi seperti banjir, longsor, angin puting beliung dll. Ketika bencana tersebut terjadi tim reaksi cepat (TRC) BPBD sebenarnya selalu melakukan pendataan di lapangan. Data tersebut meliputi jenis bencana, lokasi terdampak, jumlah korban jiwa, kerusakan sarana-prasarana, hingga kebutuhan darurat masyarakat. Semua data kemudian dicatat dalam form laporan kejadian bencana. Namun hingga saat ini, laporan-laporan tersebut hanya berbentuk fisik (kertas) dan disimpan sebagai arsip internal tanpa ada pengarsipan secara digital yang dapat diakses oleh publik maupun *stakeholder* lainnya. Permasalahan ini menyebabkan data-data menjadi tidak terintegrasi dan rawan tercecer. Akses terhadap data kebencanaan juga menjadi terbatas hanya pada pihak internal BPBD padahal *stakeholder* dan masyarakat yang menginginkan data tersebut kesulitan mendapatkannya.

Informasi kebencanaan wajib disampaikan secara terbuka, akurat, dan dapat diakses oleh masyarakat. Laporan kejadian bencana merupakan instrumen utama dalam tahapan tanggap darurat maupun pasca-bencana, karena memuat data dasar yang dibutuhkan untuk:



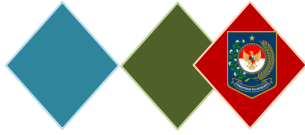
1. Menentukan status keadaan darurat.
2. Menyusun kebutuhan logistik dan peralatan.
3. Menghitung dampak kerusakan dan kerugian.
4. Menjadi basis penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tanpa adanya pengarsipan digital yang terintegrasi, proses penyelenggaraan penanggulangan bencana berpotensi tidak efisien. Misalnya pada saat bencana terjadi secara berulang, BPBD kesulitan melakukan analisis tren karena harus membuka arsip fisik manual yang tidak mudah diakses. Kondisi ini tentunya dapat menghambat efektivitas pengambilan keputusan serta memperlambat koordinasi lintas sektor.

b. Dampak dan para pihak terdampak

Ketiadaan sistem pengarsipan laporan kejadian bencana secara digital di Kabupaten Kerinci memberikan dampak nyata yang cukup luas tidak hanya bagi BPBD sebagai penyelenggara tetapi juga bagi masyarakat, pemerintah daerah, hingga pihak eksternal yang berkepentingan terhadap data kebencanaan.

Tidak adanya pengarsipan digital membuat proses kerja menjadi kurang efisien. Laporan kejadian bencana yang hanya disimpan dalam bentuk kertas menyulitkan dalam pencarian data historis maupun analisis tren kejadian bencana. Saat harus menyusun rencana kontinjensi atau laporan kepada pemerintah pusat, BPBD akan memakan waktu lebih lama karena harus membuka arsip

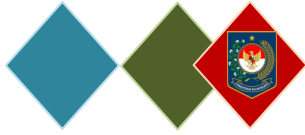


manual. Selain itu, kondisi ini menimbulkan kesan kurang transparan karena publik sulit memverifikasi data yang dimiliki BPBD.

Ketiadaan pengarsipan laporan kejadian bencana secara digital juga sangat memengaruhi proses distribusi bantuan dan logistik saat darurat. Laporan kejadian yang masih berbentuk kertas seringkali tidak segera sampai ke pihak yang bertugas menyalurkan bantuan, sehingga proses verifikasi data memakan waktu lama. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak yang seharusnya segera memperoleh kebutuhan dasar. Selain keterlambatan, distribusi bantuan juga rawan tidak tepat sasaran.

Bagi lembaga kemanusiaan dan relawan, data kebencanaan ini seharusnya menjadi rujukan untuk menyalurkan bantuan secara efektif. Namun karena adanya keterbatasan akses maka mereka seringkali harus mengandalkan laporan secara lisan atau observasi langsung yang memakan waktu. Situasi ini bukan hanya menurunkan efisiensi, tetapi juga mengurangi kualitas koordinasi lintas sektor.

Jika dilihat dari perspektif SPM kebencanaan, kondisi ini menghambat pemenuhan indikator layanan dasar pada fase tanggap darurat. SPM mewajibkan pemerintah daerah memastikan masyarakat terdampak bencana mendapat layanan dasar minimal, termasuk logistik. Jika laporan bencana tidak tersedia secara digital maka perencanaan kebutuhan logistik tidak berbasis data yang valid



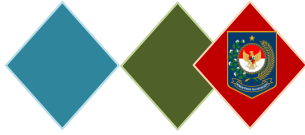
sehingga rawan terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan lapangan dengan pasokan yang ada.

Jadi, masyarakat merupakan pihak yang paling terdampak dan yang paling dirugikan. Mereka yang kehilangan rumah, mata pencaharian, atau bahkan anggota keluarga justru harus menghadapi keterlambatan bantuan akibat tidak adanya sistem pengarsipan digital. Kondisi ini dapat memperburuk trauma psikologis, memperlama pemulihan, serta menambah beban sosial ekonomi di daerah terdampak.

c. Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan Smart ASN

1. Keterkaitan dengan Manajemen ASN

Isu belum tersedianya arsip digital laporan bencana di BPBD Kabupaten Kerinci erat kaitannya dengan kedudukan dan peran ASN sebagai aparatur negara sekaligus pelayan publik. UU Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan bahwa ASN berkedudukan sebagai profesi yang menjalankan kebijakan publik, memberikan pelayanan, serta berperan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut berarti bahwa ASN tidak hanya bertugas administratif, tetapi juga dituntut untuk menghadirkan pelayanan yang akuntabel, transparan, dan sesuai perkembangan zaman. Ketiadaan arsip digital mencerminkan peran tersebut belum dijalankan secara optimal khususnya dalam fungsi ASN sebagai penyedia layanan publik yang terbuka. Ketiadaan arsip digital ini

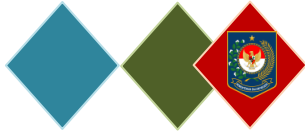


juga menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi ASN di bidang ini belum berjalan optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam UU ASN bahwa setiap ASN berhak sekaligus berkewajiban meningkatkan kompetensi agar dapat menjalankan tugas pemerintahan secara profesional.

Pengelolaan arsip digital juga menyangkut penerapan sistem merit. Sistem merit menuntut setiap pengelolaan ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Saat ini indikator kinerja ASN BPBD belum memasukkan aspek keterbukaan informasi publik melalui sistem digital. Hal ini menyebabkan pelayanan publik berjalan dengan cara konvensional yang kurang efektif. Jika prinsip meritokrasi benar-benar diterapkan, maka seharusnya terdapat optimalisasi ASN dengan kualifikasi dan kompetensi di bidang teknologi informasi yang ditempatkan pada posisi strategis untuk mengelola data dan informasi bencana.

2. Keterkaitan dengan Konsep Smart ASN

Isu belum tersedianya arsip digital laporan bencana di BPBD Kabupaten Kerinci berkaitan dengan *digital skill*, *digital ethics* dan *digital safety* dalam pilar literasi digital. Isu ini berdampak terhadap rawannya data yang tercecer dan sulit diakses publik. Smart ASN menekankan pentingnya penguasaan *digital skill* dalam pengelolaan data agar arsip terintegrasi, akurat,

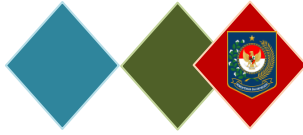


dan dapat dipertanggungjawabkan. Isu ini juga berkaitan *dengan digital safety* mengingat informasi bencana bersifat sensitif. Isu ini mengharuskan ASN ke depan wajib memahami etika digital akan menjaga kerahasiaan data tertentu namun diimbangi dengan keterbukaan akses publik sesuai prinsip transparansi data

B. Analisis Core Isu

Berdasarkan tiga isu yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penapisan isu untuk menentukan *core issue* atau isu prioritas. Proses penapisan ini menggunakan teknik APKL, yaitu metode analisis yang mempertimbangkan empat kriteria utama diantaranya adalah Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Layak.

1. **Aktual** berarti isu yang dipilih merupakan masalah yang benar-benar sedang terjadi, masih hangat, dan relevan dengan kondisi terkini di lapangan.
2. **Problematik** berarti isu yang dipilih harus mencerminkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dengan kenyataan yang terjadi. Isu tersebut harus mengandung permasalahan yang jelas, kompleks, dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi sehingga membutuhkan solusi nyata.
3. **Kekhalayakan** berarti isu yang dipilih menyangkut kepentingan banyak orang atau berdampak luas terhadap masyarakat.



4. **Layak** : isu yang dipilih realistis, masuk akal, dan relevan untuk diselesaikan dengan mempertimbangkan kewenangan, kapasitas, serta sumber daya yang dimiliki.

Skala penilaian dimulai dari 1 (satu) dengan tingkat terendah dan 5 (lima) untuk tingkat yang paling tinggi. Isu dengan jumlah nilai tertinggi adalah isu yang menjadi prioritas utama untuk dipecahkan masalahnya (menjadi *core* isu). Tapisan isu melalui metode APKL dapat dilihat pada tabel berikut.

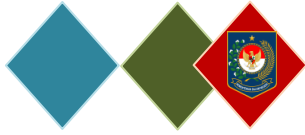
Tabel 3. 1 Penetapan Core Isu dengan Analisis APKL

No	Identifikasi Isu	Penilaian Isu				Jumlah	Peringkat
		A	P	K	L		
1	Minimnya informasi spasial kejadian bencana di Kabupaten Kerinci	5	5	5	5	20	1
2	Minimnya penyebaran konten edukatif melalui sosial media sebagai perwujudan komunikasi, informasi dan edukasi	4	4	5	5	18	3
3	Belum tersedianya pengarsipan laporan kejadian bencana secara digital yang terakses secara publik	5	4	5	5	19	2

Keterangan Skor:

Skor 5 : Sangat aktual/problematik/kekhalayakan/layak

Skor 4 : Aktual/problematik/kekhalayakan/layak



Skor 3 : Cukup aktual/problematik/kekhayakan/layak

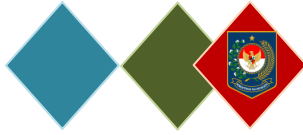
Skor 2 : Kurang aktual/problematik/kekhayakan/layak

Skor 1 : Tidak aktual/problematik/kekhayakan/layak

Berdasarkan hasil skoring tapisan isu-isu yang telah diidentifikasi menggunakan metode APKL, didapatkan *core* isu dengan skor tertinggi yaitu **“Minimnya Informasi Spasial Kejadian Bencana di Kabupaten Kerinci”**. Setelah didapatkan *core* isu menggunakan metode APKL, selanjutnya dilakukan penapisan kembali menggunakan metode USG (*Urgency*, *Seriousness*, dan *Growth*) dengan mengidentifikasi penyebab *core* isu tersebut. Adapun maksud dari metode USG ini adalah sebagai berikut:

- a) *Urgency* (Urgensi) : Mendesak untuk dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti
- b) *Seriousness* (Keseriusan) : Seberapa serius isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan
- c) *Growth* (Perkembangan Isu) : Seberapa besar kemungkinan dampak buruknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya

Berikut merupakan tapisan penyebab *core* isu hasil APKL yang kemudian dilanjutkan melalui metode USG menggunakan skoring dengan rentang nilai 1-5.



Tabel 3. 2 Penetapan Penyebab Core Isu dengan Analisis USG

No	Penyebab Core Isu	Penilaian			Jumlah	Peringkat
		U	S	G		
1	Belum optimalnya pemanfaatan data kejadian bencana melalui pemetaan tematik sebaran kejadian bencana di Kabupaten Kerinci	5	5	5	15	1
2	Terbatasnya kapasitas SDM yang dapat menggunakan aplikasi GIS untuk pengolahan data spasial kebencanaan	4	4	4	12	3
3	Belum adanya pencatatan koordinat spesifik masing-masing desa yang terdampak bencana	5	4	5	14	2

Keterangan Skor:

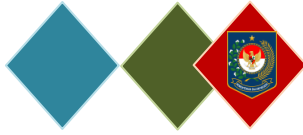
Skor 5 : Sangat mendesak/serius/berdampak buruk

Skor 4 : Mendesak/serius/berdampak buruk

Skor 3 : Cukup mendesak/serius/berdampak buruk

Skor 2 : Kurang mendesak/serius/berdampak buruk

Skor 1 : Tidak mendesak/serius/berdampak buruk



Tabel 3. 3 Deskripsi Kriteria *URGENCY*

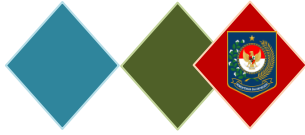
Nilai	Indikator	Deskripsi Indikator
5	Sangat Mendesak	Sangat mendesak dan harus ditindaklanjuti
4	Mendesak	Mendesak dan harus ditindaklanjuti
3	Cukup Mendesak	Cukup mendesak dan perlu ditindaklanjuti
2	Kurang Mendesak	Kurang mendesak dan kurang perlu ditindaklanjuti
1	Tidak Mendesak	Tidak mendesak dan tidak perlu ditindaklanjuti

Tabel 3. 4 Deskripsi Kriteria *SERIOUSNESS*

Nilai	Indikator	Deskripsi Indikator
5	Sangat	Sangat serius untuk dibahas
4	Serius	Serius untuk dibahas
3	Cukup	Cukup serius untuk dibahas
2	Kurang	Kurang serius untuk dibahas
1	Tidak	Tidak serius untuk dibahas

Tabel 3. 5 Deskripsi Kriteria *GROWTH*

Nilai	Indikator	Deskripsi Indikator
5	Sangat Cepat Memburuk	Sangat memburuk apabila tidak ditangani
4	Cepat Memburuk	Memburuk apabila tidak ditangani.
3	Cukup Cepat Memburuk	Cukup memburuk apabila tidak ditangani.
2	Kurang Cepat Memburuk	Kurang memburuk apabila tidak ditangani.

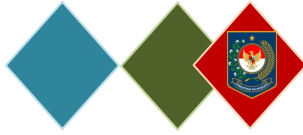


Nilai	Indikator	Deskripsi Indikator
1	Tidak Cepat Memburuk	Tidak memburuk apabila tidak ditangani.

Berdasarkan analisis USG di atas, dapat diketahui bahwa penyebab dari isu **“Minimnya Informasi Spasial Kejadian Bencana di Kabupaten Kerinci”** adalah **“Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Kejadian Bencana melalui Pemetaan Tematik Sebaran Kejadian Bencana Di Kabupaten Kerinci”**.

C. Rumusan Isu

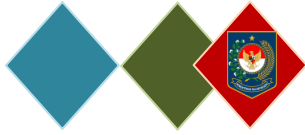
Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi yang terjadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci, ditemukan bahwa informasi spasial kejadian bencana di Kabupaten Kerinci masih minim. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan data kejadian bencana melalui kegiatan pemetaan tematik sebaran kejadian bencana di Kabupaten Kerinci. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya pemahaman masyarakat serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, juga berdampak terhadap ketidaktepatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana. Maka, rumusan isu dalam upaya penyelesaian core isu ini adalah **“Bagaimana memanfaatkan data kejadian bencana menjadi informasi spasial sebaran kejadian bencana di Kabupaten Kerinci?”**



D. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu

Merujuk pada penyebab dari isu tersebut, maka gagasan kreatif yang dilakukan untuk menyelesaikan *core* isu adalah **“Optimalisasi Pemanfaatan Data Sebaran Kejadian Bencana melalui Pemetaan Tematik menggunakan *Geographic Information System* (GIS) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci”**. Gagasan kreatif ini sebagai perwujudan Manajemen ASN dalam tata kelola pelayanan publik di bidang kebencanaan. Selain itu, melalui gagasan kreatif ini juga merupakan bentuk perwujudan penguasaan digital skill pada konsep *Smart* ASN. Untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama masa habituasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Plt. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan selaku mentor pelaksanaan aktualisasi;
2. Melakukan pengumpulan komponen kebutuhan pembuatan Peta Sebaran Kejadian Bencana;
3. Mengolah data ke dalam bentuk peta menggunakan ArcGIS 10.3;
4. Menyebarluaskan Peta Sebaran Kejadian Bencana melalui sosial media BPBD Kabupaten Kerinci;
5. Melakukan evaluasi terkait pelaksanaan aktualisasi



BAB IV

CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Bab ini menyajikan hasil capaian pelaksanaan aktualisasi secara menyeluruh yang telah dilaksanakan selama periode aktualisasi. Capaian pelaksanaan aktualisasi diuraikan ke dalam beberapa aspek meliputi matriks jadwal kegiatan aktualisasi yang menunjukkan timeline dan ketepatan waktu pelaksanaan setiap kegiatan, matriks pelaksanaan aktualisasi yang mendeskripsikan implementasi nilai-nilai dasar ASN dalam setiap tahapan kegiatan, matriks rekapitulasi realisasi habituasi, capaian penyelesaian *core* isu sebagai indikator keberhasilan dalam mengatasi permasalahan yang diangkat, manfaat yang diperoleh dari terselesaikannya *core* isu serta rencana tindak lanjut setelah mengikuti Latsar CPNS di tempat kerja untuk menindaklanjuti hasil aktualisasi.

A. Matriks Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Kegiatan aktualisasi yang dilakukan penulis selama masa habituasi berpedoman pada rencana jadwal kegiatan yang penulis ajukan dan disetujui pada saat rancangan aktualisasi. Kegiatan aktualiasi dimulai dari koordinasi dengan mentor, pengumpulan kebutuhan data, pengolahan data, penyebarluasan hasil, hingga evaluasi kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara sistematis dan terukur, serta sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.



Tabel 4. 1 Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	September				Oktober		Keterangan
		I	II	III	IV	I	II	
1	Melakukan koordinasi dengan mentor pelaksanaan aktualisasi		10 - 12 Sept 2025					Realisasi sesuai dengan rencana
			10 - 12 Sept 2025					
2	Melakukan pengumpulan komponen kebutuhan pembuatan Peta Sebaran Kejadian Bencana			15 - 19 Sept 2025				Realisasi sesuai dengan rencana
				15 - 19 Sept 2025				
3	Mengolah data ke dalam bentuk peta menggunakan ArcGIS 10.3				22 - 26 Sept 2025			Realisasi sesuai dengan rencana
					22 - 26 Sept 2025			
4	Menyebarkan Peta Sebaran Kejadian Bencana melalui sosial media BPBD Kabupaten Kerinci					29 Sept - 03 Okt 2025		Terjadi penambahan hari dimana rencana hanya 5 hari ketika direalisasikan dan dipertimbangkan menjadi 6 hari. Dalam kegiatan ini tahapan publikasi peta ke sosial media direncanakan untuk dipublikasi hari Jumat namun direalisasikan pada
						29 Sept - 04 Okt 2025		



No	Kegiatan	September				Oktober		Keterangan
		I	II	III	IV	I	II	
								hari sabtu dengan pertimbangan jangkauan audiens akan lebih banyak saat <i>weekend</i>
5	Melakukan evaluasi terkait pelaksanaan aktualisasi						6 – 10 Okt 2025	Terjadi penambahan hari untuk kegiatan ini karena pembuatan laporan aktualisasi hingga mendapat persetujuan mentor membutuhkan waktu lebih karena saat penyampaian laporan hasil aktualisasi kepada mentor yang dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2025 draf masih perlu difinalisasi karena terdapat yang belum selesai dan masih terdapat beberapa kesalahan penulisan
							6 – 14 Okt 2025	

Keterangan:

Rencana
 Realisasi

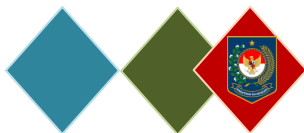


B. Matriks Pelaksanaan Aktualisasi

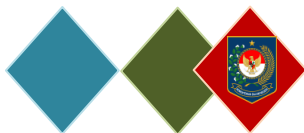
Unit Kerja	: Analis Kebencanaan Ahli Pertama – Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Kabupaten Kerinci
Identifikasi Isu	: 1. Minimnya informasi spasial kejadian bencana di Kabupaten Kerinci 2. Minimnya penyebaran konten edukatif melalui sosial media sebagai perwujudan komunikasi, informasi dan edukasi 3. Belum tersedianya pengarsipan laporan kejadian bencana secara digital yang terakses secara publik
Isu yang Diangkat	: Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Kejadian Bencana melalui Pemetaan Tematik Sebaran Kejadian Bencana Di Kabupaten Kerinci
Gagasan Pemecah Isu	: Optimalisasi Pemanfaatan Data Sebaran Kejadian Bencana melalui Pemetaan Tematik menggunakan <i>Geographic Information System</i> (GIS) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci

Tabel 4. 2 Matriks Pelaksanaan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/ Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Melakukan koordinasi dengan mentor pelaksanaan aktualisasi.	1. Membuat Surat Telaah Staff kepada mentor	Tersedianya Draf surat telaah staff	Akuntabel : Saya telah bertanggungjawab menyusun surat telaah staff untuk menyampaikan pelaksanaan rancangan aktualisasi	Mentor	Tidak	Tidak	-



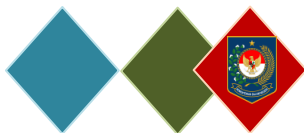
No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/ Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2. Melaksanakan konsultasi	Tersedianya Catatan hasil konsultasi (notulen/ Foto)	Harmonis: Saya telah menerima saran dari mentor dengan sikap terbuka. Kolaboratif: Saya telah membangun kerja sama yang baik dengan mentor demi kelancaran aktualisasi. Adaptif : Saya telah fleksibel dan tidak memaksakan keadaan untuk melakukan konsultasi dengan mentor sehingga konsultasi dilaksanakan menyesuaikan dengan jadwal mentor ketika tidak sibuk				
		3. Mengajukan surat telaah staff kepada Kepala Mentor	Tersedianya surat telaah staff dibubuhkan tanda tangan oleh mentor Hasil: Persetujuan Mentor atas pelaksanaan gagasan aktualisasi	Akuntabel: Saya telah memastikan surat telaah staff yang saya susun dapat dipertanggungjawabkan, sehingga layak untuk mendapatkan persetujuan dari mentor.				
2	Melakukan pengumpulan komponen kebutuhan pembuatan Peta Sebaran Kejadian Bencana	1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data spasial dan non spasial yang dibutuhkan	Tersedianya file data spasial dan non-spasial	Kompeten: Saya telah mengidentifikasi dan mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan secara teliti. Akuntabel: Saya telah memastikan data yang dikumpulkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan	Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci, Mentor, dan Pusdalops BPBD Kabupaten Kerinci	Tidak	Tidak	-



No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/ Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2. Mengklasifikasi data sesuai jenisnya	Tersedianya hasil pengklasifikasian data	Kompeten: Saya telah mengklasifikasikan data secara sistematis sehingga mudah diolah				
		3. Melakukan konsultasi terkait data spasial dan non spasial yang telah diklasifikasi kepada mentor	Tersedianya Catatan hasil konsultasi (notulen/ Foto) Hasil : SHP wilayah dan <i>Excel</i> klasifikasi data sebaran kejadian bencana	Harmonis: Saya telah menerima masukan dari mentor dengan sikap terbuka. Kolaboratif: Saya telah menjalin komunikasi yang baik dengan mentor agar dapat menghasilkan bahan data yang valid dan sesuai kebutuhan untuk pembuatan peta.				
3	Mengolah data ke dalam bentuk peta menggunakan ArcGIS 10.3	1. Menginput data SHP administratif ke <i>software</i> ArcGIS	Tersedianya <i>database</i> batas administrasi wilayah di ArcGIS	Kompeten: Saya telah menguasai penggunaan perangkat lunak ArcGIS dalam penginputan data. Akuntabel: Saya telah memastikan setiap data yang diinput telah sesuai standar peta.	Mentor	Tidak	Tidak	-
		2. Mengolah data sebaran kejadian bencana di <i>attribute table</i> ArcGIS	Tersedianya basis data pada <i>attribute table</i> ArcGIS sebaran kejadian bencana	Akuntabel: Saya telah memastikan data sebaran kejadian bencana terolah dengan baik dan valid dalam bentuk basis data Kompeten: Saya telah menguasai penggunaan perangkat lunak ArcGIS dalam pengolahan data menggunakan <i>attribute table</i> ArcGIS				



No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/ Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		3. Membuat layer peta sebaran kejadian bencana dan mengonsultasikan kepada mentor	Tersedianya draft peta tematik sebaran kejadian bencana yang telah disetujui mentor Hasil: Peta Sebaran Kejadian Bencana Kabupaten Kerinci Tahun 2024	Loyal : Saya telah berdedikasi penuh dan bersungguh-sungguh dalam menampilkan data ke dalam bentuk layer peta sehingga tercipta visualisasi data melalui peta tematik yang baik Kompeten: Saya telah memaksimalkan kemampuan penggunaan ArcGIS dalam pembuatan peta hingga terselesaikan output yang diharapkan dan sesuai kaidah kartografi. Harmonis: Saya telah menerima saran perbaikan Peta Sebaran Kejadian Bencana dari mentor.				



No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/ Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Menyebarluaskan Peta Sebaran Kejadian Bencana melalui sosial media BPBD Kabupaten Kerinci	1. Menentukan dan mendesain media publikasi	Tersedianya draft dan desain konten publikasi	Adaptif : Saya telah memilih media publikasi yang tepat agar audiens yang terjangkau lebih luas terutama untuk masyarakat Kabupaten Kerinci serta akan menyesuaikan desain publikasi menarik dan sesuai tren media sosial. Kompeten: Saya telah menyusun konten publikasi yang informatif dan mudah dipahami.	Mentor	Tidak	Tidak	-
		2. Melakukan konsultasi kepada mentor terkait media publikasi yang tepat dan desain publikasi yang disetujui mentor	Tersedianya catatan hasil konsultasi (notulen/foto)	Harmonis: Saya telah menerima saran dari mentor dengan sikap terbuka. Kolaboratif: Saya telah membangun kerja sama yang baik dengan mentor demi menghasilkan konten publikasi peta sebaran kejadian bencana di sosial media yang baik.				
		3. Mengunggah peta sebaran kejadian bencana ke sosial media	Tersedianya unggahan di media sosial Hasil : Postingan Peta Sebaran Kejadian Bencana di Media Sosial	Berorientasi Pelayanan: saya telah menyebarkan peta sebaran kejadian bencana agar masyarakat dapat memperoleh informasi kebencanaan yang tergambar secara spasial				



No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/ Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik YA/TIDAK	Solusi Konflik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Melakukan evaluasi terkait pelaksanaan aktualisasi	1. Membuat laporan implementasi pembuatan peta sebaran kejadian bencana Kabupaten Kerinci 2. Membuat laporan aktualisasi 3. Menyampaikan laporan hasil aktualisasi kepada mentor	Tersedianya laporan implementasi pembuatan peta sebaran kejadian bencana Kabupaten Kerinci Tersedianya laporan aktualisasi Tersedianya laporan hasil aktualisasi yang sudah mendapat persetujuan mentor Hasil: Laporan Aktualisasi	Akuntabel: Saya telah menyusun laporan implementasi dengan penuh tanggung jawab dan sesuai data yang valid. Kompeten: Saya telah memanfaatkan kemampuan teknis untuk menyusun laporan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Akuntabel: Saya telah menyusun laporan aktualisasi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan aktualisasi yang telah saya kerjakan selama masa habituasi. Kompeten: Saya telah memastikan bahwa laporan aktualisasi tersusun sesuai dengan pedoman Akuntabel: Saya telah bertanggung jawab penuh terhadap hasil aktualisasi yang saya sampaikan. Harmonis: Saya telah membangun komunikasi yang baik dengan mentor untuk mendapatkan masukan.	Mentor	Tidak	Tidak	-

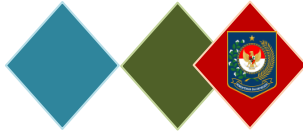


C. Matriks Rekapitulasi Realisasi Habituaasi Nilai-Nilai Dasar PNS (BerAKHLAK)

Matriks Rekapitulasi Realisasi Habituaasi berikut disusun untuk menggambarkan keterkaitan antara nilai nilai dasar BerAKHLAK dengan kegiatan habituaasi yang telah dilaksanakan. Matriks ini memuat jumlah aktualisasi pada setiap mata pelatihan, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan nilai-nilai dasar ASN dalam kegiatan aktualisasi.

Tabel 4. 3 Matriks Rekapitulasi Realisasi Habituaasi NDD PNS (BerAKHLAK)

No	Mata Pelatihan	Kegiatan										Jumlah Aktualisasi per MP	
		Ke-1		Ke-2		Ke-3		Ke-4		Ke-5			
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Berorientasi Pelayanan	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
2	Akuntabel	2	2	1	1	2	2	0	0	3	3	8	8
3	Kompeten	0	0	2	2	3	3	1	1	2	2	8	8
4	Harmonis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5
5	Loyal	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
6	Adaptif	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2
7	Kolaboratif	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	3	3
Jumlah MP yang Diaktualisasikan		4	5	5	5	7	7	5	5	6	6	27	28

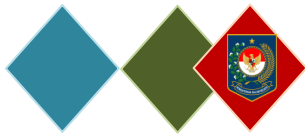


D. Capaian Penyelesaian Core Isu

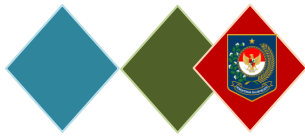
Capaian penyelesaian *core* isu menggambarkan perubahan sebelum dilaksanakannya aktualisasi dan sesudah aktualisasi terhadap *core* isu yang diangkat. Sebelum aktualisasi, BPBD Kabupaten Kerinci masih belum mengoptimalkan pengelolaan data sebaran kejadian bencana dan saat ini BPB masih minim memiliki informasi spasial kejadian bencana. Setelah dilaksanakan aktualisasi saat ini data mentah sebaran kejadian bencana sudah dilakukan pengolahan dan saat ini sudah tersedia informasi spasial berupa peta sebaran kejadian bencana yang komprehensif dan informatif. Adapun secara lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut kondisi *core* isu sebelum dan sesudah aktualisasi.

Tabel 4. 4 Capaian Penyelesaian Core Isu

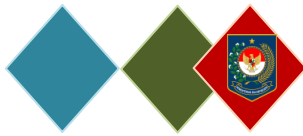
Kondisi Core Isu	
Sebelum Aktualisasi	Sesudah Aktualisasi
Sebelum dilaksanakannya aktualisasi, Kabupaten Kerinci yang merupakan daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi di Provinsi Jambi menghadapi permasalahan serius terkait minimnya informasi spasial kejadian bencana. Meskipun Kabupaten Kerinci menempati urutan ke-4 dengan indeks risiko bencana sebesar 143,41 pada	Setelah dilaksanakannya aktualisasi, kondisi pengelolaan informasi kebencanaan di BPBD Kabupaten Kerinci mengalami perubahan signifikan dengan tersedianya peta sebaran kejadian bencana yang komprehensif dan informatif. Data kejadian bencana yang sebelumnya hanya berbentuk tabulasi sederhana



Kondisi Core Isu	
Sebelum Aktualisasi	Sesudah Aktualisasi
tahun 2024 dan telah mengalami 55 kejadian bencana yang menyebabkan kerusakan 7.695 unit rumah, 54 fasilitas, 2 korban jiwa, dan 25.365 jiwa menderita, namun pengelolaan data kebencanaan masih belum optimal. BPBD Kabupaten Kerinci hanya melakukan perekaman data kejadian bencana bulanan dalam bentuk tabulasi sederhana menggunakan Microsoft Excel yang bersifat data mentah internal dan tidak dipublikasikan secara luas. Data tersebut belum disajikan dalam bentuk spasial sehingga informasi mengenai sebaran wilayah yang sering terdampak bencana, jumlah jiwa terdampak, dan tingkat kerusakan belum terpetakan secara visual dan sistematis. Kondisi ini diperparah dengan belum diperbaruinya	kini telah ditransformasi menjadi informasi spasial yang memvisualisasikan sebaran kejadian bencana di setiap kecamatan secara jelas dan sistematis. Peta sebaran kejadian bencana ini mampu menampilkan informasi detail mengenai lokasi kejadian bencana, frekuensi kejadian di tiap wilayah, jumlah jiwa terdampak, serta tingkat kerusakan yang terjadi sehingga memudahkan identifikasi wilayah-wilayah yang memerlukan prioritas penanganan. Keberadaan peta spasial ini tidak hanya bermanfaat bagi internal BPBD dalam perumusan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang lebih tepat sasaran, tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat luas sebagai media edukasi dan peningkatan



Kondisi Core Isu	
Sebelum Aktualisasi	Sesudah Aktualisasi
dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang seharusnya menjadi landasan perumusan strategi dan kebijakan penanggulangan bencana, sehingga masyarakat memiliki keterbatasan akses informasi kebencanaan. Minimnya visualisasi spasial ini mengakibatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana di wilayahnya masih rendah, proses mitigasi berbasis komunitas belum berjalan optimal, dan pengambilan kebijakan penanggulangan bencana belum tepat sasaran karena tidak dapat dengan mudah mengidentifikasi wilayah-wilayah prioritas yang memerlukan perhatian khusus. Hal ini pada akhirnya menghambat pemenuhan Standar Pelayanan	kesadaran akan risiko bencana di wilayahnya masing-masing. Dengan tersedianya informasi spasial melalui peta tematik sebaran kejadian bencana dalam format formal dan non formal yang jelas serta basis data sebaran kejadian bencana di arcGIS , proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, alokasi sumber daya dapat dilakukan secara lebih efisien ke wilayah-wilayah prioritas, dan mitigasi berbasis komunitas dapat dirancang dengan lebih efektif karena didukung oleh data yang valid dan mudah dipahami. Kondisi ini berkontribusi positif terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana dan memperkuat kapasitas daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Kerinci.



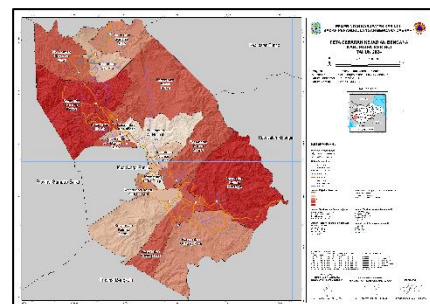
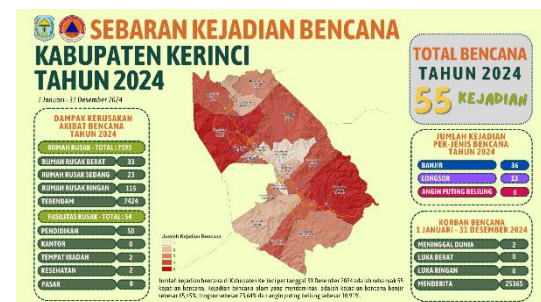
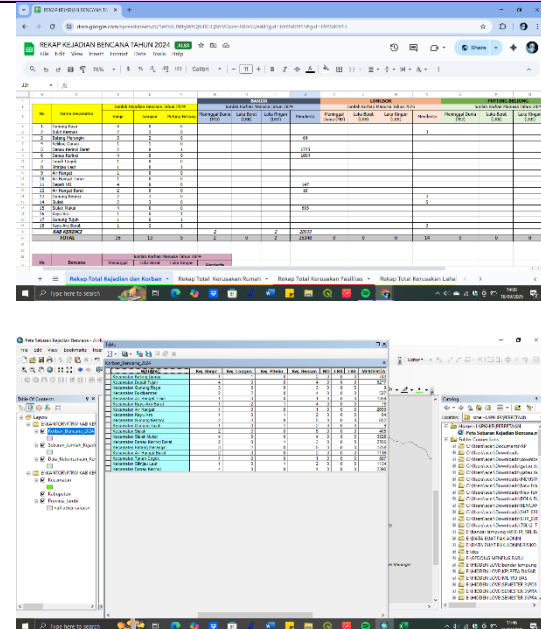
Kondisi Core Isu

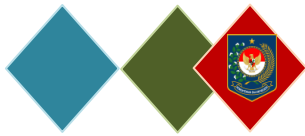
Sebelum Aktualisasi

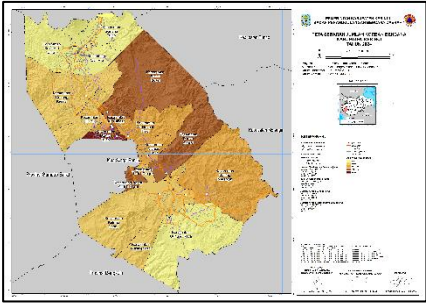
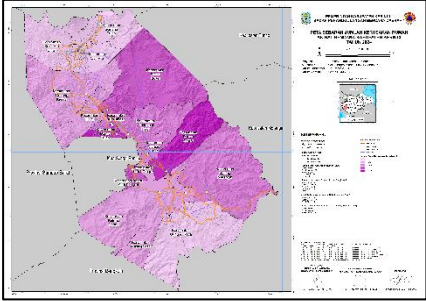
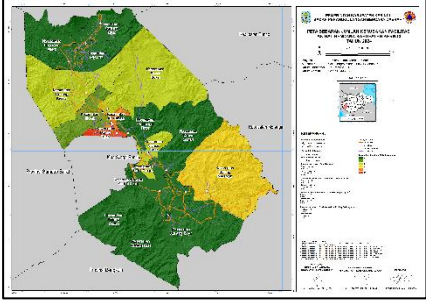
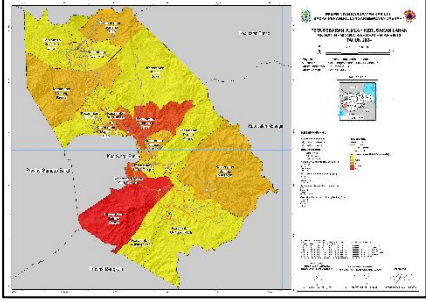
Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Kerinci.

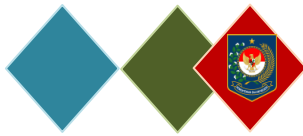
Data Kebencanaan di Excel Masih Bersifat Mentah dan Tidak Terpublikasi

Sesudah Aktualisasi



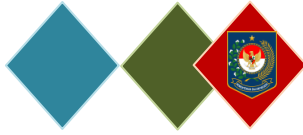


Kondisi Core Isu	
Sebelum Aktualisasi	Sesudah Aktualisasi
	   



Kondisi Core Isu	
Sebelum Aktualisasi	Sesudah Aktualisasi
	 10:03 Posts SCAN Here 1. Peta Sebaran Kejadian Bencana 2. Peta Sebaran Jumlah Korban Terdampak 3. Peta Sebaran Kerusakan Rumah 4. Peta Sebaran Kerusakan Fasilitas 5. Peta Sebaran Kerusakan Lahan Peta Sebaran Kejadian Bencana Tahun 2024 Liked by rahmimudhalifah and others kabkerinci Pengen tau wilayah mana di Kabupaten Kerinci yang pernah terjadi bencana dan dampaknya apa saja? Ayo scan barcodenya untuk mengakses peta sebaran kejadian bencana dan sebaran dampaknya #SalamTangguh #BPBDKerinci @shohibulazmirvial less 10:04 Posts About Reels Photos Bpbd Kab Kerinci is with Dedi Andrizal and 13 others Pengen tau wilayah mana di Kabupaten Kerinci yang pernah terjadi bencana dan dampaknya apa saja? Ayo scan barcodenya untuk mengakses peta sebaran kejadian bencana dan sebaran dampaknya #SalamTangguh #BPBDKerinci SCAN Here 1. Peta Sebaran Kejadian Bencana 2. Peta Sebaran Jumlah Korban Terdampak 3. Peta Sebaran Kerusakan Rumah 4. Peta Sebaran Kerusakan Fasilitas 5. Peta Sebaran Kerusakan Lahan Peta Sebaran Kejadian Bencana Tahun 2024





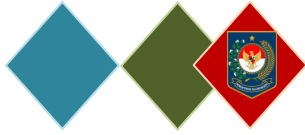
Kondisi Core Isu	
Sebelum Aktualisasi	Sesudah Aktualisasi
	• Data Kebencanaan sudah direkap perjenis kejadian bencana beserta dampaknya • Data Kebencanaan sudah diolah menjadi basis data di ArcGIS • Hasil olahan peta formal dan non formal sebaran kejadian bencana • Publikasi peta sebaran kejadian bencana

E. Manfaat terselesaikannya Core Isu

Terdapat beberapa manfaat yang dirasakan oleh beberapa pihak setelah diselesaikannya core isu melalui optimalisasi pemanfaatan data sebaran kejadian bencana melalui pemetaan tematik menggunakan *Geographic Information System (GIS)*, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Individu Peserta

1. Peserta mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK dalam peran dan kedudukan sebagai ASN di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci;
2. Meningkatkan kompetensi teknis dalam pengolahan data spasial kebencanaan yang dapat menjadi bekal dalam pelaksanaan tugas di masa mendatang;



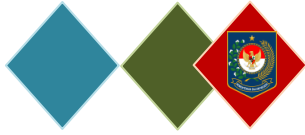
3. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya inovasi dan transformasi data dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

b) BPBD Kabupaten Kerinci

1. Memiliki sistem informasi spasial kebencanaan yang dapat digunakan sebagai basis data dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis penanggulangan bencana;
2. Meningkatkan ketepatan dalam identifikasi wilayah-wilayah yang memerlukan penanganan khusus berdasarkan frekuensi dan dampak kejadian bencana;
3. Mempermudah proses monitoring dan evaluasi program penanggulangan bencana dengan visualisasi data yang lebih komprehensif dan mudah dipahami;
4. Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas institusi melalui penyediaan data kebencanaan yang terstruktur, valid, dan dapat diakses publik;
5. Memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan data dan informasi kebencanaan sesuai dengan standar pelayanan minimal urusan bencana.

c) Pemerintah Kabupaten Kerinci

1. Mendukung Misi ke-4 Kabupaten Kerinci yaitu Meningkatkan Infrastruktur Kewilayahan dan Ketahanan Bencana;



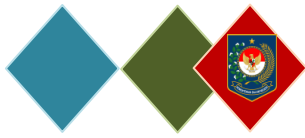
2. Mendukung pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang lebih responsif terhadap risiko bencana dengan mempertimbangkan data sebaran kejadian bencana di setiap wilayah;
3. Mendukung aspek pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, RKPD, dan dokumen tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah.

d) Masyarakat

1. Memperoleh akses informasi kebencanaan yang akurat
2. Masyarakat memahami kondisi kebencanaan di lingkungan mereka tinggal sehingga memperbesar potensi masyarakat untuk mengimplementasikan kesiapsiagaan bencana sehingga dampak kerugian akibat bencana dapat dikurangi secara tidak langsung

e) Mitra Kebencanaan

1. Memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan BPBD dalam penyusunan program penanggulangan bencana berbasis data;
2. Memperoleh akses informasi kebencanaan yang akurat untuk mendukung perencanaan program mitigasi dan kesiapsiagaan berbasis komunitas.

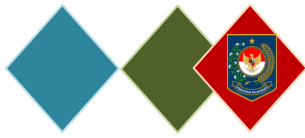


F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

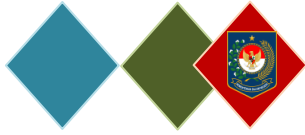
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan peserta setelah mengikuti Latsar CPNS di BPBD Kabupaten Kerinci untuk menindaklanjuti hasil aktualisasi, dengan matrik sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

No	Kegiatan	Output	Durasi dan Waktu	Parapihak Terlibat	Sumber Biaya	Keterangan
1	Menginput data sebaran kejadian bencana ke attribute table di ArcGIS	<i>Database</i> dan SHP Sebaran Kejadian Bencana	Tiap 1 Tahun	Individu peserta, Plt Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Staf Pusdalops BPBD Kabupaten Kerinci	Tidak Ada	Peta Sebaran Kejadian Bencana tiap Tahun terhitung dari tanggal 1 Januari – 31 Desember yang juga terakumulasi jumlah kejadian bencana, jumlah korban, dan jumlah kerusakan
2	Membuat peta sebaran kejadian bencana format formal dan non formal	Peta Sebaran Kejadian Bencana format formal dan non formal	Tiap 1 Tahun	Individu peserta dan Plt Kepala Bidang Pencegahan	Tidak Ada	



No	Kegiatan	Output	Durasi dan Waktu	Parapihak Terlibat	Sumber Biaya	Keterangan
3	Mempublikasikan peta sebaran kejadian bencana di sosial media	Postingan peta Sebaran Kejadian Bencana di sosial media	Tiap 1 Tahun	Individu peserta dan Plt Kepala Bidang Pencegahan	Tidak Ada	



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

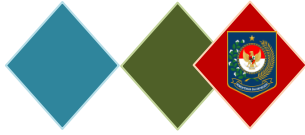
A. Kesimpulan

Pelaksanaan aktualisasi sejatinya menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK di seluruh tahapan kegiatannya. Kegiatan yang telah dilakukan juga merupakan bentuk gagasan kreatif untuk menyelesaikan core isu. Maka kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan berjudul **"Optimalisasi Pemanfaatan Data Sebaran Kejadian Bencana melalui Pemetaan Tematik Menggunakan Geographic Information System (GIS) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kerinci"** dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aktualisasi/Habituasi Mata Pelatihan

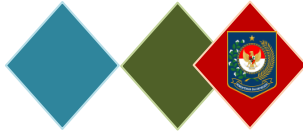
a) Melakukan koordinasi dengan mentor pelaksanaan aktualisasi :

Pada tahap awal pelaksanaan aktualisasi, saya awali dengan menyusun surat telaah staf yang ditujukan kepada mentor. Dalam tahap ini, saya menerapkan nilai **Akuntabel** dengan memastikan setiap kalimat yang saya tulis dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar mencerminkan kebutuhan serta persoalan yang ada di BPBD. Saya menyusun surat tersebut secara sistematis sesuai format yang telah dicontohkan, berdasarkan data dan informasi yang sebenar-benarnya. Setelah draft tersusun, saya melakukan konsultasi dengan mentor dengan menerapkan nilai **Harmonis** melalui sikap



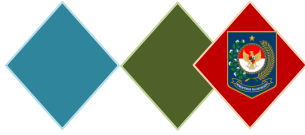
sopan dan menghargai setiap masukan yang diberikan. Dalam proses diskusi, nilai **Kolaboratif** juga terbangun ketika kami saling bertukar pandangan untuk menemukan solusi terbaik. Saya juga menunjukkan sikap **Adaptif** dengan menyesuaikan jadwal konsultasi di tengah kesibukan mentor, tetap fleksibel namun menjaga komitmen agar kegiatan dapat terlaksana. Selanjutnya adalah mengajukan surat telaah staf yang telah direvisi sesuai masukan mentor. Saya kembali menegakkan nilai **Akuntabel** dengan menindaklanjuti setiap saran secara sungguh-sungguh, memastikan surat tersebut matang dan layak diajukan sebagai bentuk nyata dari tanggung jawab saya dalam melaksanakan tugas dengan benar..

- b) **Melakukan pengumpulan komponen kebutuhan pembuatan Peta Sebaran Kejadian Bencana:** Kegiatan ke-dua dilakukan dengan mengidentifikasi data yang diperlukan, yaitu data spasial berupa SHP Peta Dasar dari RTRW dan data non spasial berupa data historis kejadian bencana dari BPBD. Dalam tahap ini, saya menerapkan nilai **Kompeten** melalui analisis kebutuhan secara teliti dan nilai **Akuntabel** dengan memastikan validitas data serta mengorganisir data secara sistematis agar dapat dipertanggungjawabkan. Setelah data terkumpul, saya melakukan pengklasifikasian data-data tersebut dengan menerapkan nilai **Kompeten**. Data non spasial saya klasifikasikan berdasarkan parameter terstruktur menggunakan *spreadsheet*, sedangkan data spasial saya kelompokkan sesuai



kebutuhan peta. Tahap selanjutnya adalah konsultasi dengan mentor, di mana saya menerapkan nilai **Harmonis** dengan menerima masukan untuk hanya memasukkan bencana alam seperti Banjir, Longsor, dan Puting Beliung. Nilai **Kolaboratif** juga terbangun melalui diskusi transparan yang menghasilkan sinergi, sehingga saya dapat langsung merevisi *spreadsheet* sesuai arahan untuk menghasilkan data yang valid.

- c) **Mengolah data ke dalam bentuk peta menggunakan ArcGIS:** Saya memulai kegiatan dengan menginput *shapefile* wilayah administratif Kabupaten Kerinci ke dalam ArcGIS. Saya melakukan import data, pengaturan koordinat, dan penambahan hillshade sebagai perwujudan nilai **Kompeten** di bidang yang telah saya kuasai. Selanjutnya saya memasukkan semua elemen peta sesuai standar kartografi dan menyimpannya dalam format *Map Package* (MPK) sebagai database resmi BPBD sebagai perwujudan nilai **Akuntabel**. Kemudian yang saya lakukan adalah melakukan pengolahan data sebaran kejadian bencana di *attribute table* ArcGIS, menginput data secara teliti mencakup jumlah kejadian, korban, dan kerusakan untuk menghasilkan lima SHP terpisah yang valid dan mudah digunakan. Setelah itu, saya membuat layer peta sebaran kejadian bencana dan mengonsultasikannya dengan mentor. Saya menerima saran perbaikan tampilan dan penambahan jaringan jalan demi



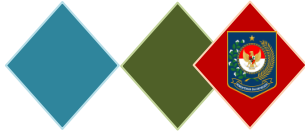
menghasilkan peta yang lebih informatif dan berkualitas sebagai perwujudan nilai kompeten.

d) **Menyebarkan Peta Sebaran Kejadian Bencana melalui sosial**

media BPBD Kabupaten Kerinci: Kegiatan ini saya awali dengan menentukan media publikasi yang sesuai karakteristik masyarakat dan menyesuaikan desain mengikuti tren terkini agar konten menarik. Dalam tahap ini, saya menerapkan nilai **Kompeten** dengan mengolah data kebencanaan menjadi informasi spasial yang informatif, sederhana namun akurat dengan desain visual yang mudah dipahami masyarakat umum. Selanjutnya, saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait strategi publikasi. Nilai **Harmonis** saya praktikkan dengan menerima masukan terkait perbaikan desain secara terbuka, dan nilai **Kolaboratif** terbangun melalui diskusi aktif untuk mengoptimalkan strategi penyampaian informasi. Selanjutnya saya mengunggah peta ke media sosial BPBD dengan menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan**. Saya menyadari bahwa informasi kebencanaan adalah hak masyarakat, sehingga saya menyajikan peta dengan caption informatif, hashtag relevan, dan waktu unggah strategis agar informasi dapat tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat.

e) **Melakukan evaluasi terkait pelaksanaan aktualisasi:** Kegiatan ini

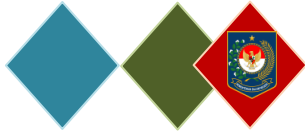
saya awali dengan menyusun laporan implementasi publikasi peta sebaran kejadian bencana yang mana dalam hal ini saya menerapkan



nilai **Akuntabel** dengan memastikan setiap informasi yang tercantum benar-benar mencerminkan kegiatan dan hasil yang telah dicapai berdasarkan data yang valid dan akurat. Kemudian saya menyusun laporan secara sistematis, runtut, dan mudah dipahami sesuai kaidah penulisan yang baik sebagai perwujudan nilai **Kompeten**. Saya menyusun laporan aktualisasi secara menyeluruh mulai dari perbaikan latar belakang, penginputan laporan mingguan, hingga penulisan kesimpulan dan rekomendasi. Saya memastikan laporan tersusun sesuai pedoman dan format yang telah ditetapkan. Setelah itu, saya menyampaikan laporan hasil aktualisasi kepada mentor untuk mendapatkan arahan dan persetujuan. Nilai **Akuntabel** saya terapkan dengan menyampaikan secara jujur progress pengerjaan dan bertanggung jawab menyelesaikan laporan sesuai arahan. Saya membangun komunikasi yang baik, mendengarkan masukan mentor secara seksama, dan menerima arahan secara positif untuk menghasilkan laporan aktualisasi yang sesuai standar sebagai perwujudan nilai **Harmonis**.

2. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu

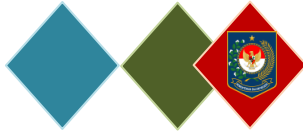
Gagasan kreatif yang telah dilakukan untuk menyelesaikan *core* isu minimnya informasi spasial kejadian bencana di Kabupaten Kerinci yang ditemukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci adalah melalui optimalisasi pemanfaatan data sebaran kejadian bencana melalui pemetaan tematik menggunakan



Geographic Information System (GIS) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci dengan output berupa Peta Sebaran Kejadian Bencana Tahun 2024 dalam format formal dan non formal kemudian dipublikasikan di sosial media *Instagram* dan *facebook* BPBD Kabupaten Kerinci.

3. Capaian Hasil Penyelesaian Core Isu

Setelah pelaksanaan seluruh kegiatan aktualisasi yang berjudul **“Optimalisasi Pemanfaatan Data Sebaran Kejadian Bencana Melalui Pemetaan Tematik Menggunakan Geographic Information System (GIS) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kerinci”** maka diperoleh informasi spasial yang jelas dan akurat dalam bentuk peta tematik sebaran kejadian bencana dan masyarakat dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah di sosial media BPBD. Selain itu, BPBD Kabupaten Kerinci juga menjadi lebih mudah untuk mengambil keputusan dalam penanggulangan bencana dengan berbasis data historis kejadian bencana yang sudah dituangkan dalam peta. Dari hal ini, maka penyelesaian core isu juga dapat dikatakan mendukung transformasi digital dan pengambilan keputusan berbasis informasi spasial dalam rangka penanggulangan bencana di lingkungan BPBD Kabupaten Kerinci.



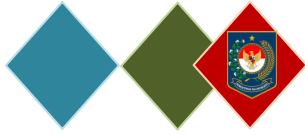
B. Rekomendasi

1. Untuk Penyelenggara Pelatihan

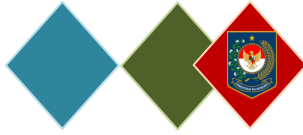
PPSDM Bukittinggi sudah memberikan pelayanan terbaik dalam menyelenggarakan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Proses pendampingan selama masa habituasi juga telah berjalan dengan baik melalui ketersediaan *coach* yang responsif dan peduli terhadap perkembangan peserta. Untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS, sebaiknya dilakukan evaluasi setiap minggu di *weekend* untuk menyampaikan kendala dan progress selama pelaksanaan kegiatan di masa habituasi.

2. Untuk Instansi Asal Peserta

BPBD Kabupaten Kerinci telah menunjukkan keterbukaan dan dukungan yang luar biasa dalam memfasilitasi proses aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS dengan menyediakan akses data kebencanaan serta memberikan bimbingan melalui mentor yang kompeten. Diharapkan BPBD dapat terus mendukung peserta latsar selama kegiatan aktualisasi melalui pembinaan dan juga pendampingan serta bentuk dukungan yang lain. Untuk konteks pemetaan tematik menggunakan data sebaran kejadian bencana, BPBD Kabupaten Kerinci direkomendasikan untuk melakukan pembuatan dan publikasi peta sebaran kejadian bencana secara rutin dan berkala, minimal satu kali dalam setahun berdasarkan data kejadian bencana periode 1 Januari hingga 31 Desember. Hal ini penting untuk



memastikan bahwa masyarakat selalu mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi kebencanaan di wilayahnya.



DAFTAR PUSTAKA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). *Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)*. InaRISK BNPB. Diakses pada 30 Agustus 2025, dari <https://inarisk.bnpb.go.id>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci. (2025). *Kabupaten Kerinci dalam Angka 2025*. Kerinci: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci

Lembaga Administasi Negara Republik Indonesia. (2021). *Modul Berorientasi Pelayanan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administasi Negara Republik Indonesia. (2021). *Modul Akuntabel*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administasi Negara Republik Indonesia. (2021). *Modul Kompeten*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administasi Negara Republik Indonesia. (2021). *Modul Harmonis*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administasi Negara Republik Indonesia. (2021). *Modul Loyal*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administasi Negara Republik Indonesia. (2021). *Modul Adaptif*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administasi Negara Republik Indonesia. (2021). *Modul Kolaboratif*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

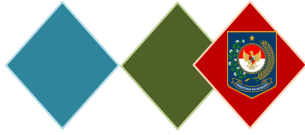
Lembaga Administasi Negara Republik Indonesia. (2021). *Modul Manajemen ASN*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administasi Negara Republik Indonesia. (2021). *Modul Smart ASN*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Peraturan Bupati Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci.

Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci.

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.



Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana.

Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Mingguan Minggu ke-1

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan 1	Koordinasi dengan mentor pelaksanaan aktualisasi
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	10-12 September 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/<i>Evidence</i>	1. Tersedianya draf surat telaah staf 2. Tersedianya catatan hasil dan dokumentasi konsultasi 3. Tersedianya surat telaah staff dibubuhkan tanda tangan oleh mentor
Uraian Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi a. Membuat surat telaah staf kepada mentor Dalam tahap awal, saya mulai dengan menyusun surat telaah staf yang ditujukan kepada mentor. Dalam tahapan ini tidak hanya sekedar menulis, tetapi juga memastikan bahwa isi dari surat tersebut benar-benar mencerminkan rencana pelaksanaan aktualisasi yang telah saya rancang sebelumnya. Di tahapan ini nilai Akuntabel saya terapkan, karena saya menyadari sepenuhnya bahwa setiap kalimat dalam surat telaah staf tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar adanya dituangkan	

sesuai dengan persoalan dan kebutuhan di lingkungan kerja BPBD. Oleh karena itu, saya berusaha menyusun dengan rapi sesuai format yang telah dicontohkan di aplikasi Srikandi, sistematis, dan berdasarkan data serta informasi yang sebenar-benarnya.

b. Melaksanakan konsultasi

Setelah menyusun draft surat telaah staf, saya melanjutkan kegiatan dengan melakukan konsultasi bersama mentor. Tahapan kegiatan ini saya jalani dengan penuh keterbukaan, di mana saya mempraktikkan nilai Harmonis dengan menunjukkan sikap sopan, menghargai pendapat, dan mendengarkan setiap masukan yang diberikan. Selain itu, nilai Kolaboratif juga terbangun dalam proses diskusi yang saya bangun bersama mentor. Kami saling bertukar pandangan dan mencoba mencari solusi terbaik agar pelaksanaan aktualisasi dapat berjalan lancar. Saya juga menyesuaikan diri dengan kondisi mentor, misalnya menyesuaikan jadwal konsultasi di sela kesibukan beliau. Hal ini mencerminkan nilai Adaptif Dimana saya berusaha fleksibel dan tidak memaksakan keadaan tetapi tetap menjaga komitmen agar kegiatan konsultasi bisa terlaksana.

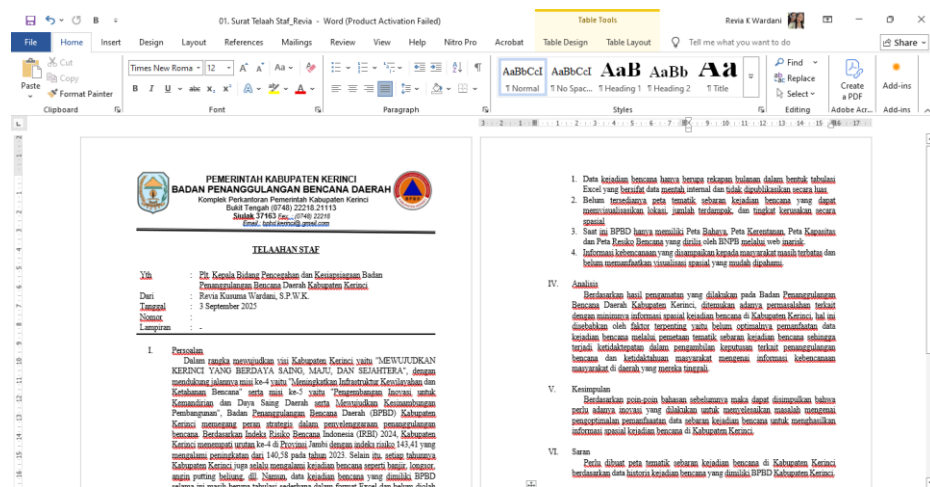
c. Mengajukan surat telaah staff kepada Mentor

Tahap berikutnya adalah mengajukan surat telaah staf yang telah disusun dan direvisi sesuai dengan masukan dari mentor. Dalam langkah ini, saya kembali menegakkan nilai Akuntabel. Saya

memastikan bahwa setiap saran yang diberikan telah saya tindaklanjuti dengan baik sehingga surat telaah staf menjadi lebih matang dan layak diajukan. Tanggung jawab ini saya jalankan dengan penuh kesungguhan karena saya menyadari bahwa surat ini bukan hanya sekedar dokumen melainkan juga bentuk nyata dari proses belajar dan pembuktian bahwa saya dapat melaksanakan tugas dengan benar. Dengan demikian, mentor dapat memberikan persetujuan dengan yakin bahwa surat yang saya ajukan telah sesuai dengan standar yang diharapkan..

2. Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence

- a. Membuat surat telaah staff sesuai dengan format untuk menyampaikan pelaksanaan rancangan aktualisasi dengan bukti fisik kegiatan berupa draf surat telaah staf yang disusun.



- b. Menemui mentor untuk melaksanakan konsultasi terkait surat telaah staf atas pelaksanaan rancangan aktualisasi yang telah disusun dengan bukti fisik berupa lembar laporan yang berisi catatan hasil konsultasi disertai dengan dokumentasi foto saat bertemu dengan mentor




PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kerinci
 Bukit Tengah (0746) 22218.21113
 Stukok 37163
 Email : bpd@kerinci@gmail.com

LAPORAN HASIL KONSULTASI

Peserta Latsar CPNS
 Nama : Revia Kusuma Wardani, S.P.W.K
 NIP : 20010924202552001
 Pangkat/Go : Penata Muda / IIIa
 Jabatan : Analis Kebencanaan Ahli Pertama

No	Tanggal	Hasil Konsultasi	Paraf Mentor
1	11 / 09 / 2025	- Perbaikan naskah di bagian persaman pada Surat Telaah Staf. Agar diambatkan juga terkait data IBSI untuk menggambarkan lokasi wilayah yang terkena sangat beresiko bencana sehingga mendukung pentingnya adanya informasi spasial	<i>[Signature]</i>

- c. Mengajukan surat telaah staff atas pelaksanaan rancangan aktualisasi kepada mentor secara langsung dengan bukti fisik berupa surat telaah staf yang dibubuhkan tanda tangan mentor.

 **PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kompeten Perekartian Pemerintah Kabupaten Kerinci
Buku Tergah: 07401 22218.211.13
Stafak 37163
Email: dptd.kerinci@gmail.com

TELAHAN STAF

Yth : Ptl. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiaptang Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci
Dari : Revis Kusuma Wardani, S.P.W.K.
Tanggal : 12 September 2025
Nomor : 800/ 01 /P/BDANO PK BPBD/2025
Lampiran : -

I. **Pendahuluan**
Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Kerinci yaitu "MENWUJUDKAN KERINCI YANG BERDAYA SANG, MAJU, DAN SEJAHTERA", dengan mendukung jalannya misi ke-4 yaitu "Memajukan Infrastruktur Kewilayahan dan Kemandirian Daerah" serta misi ke-5 yaitu "Pengembangan Inovasi untuk Kemajuan dan Daya Saing Daerah" serta Mewujudkan Ketahanan Pembangunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kerinci memegang peran strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2024, Kabupaten Kerinci menempati urutan ke-4 di Provinsi Jambi dengan Indeks Risiko 143,41 yang mengalami peningkatan dari 140,58 pada tahun 2023. Selain itu, setiap tahunnya Kabupaten Kerinci juga tidak terlepas dari kejadian bencana seperti banjir, longsor, angin puting beliung, dll. Namun, data kejadian bencana yang dimiliki BPBD selama ini masih berupa tabel sederhana dalam format Excel dan belum diubah menjadi informasi spasial yang dapat memberikan gambaran komprehensif tentang sebaran kejadian bencana di wilayah Kabupaten Kerinci.

II. **Pengantar**
Minimnya informasi spasial kejadian bencana Kabupaten Kerinci disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan data historis sebaran kejadian bencana melalui pemetaan tematik, terbatasnya kapasitas SDM yang dapat menggunakan aplikasi GIS untuk pengolahan data spasial bencana, serta belum adanya pemetaan koordinat spesifik masing-masing desa yang terdampak bencana.

III. **Fakta-fakta yang mempengaruhi**
Dari pengamatan yang dilakukan di lingkungan BPBD Kabupaten Kerinci, ditemukan beberapa hal yang mempengaruhi nilai-nilai informasi spasial kejadian bencana, yaitu:

1. Data kejadian bencana hanya berupa rekam bolakan dalam bentuk tabulasi Excel yang bersifat data mentah internal dan tidak dipublikasikan secara luas
2. Belum terdapatnya peta tematik sebaran kejadian bencana yang dapat memvisualisasikan lokasi, jumlah terdampak, dan tingkat kerusakan secara spasial
3. Saat ini BPBD hanya memiliki Peta Bahaya, Peta Kerentanan, Peta Kapasitas dan Peta Risiko Bencana yang dirilis oleh BNPB melalui web isitifik
4. Informasi kebencanaan yang disampaikan kepada masyarakat masih terbatas dan belum memfasilitasi visualisasi spasial yang mudah dipahami

IV. **Analisis**
Berdasarkan hasil pengantar yang dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci, digunakan adanya permasalahan terkait dengan minimnya informasi spasial kejadian bencana di Kabupaten Kerinci, hal ini disebabkan oleh faktor terpenting yaitu belum optimalnya pemanfaatan data kejadian bencana melalui pemetaan tematik sebaran kejadian bencana sehingga terjadi keterbatasan dalam pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana dan ketidaklulusan masyarakat mengenai informasi kebencanaan masyarakat di daerah yang mereka tinggal.

V. **Kesimpulan**
Berdasarkan poin-poin bahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya inovasi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah mengenai pengoptimalan pemanfaatan data sebaran kejadian bencana untuk menghasilkan informasi spasial kejadian bencana di Kabupaten Kerinci.

VI. **Saran**
Perlu dibuat peta tematik sebaran kejadian bencana di Kabupaten Kerinci berdasarkan data historis kejadian bencana yang dimiliki BPBD Kabupaten Kerinci.

Stafak, 12 September 2025

Ditandatangani
Ptl. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiaptang,

Pengirim


Supriyayanti, S.TuT., MM.
Pembina Tingkat I (TV/h)
NIP.19809302006042020


Revis Kusuma Wardani, S.P.W.K.
Pembina Muda (TII/a)
NIP.200109242025052001

3. Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan

- a. Membuat surat telaah staff untuk menyampaikan pelaksanaan rancangan aktualisasi

Tahapan pertama dilakukan pada tanggal 10 September 2025 dalam kegiatan 1 yaitu adalah membuat surat telaah staff untuk menyampaikan rancangan aktualisasi. Surat telaah staff yang disusun penulis menyesuaikan format dan berisi persoalan, praanggapan, fakta yang mempengaruhi, analisis, kesimpulan dan saran. Surat telaah staf ini sejatinya berisikan gagasan aktualisasi yang disusun penulis untuk direalisasikan selama masa habituasi pelatihan dasar CPNS. Saat penulis membuat surat telaah staf ini, penulis benar-benar menyesuaikan sebagaimana persoalan yang terjadi dan bagaimana fakta serta analisis berdasarkan pengalaman penulis selama bekerja di Badan Penanggulangan Bencana sebagai bentuk tanggung jawab penuh penulis dalam perancangan aktualisasi yang akan direalisasikan penulis selama masa habituasi. Hasil/output dari tahapan kegiatan ini adalah Draf surat telaah staf yang nantinya akan dikonsultasikan dan kemudian akan dibubuhi tanda tangan mentor apabila telah disetujui.

- b. Melaksanakan konsultasi

Setelah menyusun draf surat telaah staf pada tahapan kegiatan sebelumnya, selanjutnya penulis melaksanakan konsultasi dengan

mentor. Sebelum melaksanakan konsultasi, peserta telah membuat janji pada tanggal 10 September 2025 untuk melakukan konsultasi pada tanggal 11 September 2025. Saat melaksanakan konsultasi, penulis membawa lembar format laporan konsultasi yang sudah disiapkan terlebih dahulu dan draf surat telaah staf yang sebelumnya sudah penulis susun. Saat melaksanakan konsultasi, penulis menunjukkan surat telaah staf yang sudah dibuat dan berkonsultasi terkait rencana pelaksanaan aktualisasi yang akan dilakukan. Dalam tahapan ini mentor memberikan koreksi terkait draf surat telaah staf yang telah disusun penulis dan memberikan masukan terkait pelaksanaan gagasan aktualisasi penulis. Penulis menerima masukan dari mentor demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan gagasan aktualisasi. Hasil/output dari tahapan kegiatan ini adalah laporan yang berisi catatan hasil konsultasi disertai dengan dokumentasi foto saat berkonsultasi dengan mentor.

c. Mengajukan surat telaah staff kepada Mentor

Tahapan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 12 September 2025. Tahapan ini dilakukan setelah penulis melakukan revisi atas hasil konsultasi bersama mentor di hari sebelumnya karena terdapat beberapa masukan yang perlu diakomodir di surat telaah staf. Setelahnya, penulis baru mengajukan surat telaah staf yang

telah direvisi kepada mentor untuk mendapatkan tandatangan sebagai bentuk persetujuan mentor atas pelaksanaan gagasan aktualisasi. Hasil/output dari tahapan kegiatan ini adalah surat telaah staf yang dibubuhkan tanda tangan mentor.

4. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tugas organisasi

Kegiatan ini mendukung Misi ke-5 Kabupaten Kerinci yaitu Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Berkualitas dan Pelayanan Publik Adaptif serta Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan karena kegiatan ini memastikan adanya proses telaah dan persetujuan yang sistematis, sehingga menghasilkan tata kelola administrasi pemerintahan yang lebih tertib, efektif, dan berkualitas.

5. Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS

a. Dampak terhadap satuan kerja

Jika koordinasi dengan mentor pelaksanaan aktualisasi tidak dilaksanakan dan tidak berdasarkan nilai dasar BerAKHLAK, maka dapat menyebabkan miskomunikasi dalam merealisasikan rancangan kegiatan aktualisasi. Selain itu, hal ini juga dapat menyebabkan proses pembinaan mentor tidak berjalan lancar sehingga berpotensi menyebabkan pelaksanaan aktualisasi tidak

menyesuaikan kebutuhan BPBD serta memperlemah budaya kerja yang akuntabel dan kolaboratif di lingkungan kerja BPBD.

b. Dampak terhadap masyarakat

Jika kegiatan ini tidak dilaksanakan dan tidak berdasar atas nilai dasar BerAKHLAK maka rencana kegiatan aktualisasi tidak dapat berjalan dengan maksimal karena tidak adanya persetujuan dari mentor yang berdampak terhadap masyarakat tidak akan mendapatkan informasi spasial sebaran kejadian bencana yang tepat dan sesuai kebutuhan di Kabupaten Kerinci karena sejatinya pada kegiatan ini semua rancangan aktualisasi akan didiskusikan agar kebermanfaatan pembuatan peta tematik sebaran kejadian bencana di Kabupaten Kerinci dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga meminimalisir dampak yang terjadi di kemudian hari jika terjadi bencana.

b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta		: Revia Kusuma Wardani, S.P.W.K.		
Satuan Kerja		: BPBD Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		: BPBD Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil capaian/ Output	Paraf Mentor
1	11 September 2025	1. Perbaikan narasi di Surat Telaah Staf pada bagian persoalan 2. Lanjutkan sesuai jadwal yang telah dirancang	Catatan hasil konsultasi	
2	12 September 2025	Pengajuan surat telaah staf	Surat telaah staf yang sudah ditandatangani	

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta		: Revia Kusuma Wardani, S.P.W.K.		
Satuan Kerja		: BPBD Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		: BPBD Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil capaian/ Output	Paraf Mentor
1				
2				

Lampiran 2. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-2

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan 2	Melakukan pengumpulan komponen kebutuhan pembuatan Peta Sebaran Kejadian Bencana
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	15-19 September 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/<i>Evidence</i>	1. Tersedianya file data spasial dan non-spasial 2. Tersedianya dokumentasi dan hasil pengklasifikasian data 3. Tersedianya catatan dan dokumentasi hasil konsultasi
Uraian Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi a. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data spasial dan non spasial yang dibutuhkan Dalam tahapan kegiatan ini saya memulai dengan melakukan identifikasi data-data yang diperlukan untuk pembuatan Peta Sebaran Kejadian Bencana Kabupaten Kerinci. Proses ini tidak hanya sekedar mencari data tetapi juga memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan	

dapat mendukung tujuan pembuatan peta. Di tahapan ini nilai Kompeten saya terapkan dengan melakukan analisis kebutuhan secara teliti, mengidentifikasi bahwa diperlukan data spasial berupa SHP Peta Dasar dan data non spasial berupa data historis kejadian bencana. Saya menggunakan pengetahuan teknis yang dimiliki untuk menentukan sumber data yang tepat, yaitu data spasial dari RTRW Kabupaten Kerinci yang dimiliki Bappeda Litbang dan data non spasial dari BPBD. Selain itu, nilai Akuntabel juga saya praktikkan dengan memastikan bahwa setiap data yang dikumpulkan memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya melakukan verifikasi sumber data dan memastikan data berasal dari instansi yang berwenang. Tanggung jawab ini saya jalankan dengan mengorganisir data secara sistematis dalam folder digital untuk memudahkan akses dan *backup*, serta mendokumentasikan proses pengumpulan agar dapat dipertanggungjawabkan.

b. Mengklasifikasikan data sesuai jenisnya

Setelah berhasil mengumpulkan data yang dibutuhkan, saya melanjutkan kegiatan dengan melakukan pengklasifikasian data sesuai dengan jenisnya. Tahapan kegiatan ini saya menerapkan nilai Kompeten yaitu dengan mengklasifikasikan data non spasial berdasarkan parameter yang terstruktur seperti jumlah kejadian per

kecamatan per jenis bencana, kerusakan rumah, fasilitas, dan lahan, serta membuat rekapitulasi menyeluruh menggunakan spreadsheet. Untuk data spasial, saya mengelompokkan SHP berdasarkan kebutuhan, yaitu mengambil SHP Administratif Kabupaten, SHP Kecamatan, dan SHP Toponimi dari Peta Dasar yang tersedia. Proses klasifikasi ini saya lakukan dengan teliti untuk memastikan bahwa struktur data yang dihasilkan mudah diolah.

- c. Melakukan konsultasi terkait data spasial dan non spasial yang telah diklasifikasi kepada mentor

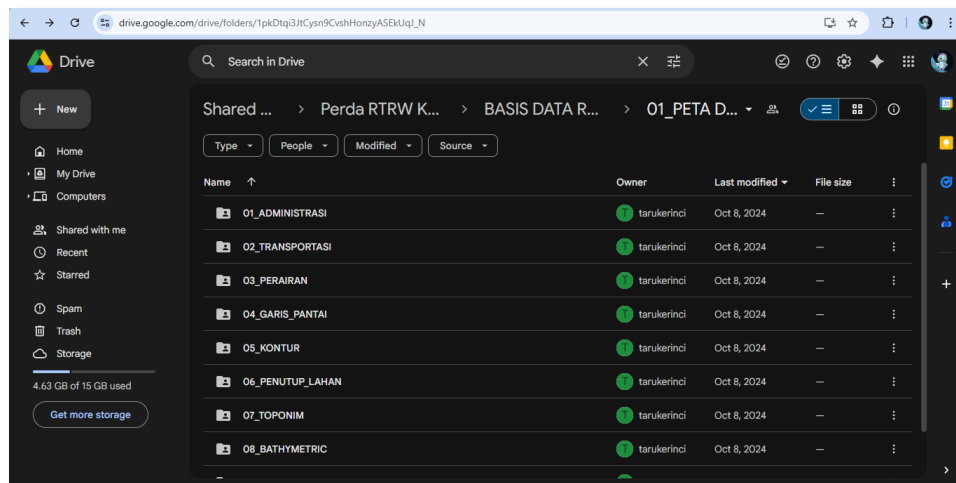
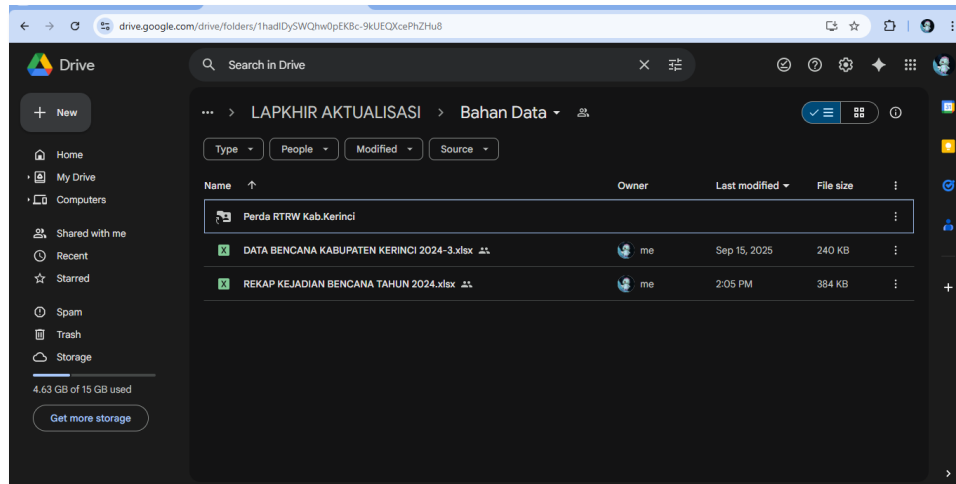
Tahap berikutnya adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait data yang telah diklasifikasi. Dalam langkah ini, saya menerapkan nilai Harmonis dengan menunjukkan sikap terbuka dan menerima masukan mentor. Ketika mentor memberikan koreksi terkait data kejadian bencana yang perlu dieliminasi, yaitu hanya memasukkan bencana alam seperti Banjir, Longsor, dan Puting Beliung serta mengeluarkan Kebakaran Bangunan karena bukan termasuk bencana alam, saya menerima masukan tersebut dengan sikap positif. Saya tidak bersikap defensif terhadap klasifikasi yang telah dibuat, melainkan memahami alasan mentor bahwa faktor penyebab bencana alam lebih terukur dan relevan untuk dianalisis. Selain itu, nilai Kolaboratif juga terbangun dalam proses diskusi yang saya bangun bersama mentor. Saya menyampaikan secara

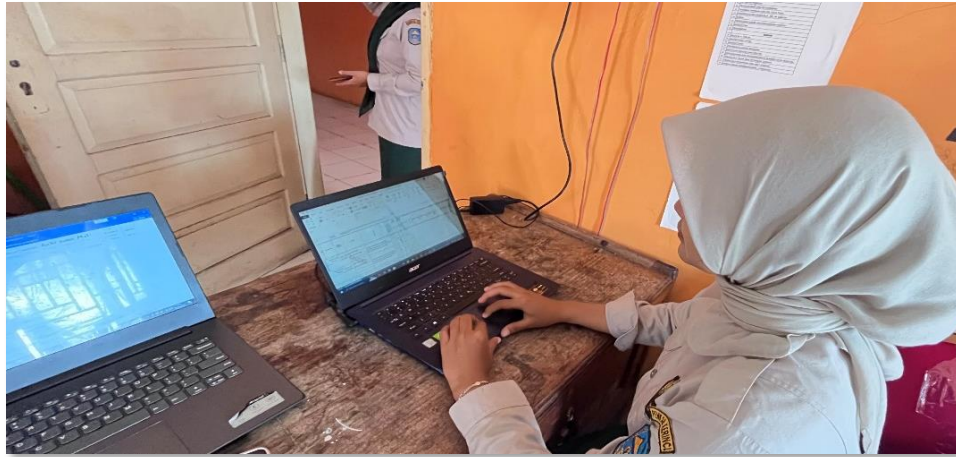
transparan hasil klasifikasi yang telah dikerjakan dan aktif berdiskusi untuk menghasilkan data yang valid dan sesuai kebutuhan pembuatan peta. Komunikasi yang baik ini menghasilkan sinergi dimana saya langsung menindaklanjuti masukan mentor dengan merevisi *spreadsheet* sesuai arahan.

2. Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik

kegiatan/evidence

- a. Mengidentifikasi data-data yang dibutuhkan untuk pembuatan Peta Sebaran Kejadian Bencana lalu mengumpulkannya ke dalam satu folder. Data yang dimaksud adalah data spasial Peta Dasar Wilayah Kabupaten Kerinci yang bersumber dari RTRW Kabupaten Kerinci 2024-2044 dan data non spasial berupa data historis kejadian bencana yang terjadi di Tahun 2024 yang dimiliki BPBD. Bukti fisik kegiatan ini adalah file data spasial (SHP Peta Dasar) dan non-spasial (*Spreadsheet* data mentah kejadian bencana Kabupaten Kerinci Tahun 2024).





- c. Melakukan konsultasi terkait data spasial dan non spasial yang telah diklasifikasikan kepada mentor dengan bukti fisik berupa catatan hasil konsultasi dan dokumentasi hasil konsultasi.




PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kerinci
 Bukit Tengah (0748) 22218.21113
 Sisdak 37163
 Email : apbad.kerinci@gmail.com
 

LAPORAN HASIL KONSULTASI

Peserta Latsar CPNS

Nama : Revis Kusuma Wardani, S.P.W.K
 NIP : 2001062420205052001
 Pangkat/Gol : Penata Muda / IIIa
 Jabatan : Analis Kebencanaan Ahli Pertama

No	Tanggal	Hasil Konsultasi	Paraf Mentor
1	13/09/2025	- Untuk jenis bencana yang disebut hujan bencana banjir, longsor, puting beliung. - Disusunkan dgn historis kejadian bencana tahun 2024.	

3. Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan

- a. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data spasial dan non spasial yang dibutuhkan

Tahapan pertama dilakukan pada tanggal 15 September 2025 dalam kegiatan 2 yaitu mengidentifikasi data-data yang dibutuhkan untuk pembuatan Peta Sebaran Kejadian Bencana lalu mengumpulkannya ke dalam satu folder google drive agar dapat diakses dimana saja dan kapan saja sebagai *back up* data dan di penyimpanan laptop penulis untuk memudahkan pembuatan peta di ArcGIS. Dalam tahapan ini, penulis melakukan identifikasi apa saja data yang dibutuhkan dalam pembuatan Peta Sebaran Kejadian Bencana Kabupaten Kerinci. Berdasarkan hasil identifikasi, data yang dibutuhkan adalah data spasial (SHP Peta Dasar) dan data non spasial berupa data historis kejadian bencana

di Kabupaten Kerinci pada Tahun 2024. Data spasial SHP Peta Dasar Wilayah Kabupaten Kerinci bersumber dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci 2024-2044 dengan wali data dari Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci dan data non spasial berupa data historis kejadian bencana yang terjadi di Tahun 2024 yang dimiliki BPBD. Data spasial berupa SHP Peta Dasar Wilayah Kabupaten Kerinci yang bersumber dari RTRW Kabupaten Kerinci bisa didapat dari wali data langsung yaitu Bappeda Litbang dimana penulis sebelumnya menghubungi via *Whatsapp* salah satu rekan kerja yang bekerja di Bappeda Litbang untuk meminta SHP Peta Dasar RTRW tersebut. Permintaan SHP Peta Dasar ini juga bukan semata-mata hanya untuk keperluan Pelatihan Dasar CPNS penulis melainkan demi keberlanjutan kegiatan pemetaan yang akan dilakukan ke depan agar memudahkan BPBD untuk mengolah Peta Kebencanaan Kabupaten Kerinci lainnya. Hasil/output dari tahapan kegiatan ini adalah file data spasial (SHP Peta Dasar) dan non-spasial (Excel/*spreadsheet* data mentah kejadian bencana Kabupaten Kerinci Tahun 2024).

b. Mengklasifikasikan data sesuai jenisnya

Setelah melakukan identifikasi dan pengumpulan data yang dibutuhkan, selanjutnya penulis melakukan pengklasifikasian data sesuai dengan jenisnya. Penulis melakukan tahapan kegiatan ini

pada hari yang sama seperti tahapan kegiatan sebelumnya yaitu pada tanggal 15 September 2025. Dalam pengklasifikasian data non spasial berupa data mentah kejadian bencana Kabupaten Kerinci Tahun 2024, penulis mengklasifikan berdasarkan jumlah kejadian tiap kecamatan per jenis bencana, jumlah kerusakan rumah tiap kecamatan per jenis bencana, jumlah kerusakan fasilitas tiap kecamatan per jenis bencana, dan jumlah kerusakan lahan tiap kecamatan per jenis bencana, serta rekapan jumlah kejadian bencana tiap jenis bencana di Tahun 2024 termasuk rekapan jumlah kerusakan rumah, fasilitas dan lahan tiap jenis bencana di Tahun 2024 menggunakan *spreadsheet*. Sedangkan untuk data spasial diklasifikasikan sesuai dengan SHP yang dibutuhkan dimana sejatinya dalam Peta Dasar terdapat beberapa SHP namun penulis hanya akan mengambil SHP yang relevan untuk dipakai dalam pembuatan Peta Sebaran Kejadian Bencana yaitu SHP Administratif Kabupaten, SHP Kecamatan dan SHP Toponimi. Hasil/output dari tahapan kegiatan ini adalah dokumentasi saat melakukan pengklasifikasian data dan hasil data yang sudah diklasifikasikan baik SHP dan *Spreadsheet* hasil pengolahan data mentah sebaran kejadian bencana.

- c. Melakukan konsultasi terkait data spasial dan non spasial yang telah diklasifikasi kepada mentor

Tahapan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 17 September 2025 setelah penulis menyelesaikan pengklasifikasian data. Sebelum melakukan konsultasi kepada mentor, peserta telah membuat janji pada tanggal 16 September 2025 untuk melakukan konsultasi pada tanggal 17 September 2025. Saat melaksanakan konsultasi, penulis menyampaikan data-data apa saja yang sudah penulis kumpulkan dan klasifikasikan kemudian penulis juga menunjukan hasil pengklasifikasian data yang telah penulis kerjakan. Dalam tahapan ini mentor memberikan koreksi terkait data non spasial yaitu data kejadian bencana yang telah diklasifikasikan penulis yaitu terkait pengeliminasian jenis bencana yang diinput dimana mentor memberi saran bahwa bencana yang dimasukkan cukup bencana alam yang terjadi di Tahun 2024 yaitu hanya Banjir, Longsor dan Puting Beliung dan yang tidak jadi dimasukkan adalah Kebakaran Bangunan karena bukan merupakan bencana alam. Penulis menerima masukan ini karena dalam pengambilan keputusan terkait kebencanaan biasanya faktor yang paling terukur adalah faktor penyebab bencana alam yang memang bukan disebabkan oleh faktor manusia dll sehingga penulis juga sangat menyetujui maksud mentor agar hanya

memasukkan data kejadian bencana alam. Setelah menerima masukan ini penulis langsung merevisi *spreadsheet* yang sudah penulis buat dengan menghapus rekapan untuk kejadian bencana kebakaran bangunan. Hasil/output dari tahapan kegiatan ini adalah catatan hasil konsultasi disertai dengan dokumentasi foto saat berkonsultasi dengan mentor.

4. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tugas organisasi

Kegiatan ini mendukung Misi ke-4 Kabupaten Kerinci yaitu Meningkatkan Infrastruktur Kewilayahan dan Ketahanan Bencana, karena data spasial dan non-spasial sebagai komponen utama dalam pembuatan peta sebaran kejadian bencana merupakan hal yang sangat krusial untuk menghasilkan informasi yang akurat. Dengan adanya klasifikasi data yang baik, peta yang dihasilkan dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan infrastruktur kewilayahan dan ketahanan bencana yang tepat sasaran yang didalamnya termasuk memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana.

5. Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS

a. Dampak terhadap satuan kerja

Jika kegiatan identifikasi, pengklasifikasian, dan konsultasi data spasial maupun non-spasial tidak dilaksanakan sesuai nilai dasar BerAKHLAK, maka satuan kerja berpotensi mengalami hambatan besar dalam proses penyusunan peta sebaran kejadian bencana. Data yang tidak teridentifikasi dengan baik dapat menyebabkan kekurangan informasi penting, sementara data yang tidak diklasifikasikan secara sistematis akan sulit diolah menjadi peta tematik yang akurat. Selain itu, tanpa adanya konsultasi yang terarah bersama dengan mentor maka hasil pengolahan data bisa menyimpang dari kebutuhan teknis instansi sehingga peta yang dihasilkan tidak relevan dengan kondisi di lapangan. Kondisi ini akan mengurangi efektivitas perencanaan penanggulangan bencana di BPBD, menghambat pengambilan keputusan yang berbasis data, serta melemahkan budaya kerja yang akuntabel, harmonis, dan kolaboratif di lingkungan BPBD.

b. Dampak terhadap masyarakat

Jika kegiatan ini tidak dilaksanakan dan tidak berdasar atas nilai dasar BerAKHLAK maka masyarakat akan terdampak secara langsung karena informasi yang ditampilkan dalam peta sebaran

kejadian bencana berisiko tidak tepat. Hal ini akan membuat masyarakat tidak memperoleh informasi yang utuh mengenai wilayah yang paling berpotensi terjadi bencana di kemudian hari berdasarkan data historis bencana, sehingga kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi bencana menjadi rendah. Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi efektivitas upaya mitigasi yang dilakukan, memperbesar potensi kerugian ketika bencana terjadi, serta membuat masyarakat Kabupaten Kerinci semakin rentan terhadap dampak bencana di masa mendatang.

b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta		: Revia Kusuma Wardani, S.P.W.K.		
Satuan Kerja		: BPBD Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		: BPBD Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil capaian/ Output	Paraf Mentor
1	17 September 2025	Tidak perlu memasukkan bencana kebakaran bangunan karena termasuk bencana non alam yang penyebabnya tidak dapat dipastikan	Catatan hasil konsultasi	

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta		: Revia Kusuma Wardani, S.P.W.K.		
Satuan Kerja		: BPBD Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		: BPBD Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil capaian/ Output	Paraf Coach
1				
2				

Lampiran 3. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-3

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan 3	Mengolah data ke dalam bentuk peta menggunakan ArcGIS
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	22-26 September 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/ <i>Evidence</i>	1. Tersedianya <i>database</i> batas administrasi wilayah Kabupaten Kerinci di ArcGIS dan dokumentasi pengerjaannya 2. Tersedianya basis data pada <i>attribute table</i> ArcGIS sebaran kejadian bencana dan dokumentasi pengerjaannya 3. Tersedianya <i>draft</i> peta tematik sebaran kejadian bencana yang telah disetujui mentor, catatan dan dokumentasi hasil konsultasi
Uraian Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi a. Menginput data SHP administratif ke <i>software</i> ArcGIS Dalam tahapan kegiatan ini penulis memulai dengan menginput <i>shapefile</i> wilayah administratif Kabupaten Kerinci ke dalam	

software ArcGIS. Proses ini meliputi penginputan berbagai jenis data spasial seperti *polygon* wilayah kabupaten dan kecamatan, *polyline* batas wilayah administrasi, dan *point* ibukota kecamatan yang sebelumnya telah dikumpulkan dalam folder peta dasar. Di tahapan ini nilai **Kompeten** penulis terapkan dengan menguasai penggunaan perangkat lunak ArcGIS secara menyeluruh, mulai dari teknik import data, pengaturan coordinate system, hingga penambahan hillshade dari DEM Nasional pada peta. Kompetensi teknis ini penulis wujudkan dengan memahami berbagai format data spasial dan kemampuan mengintegrasikan data raster dengan data vektor untuk menghasilkan visualisasi yang optimal. Selain itu, nilai Akuntabel juga penulis praktikkan dengan memastikan bahwa setiap data yang diinput telah sesuai dengan standar kartografi dan pemetaan yang berlaku. Penulis melakukan *layouting* peta dengan menambahkan elemen-elemen peta yang lengkap seperti judul, skala, arah mata angin, *coordinate system*, inset peta, keterangan, dan sumber peta. Tanggung jawab ini penulis jalankan dengan menyimpan hasil kerja dalam format *Map Package* (MPK) sebagai database standar yang dapat digunakan untuk pembuatan peta kebencanaan di masa mendatang, sehingga memastikan konsistensi dan kualitas peta yang dihasilkan BPBD.

b. Mengolah data sebaran kejadian bencana di *attribute table* ArcGIS

Tahapan kegiatan selanjutnya adalah mengolah data sebaran kejadian bencana yang telah diklasifikasikan sebelumnya ke dalam *attribute table* ArcGIS. Tahapan ini penulis lakukan dengan memanfaatkan SHP wilayah administrasi dari *database* MPK yang telah dibuat. Nilai Akuntabel penulis terapkan dengan memastikan bahwa data sebaran kejadian bencana diolah dengan baik dan menghasilkan basis data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan data historis kejadian bencana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Kerinci. Penulis menginput data dengan teliti meliputi jumlah kejadian bencana, jumlah korban, jumlah kerusakan rumah, fasilitas, dan lahan ke dalam *attribute table*, kemudian mengeksportnya menjadi lima SHP terpisah untuk memudahkan penggunaan dan analisis. Tanggung jawab ini penulis jalankan dengan memastikan akurasi data dan konsistensi format sehingga SHP yang dihasilkan dapat digunakan oleh siapapun yang mengoperasikan ArcGIS untuk keperluan pemetaan kebencanaan. Selain itu, nilai Kompeten juga penulis praktikkan dengan menguasai penggunaan fitur *attribute table* ArcGIS secara optimal. Kompetensi ini penulis wujudkan dengan memahami struktur data tabular, teknik penambahan *field*, dan proses ekspor data ke format SHP yang sesuai standar. Penulis juga memastikan bahwa setiap SHP yang dihasilkan memiliki

struktur data yang konsisten dan dapat diintegrasikan dengan mudah untuk berbagai keperluan analisis spasial kebencanaan.

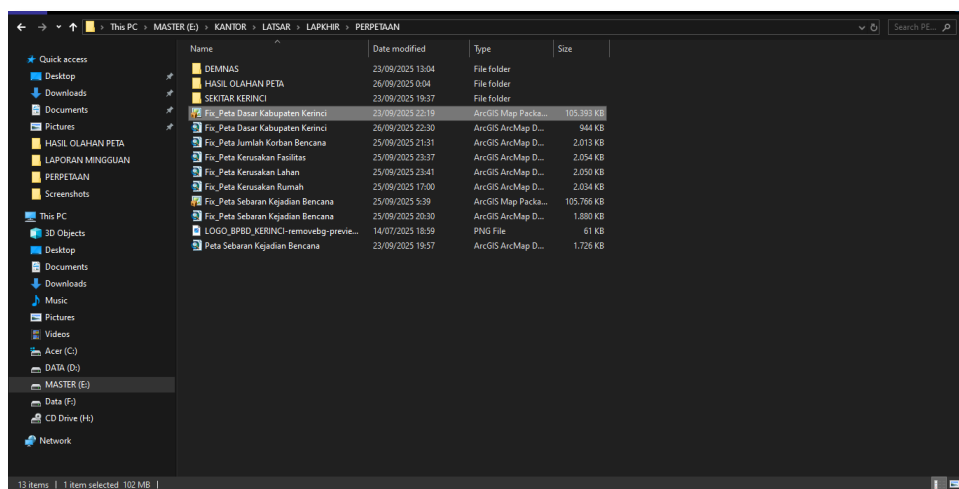
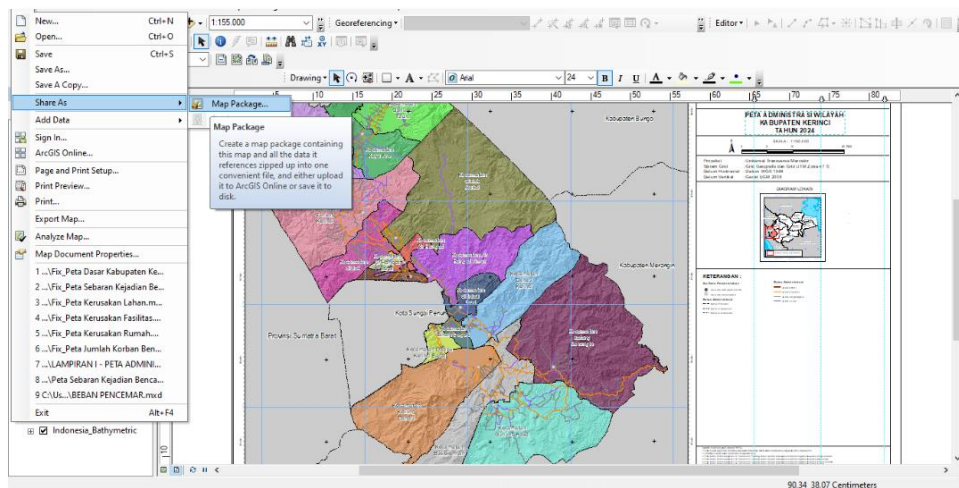
- c. Membuat layer peta sebaran kejadian bencana dan mengonsultasikan kepada mentor

Tahap selanjutnya adalah membuat layer peta tematik berdasarkan data yang telah diolah dalam *attribute table* dan melakukan konsultasi dengan mentor. Dalam langkah ini, penulis menerapkan nilai **Loyal** dengan menunjukkan dedikasi penuh dan kesungguhan dalam menampilkan data ke dalam bentuk layer peta sehingga tercipta visualisasi data melalui peta tematik yang berkualitas. Loyalitas ini penulis wujudkan dengan bekerja secara menyeluruh selama dua hari untuk memastikan setiap detail peta tematik tersaji dengan baik, mulai dari pengaturan simbolisasi menggunakan *graduated colors* hingga penyesuaian legenda/keterangan agar informasi dapat terbaca dan dipahami dengan mudah. Penulis juga memastikan bahwa setiap kategori data seperti jumlah sebaran kejadian, korban, dan kerusakan divisualisasikan dengan jelas untuk memberikan informasi yang maksimal kepada pengguna peta. Nilai Kompeten juga penulis praktikkan dengan memaksimalkan kemampuan penggunaan ArcGIS dalam pembuatan peta hingga menghasilkan output yang sesuai dengan kaidah kartografi. Kompetensi ini penulis tunjukkan

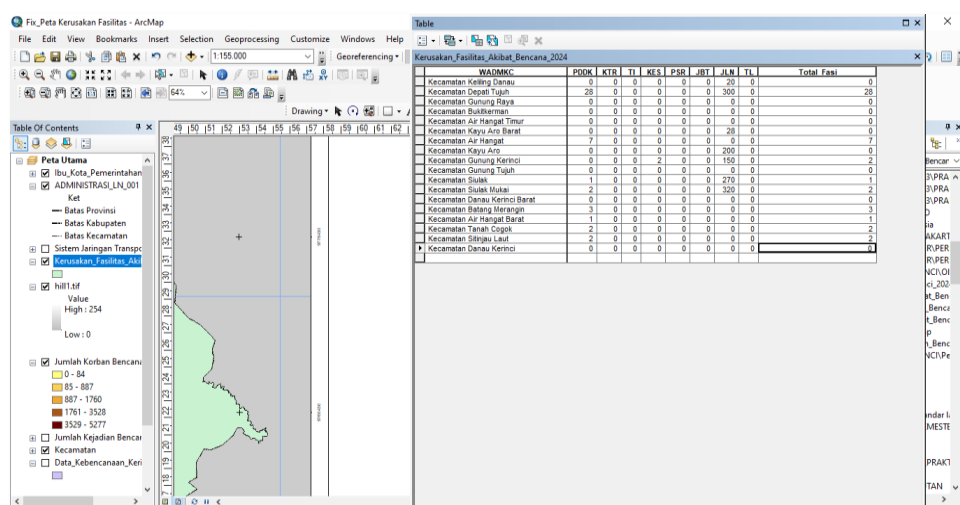
dengan menguasai fitur layer *properties*, *symbolology*, dan *graduated colors* untuk menciptakan visualisasi yang efektif. Penulis juga memastikan bahwa layout peta memenuhi standar kartografi dengan elemen-elemen yang lengkap dan proporsional. Setelah menyelesaikan draft peta tematik, penulis melakukan konsultasi dengan mentor dan menerapkan nilai Harmonis dengan menerima saran perbaikan terkait kerapihan peta dan penambahan jaringan jalan dengan sikap terbuka dan positif. Sikap harmonis ini penulis wujudkan dengan mendengarkan masukan mentor secara seksama dan siap untuk melakukan perbaikan sesuai arahan yang diberikan demi menghasilkan peta yang lebih berkualitas.

2. Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence

- a. Menginput *shapefile* (SHP) wilayah administratif Kabupaten Kerinci ke software ArcGIS. SHP yang sebelumnya telah dikumpulkan dalam satu folder peta dasar diinput ke ArcGIS untuk selanjutnya dibuat database administrasi wilayah Kabupaten Kerinci dalam bentuk *Map Package* yang telah sekaligus dibuat layout petanya. Bukti fisik kegiatan ini adalah MPK *database* batas wilayah administrasi di ArcGIS dan dokumentasi pengerjaannya.



- b. Mengolah data sebaran kejadian bencana yang sebelumnya telah diklasifikasikan pada kegiatan 2 yang masih terdapat di excel ke dalam ArcGIS sesuai dengan peta tematik yang akan dibuat. Bukti fisik kegiatan ini adalah basis data *attribute table* ArcGIS dalam bentuk SHP Sebaran Kejadian Bencana, SHP Korban Bencana, SHP Kerusakan Rumah, SHP Kerusakan Fasilitas, SHP Kerusakan Lahan dan dokumentasi pengerjaanya.



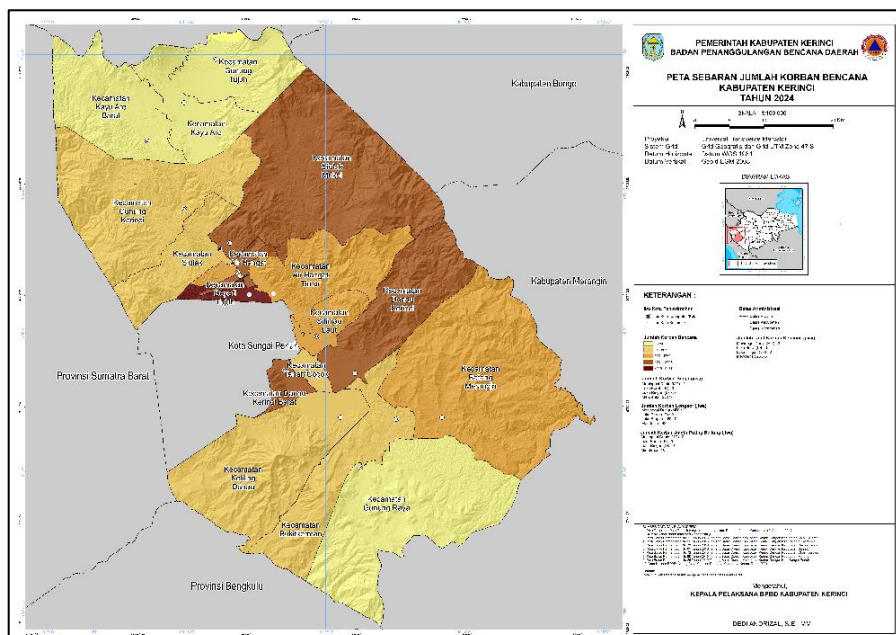
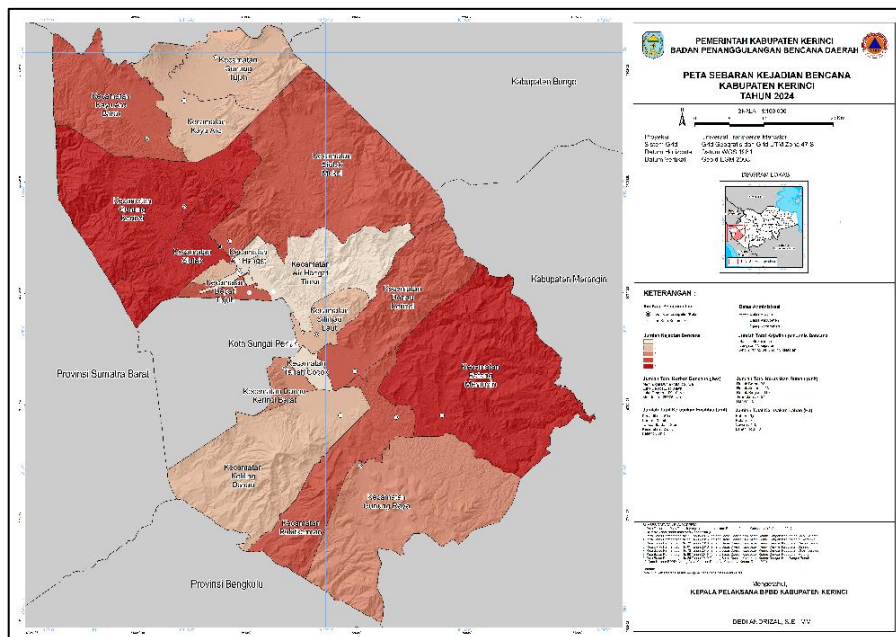


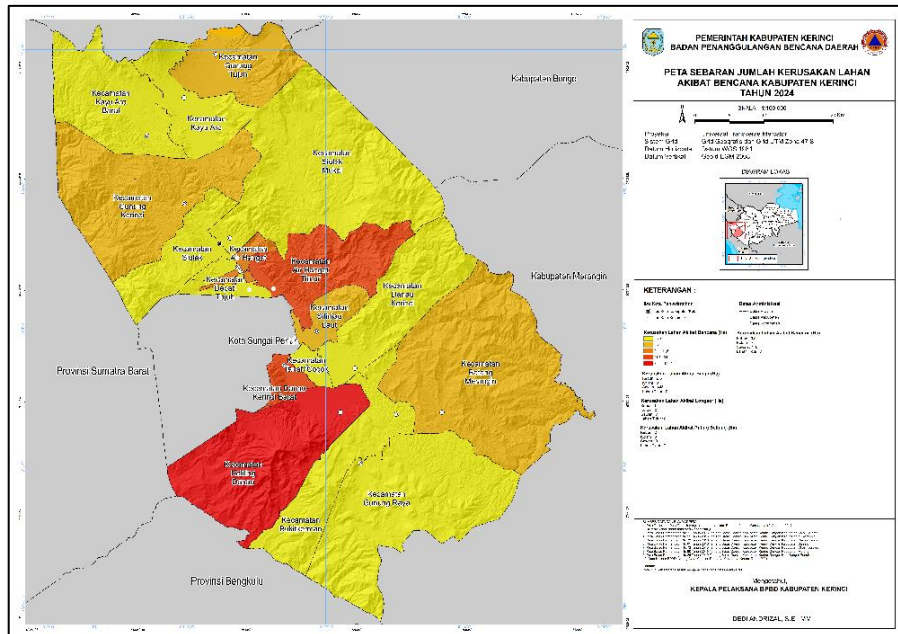
LAPORAN HASIL KONSULTASI

Peserta Latsar CPNS

Nama : Revia Kusuma Wardani, S.P.W.K
 NIP : 200109242025052001
 Pangkat/Go : Penata Muda / IIIa
 Jabatan : Analis Kebencanaan Ahli Pertama

No	Tanggal	Hasil Konsultasi	Paraf Mentor
1	26 September 2025	Agar menambahkan jaringan jalan pada semua peta yang sudah dibuat (Peta Sebaran Kejadian Bencana, Peta Korban Bencana, Peta Kerusakan Fasilitas, Peta Kerusakan Rumah dan Peta Kerusakan Lahan)	





3. Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan

a. Menginput data SHP administratif ke *software* ArcGIS

Tahapan kegiatan pertama pada kegiatan ke 3 adalah Menginput *shapefile* (SHP) wilayah administratif Kabupaten Kerinci ke *software* ArcGIS pada tanggal 22 September 2025. SHP yang diinput diantaranya *polygon* wilayah kabupaten dan kecamatan, *polyline* batas wilayah administrasi, dan *point* ibukota kecamatan yang sebelumnya sudah didapatkan dan dimasukkan ke dalam satu folder peta dasar di Kegiatan 2. Penulis juga menambahkan *hillshade* yang datanya bersumber dari DEM Nasional yang datanya dalam bentuk raster. Data SHP Adminstratif yang diinput ke *software* ArcGIS ini akan menjadi dasar untuk pembuatan peta kebencanaan saat ini (keperluan pelatihan dasar) dan untuk di

masa yang akan datang agar lebih memudahkan pembuata peta kebencanaan saat ini dan untuk masa yang akan datang. SHP administratif yang telah diinput ke ArcGIS ini kemudian sekaligus dilakukan layouting peta diantaranya menambahkan judul, skala peta, arah mata angin, *coordinate system* yang digunakan, inset peta, keterangan, dan sumber peta. Setelah layouting tersebut selesai dilakukan baru kemudian disimpan dalam bentuk format *Map Package* (MPK) sebagai *database* yang nantinya akan memudahkan pembuatan peta sehingga dasar pembuatan peta di BPBD menggunakan data dan *layout* peta yang sama. Hasil/output dari tahapan kegiatan ini adalah *database* batas wilayah administrasi dalam bentuk *Map Package* di ArcGIS.

b. Mengolah data sebaran kejadian bencana di *attribute table* ArcGIS

Tahapan kegiatan selanjutnya adalah mengolah data sebaran kejadian bencana yang sebelumnya telah diklasifikasikan pada kegiatan 2 ke dalam ArcGIS. Tahapan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 23 September 2025. Semua data yang sudah ada pada *excel* diinput ke ArcGIS dengan menambah *field* pada *attribute table* menggunakan SHP Wilayah Administrasi di MPK *database* wilayah administratif yang telah dibuat di tahapan kegiatan sebelumnya agar data sebaran kejadian bencana dapat tergambar perbedaan jumlah kejadiannya di tiap kecamatan pada output petanya nanti.

Data yang diinput di *attribute table* diantaranya adalah jumlah kejadian bencana, jumlah korban, jumlah kerusakan rumah, jumlah kerusakan fasilitas dan jumlah kerusakan lahan. Data yang terinput pada *attribute table* ArcGIS tersebut kemudian dieskpor dalam bentuk SHP jadi total terdapat 5 SHP yang dihasilkan diantaranya adalah SHP Jumlah Kejadian Bencana, SHP Jumlah Korban, SHP Jumlah Kerusakan Rumah, SHP Jumlah Kerusakan Fasilitas dan SHP Jumlah Kerusakan Lahan. SHP yang dihasilkan ini nantinya dapat dibuka oleh siapapun yang bisa mengoperasikan ArcGIS untuk pembuatan peta yang memerlukan data spasial kejadian bencana di Tahun 2024. Hasil/output dari tahapan kegiatan ini adalah basis data pada *attribute table* ArcGIS yang tersimpan dalam bentuk SHP (Jumlah Kejadian Bencana, Jumlah Korban, Jumlah Kerusakan Rumah, Jumlah Kerusakan Fasilitas dan SHP Jumlah Kerusakan Lahan).

- c. Membuat layer peta sebaran kejadian bencana dan mengonsultasikan kepada mentor

Tahapan selanjutnya adalah membuat layer peta tematik berdasarkan data yang telah diinput dan diolah pada *attribute table*. Tahapan kegiatan ini dilakukan selama 2 hari yang berlangsung dari tanggal 24-25 September 2025. Data sebaran kejadian bencana yang telah diinput sebelumnya dan menjadi SHP kemudian

ditampilkan dalam bentuk layer tematik sesuai kategori, seperti jumlah sebaran kejadian, jumlah korban, kerusakan rumah, kerusakan fasilitas, dan kerusakan lahan dengan judul menyesuaikan masing-masing peta tematik yang dibuat. Untuk pengaturan simbolisasi yang nantinya akan ditampilkan pada legenda/keterangan peta dilakukan dengan memanfaatkan layer properties pada bagian symbology lalu memanfaatkan fitur *graduated colors* sehingga perbedaan intensitas kejadian bencana di tiap kecamatan dapat divisualisasikan dengan jelas. Selain itu, legenda/keterangan peta juga disesuaikan agar informasi dapat terbaca dan dipahami dengan mudah. Selain itu juga dilakukan penyesuaian terhadap sumber petanya. Jika sudah selesai draft layer peta tematik sebaran bencana di wilayah Kabupaten Kerinci yang tersimpan dalam ArcGIS, *Map Package* ArcGIS dan hasil sementara peta tematik sebaran kejadian bencana Kabupaten Kerinci Tahun 2024 selanjutnya dapat dikonsultasikan kepada Mentor. Penulis melakukan konsultasi bersama mentor pada tanggal 26 September 2025 setelah menyelesaikan draft peta tematik. Dalam tahapan ini juga mentor memberikan beberapa masukan terkait dengan detail kerapihan peta dan penambahan jaringan jalan di semua peta kebencanaan yang telah dibuat oleh penulis.

4. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tugas organisasi

Kegiatan ini mendukung Misi ke-4 Kabupaten Kerinci yaitu Meningkatkan Infrastruktur Kewilayahan dan Ketahanan Bencana, karena data spasial yang sudah diolah dan divisualisasikan dalam bentuk peta dapat menyajikan informasi sebaran bencana secara lebih jelas, akurat, dan mudah dipahami. Peta yang dihasilkan dapat menggambarkan perbedaan tingkat kejadian bencana di tiap kecamatan, sehingga mempermudah BPBD dan pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan adanya peta tematik ini maka peta dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan infrastruktur kewilayahan dan ketahanan bencana yang tepat sasaran yang didalamnya termasuk memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana.

5. Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS

a. Dampak terhadap satuan kerja

Jika kegiatan penginputan data SHP, pengolahan data sebaran kejadian bencana di *attribute table*, pembuatan layer peta dan konsultasi dengan mentor tidak dilaksanakan sesuai nilai dasar BerAKHLAK maka dapat berpotensi menurunkan kualitas

peta tematik sebaran kejadian bencana yang dibuat. Penulis akan kesulitan mempertanggungjawabkan hasil kerja yang tidak dapat diverifikasi validitasnya, sehingga mengurangi kredibilitas BPBD dalam memberikan layanan informasi kebencanaan kepada publik. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan hasil pemetaan yang tidak memenuhi standar teknis, tidak memenuhi kebutuhan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan serta melemahkan budaya kerja yang akuntabel, kompeten, loyal dan harmonis di lingkungan BPBD.

b. Dampak terhadap masyarakat

Dampak terhadap masyarakat akan sangat signifikan ketika nilai-nilai BerAKHLAK tidak diterapkan dalam proses penginputan data SHP, pengolahan data sebaran kejadian bencana di *attribute table*, pembuatan layer peta dan konsultasi dengan mentor. Hal ini akan menyebabkan masyarakat menerima informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap kapasitas pemerintah dalam pengelolaan risiko bencana. Selain itu hal ini juga dapat menyebabkan masyarakat salah memahami kondisi kebencanaan berdasarkan data historis kejadian bencana yang telah terjadi di wilayah mereka, dan berpotensi mengambil langkah mitigasi yang tidak tepat sehingga kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

menjadi tidak optimal sehingga memperbesar potensi kerugian ketika bencana terjadi, serta membuat masyarakat Kabupaten Kerinci semakin rentan terhadap dampak bencana di masa mendatang.

b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta		: Revia Kusuma Wardani, S.P.W.K.		
Satuan Kerja		: BPBD Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		: BPBD Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil capaian/ Output	Paraf Mentor
1	26 September 2025	Agar menambahkan jaringan jalan pada peta dasar yang digunakan untuk seluruh peta kebencanaan yang dibuat	Catatan hasil konsultasi	

c. **Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach**

Nama Peserta		: Revia Kusuma Wardani, S.P.W.K.		
Satuan Kerja		: BPBD Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		: BPBD Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil capaian/ Output	Paraf Coach
1				
2				

Lampiran 4. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-4

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan 4	Menyebarkan Peta Sebaran Kejadian Bencana melalui sosial media BPBD Kabupaten Kerinci
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	29 September – 4 Oktober 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/ <i>Evidence</i>	1. Tersedianya <i>draft</i> dan desain konten publikasi 2. Tersedianya catatan dan dokumentasi hasil konsultasi 3. Tersedianya unggahan di media sosial
Uraian Kegiatan yang dilaksanakan : 1. Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi a. Menentukan dan mendesain media publikasi Dalam tahapan kegiatan ini saya memulai dengan menentukan media publikasi yang tepat untuk menyebarkan informasi peta sebaran kejadian bencana kepada masyarakat. Proses ini tidak hanya sekedar memilih platform, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik audiens dan efektivitas penyampaian informasi kebencanaan. Di tahapan ini nilai Adaptif saya terapkan dengan	

memilih media sosial sebagai platform publikasi agar jangkauan informasi lebih luas, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Kerinci yang aktif menggunakan media sosial. Saya menyadari bahwa dalam era digital saat ini, media sosial menjadi saluran komunikasi yang efektif dan cepat untuk menyebarkan informasi penting kepada masyarakat luas. Kemampuan beradaptasi ini juga saya wujudkan dengan menyesuaikan desain publikasi mengikuti tren media sosial terkini, seperti penggunaan visual yang menarik agar konten mudah dikonsumsi oleh pengguna media sosial. Selain itu, nilai Kompeten juga saya praktikkan dengan menyusun konten publikasi yang informatif dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Kompetensi ini saya wujudkan dengan mengolah data kebencanaan menjadi informasi spasial yang sederhana namun tetap akurat, memilih kombinasi warna yang kontras untuk memudahkan pembacaan, serta menambahkan penjelasan singkat yang membantu audiens memahami makna dari visualisasi peta.

b. Melakukan konsultasi kepada mentor terkait media publikasi yang tepat dan desain publikasi yang disetujui mentor

Setelah menentukan konsep media publikasi dan membuat draft desain, saya melanjutkan kegiatan dengan melakukan konsultasi kepada mentor. Tahapan kegiatan ini saya jalani

dengan penuh keterbukaan untuk mendapatkan masukan yang konstruktif. Nilai Harmonis saya terapkan dengan menunjukkan sikap terbuka dalam menerima setiap saran dan kritik dari mentor terkait pemilihan media publikasi maupun desain yang telah saya buat. Saya tidak bersikap defensif terhadap pilihan desain atau platform yang telah saya tentukan, melainkan mendengarkan dengan seksama perspektif dan pengalaman mentor dalam hal publikasi informasi kebencanaan. Sikap harmonis ini saya wujudkan dengan menghargai setiap masukan yang diberikan dan bersedia melakukan revisi sesuai arahan mentor untuk menghasilkan konten publikasi yang lebih efektif. Selain itu, nilai Kolaboratif juga terbangun dalam proses diskusi yang saya bangun bersama mentor. Saya aktif bertukar ide dan pandangan mengenai strategi publikasi yang tepat dan format konten yang menarik. Kolaborasi ini saya wujudkan dengan membangun komunikasi yang baik, menyampaikan alasan di balik setiap pilihan desain, dan bersama-sama mencari solusi terbaik untuk mengoptimalkan penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat. Melalui kerja sama yang baik ini, terciptalah konten publikasi peta sebaran kejadian bencana yang tidak hanya informatif tetapi juga menarik dan sesuai dengan kebutuhan publik.

c. Mengunggah peta sebaran kejadian bencana ke sosial media

Tahap selanjutnya adalah mengunggah peta sebaran kejadian bencana ke media sosial setelah mendapatkan persetujuan dari mentor dan melakukan penyempurnaan desain. Dalam langkah ini, saya menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan dengan menyebarkan informasi peta sebaran kejadian bencana kepada masyarakat luas agar mereka dapat memperoleh informasi kebencanaan yang tergambar secara spasial dengan mudah dan cepat. Dalam tahapan ini saya wujudkan dengan kesadaran penuh bahwa informasi kebencanaan merupakan hak masyarakat untuk mengetahui kondisi dan potensi bencana di wilayah mereka. Saya berupaya memberikan pelayanan informasi yang berkualitas dengan menyajikan peta yang akurat, mudah dipahami, dan dapat diakses dengan mudah melalui media sosial. Nilai berorientasi pelayanan ini juga saya tunjukkan dengan memastikan bahwa konten yang diunggah disertai dengan caption yang informatif, hashtag yang relevan, dan waktu unggah yang strategis agar jangkauan informasi maksimal. Saya menyadari bahwa dengan menyebarluaskan informasi kebencanaan melalui media sosial, masyarakat dapat lebih waspada, siaga, dan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kondisi kebencanaan di

Kabupaten Kerinci, sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di tingkat masyarakat.

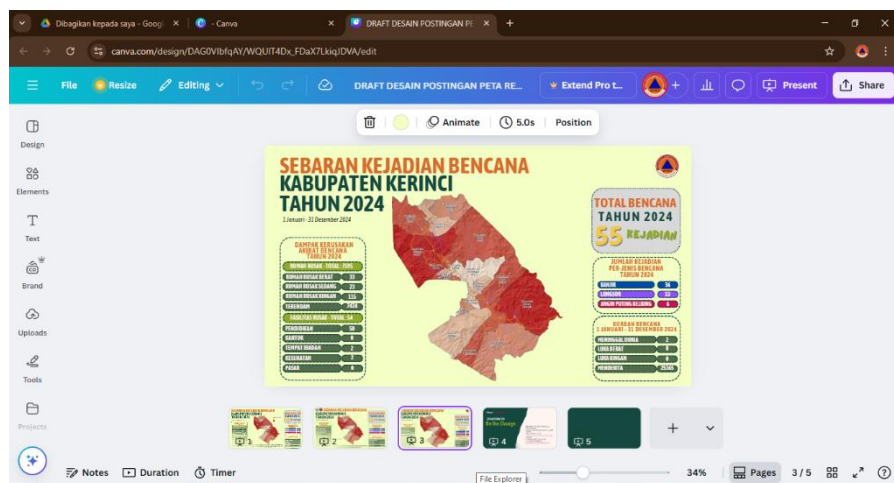
4. Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence

- a. Menentukan media publikasi yang akan digunakan untuk mempublikasikan peta non formal dalam hal ini penulis memilih media sosial *facebook* dan *instagram*. Setelah itu penulis mendesain konten publikasi untuk dipublikasikan di media publikasi yang sudah dipilih. Penulis mendesain konten publikasi menggunakan Canva. Bukti fisik kegiatan ini adalah draft dan desain konten publikasi serta dokumentasi pengerjaannya.

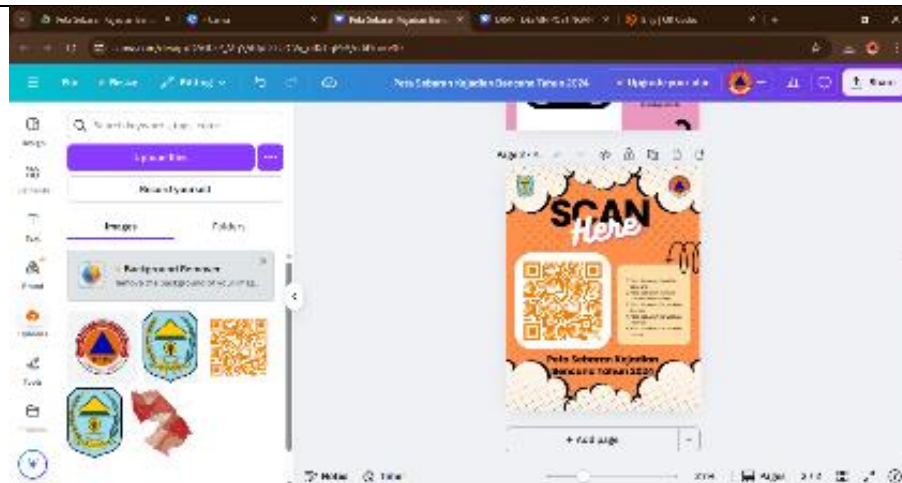




Desain Peta Non Formal Pertama



Desain Peta Non Formal Kedua



Desain Untuk Pengaksesan Peta Formal

- b. Mengkonsultasikan pertimbangan media publikasi yang telah penulis tentukan dan desain publikasi yang sudah penulis buat dengan menunjukkan hasil *print out* desain yang akan dipublikasikan untuk memudahkan mentor melakukan pengecekan terhadap informasi yang termuat dalam konten publikasi. Selain itu, Bukti fisik kegiatan ini catatan dan dokumentasi hasil konsultasi.





PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kerinci
Bukit Tengah (0748) 22218.21113
Sulak 37163
Email : bpbd.kerinci@gmail.com



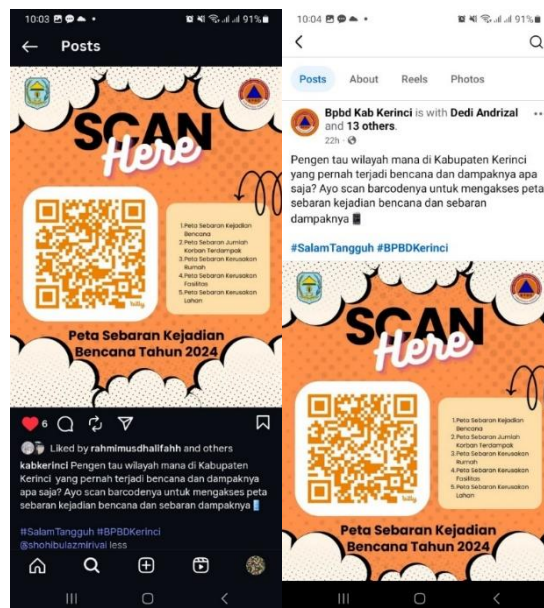
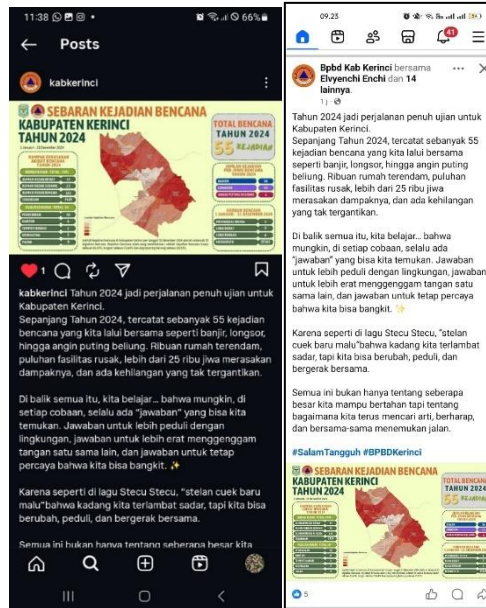
LAPORAN HASIL KONSULTASI

Peserta Latsar CPNS

Nama : Revia Kusuma Wardani, S.P.W.K
NIP : 200109242025052001
Pangkat/Go : Penata Muda / Illa
Jabatan : Analis Kebencanaan Ahli Pertama

No	Tanggal	Hasil Konsultasi	Paraf Mentor
1	30 September 2025	- Tambahkan foto peta di Peta - Untuk legalitas peta di tambah dengan tanda tangan Kepala Pelaksana, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan Pembuat - Peta formal dan non formal diupload di media BPBD	

- c. Mengunggah peta sebaran kejadian bencana formal dan non formal ke sosial media dengan bukti fisik berupa tangkapan layar hasil unggahan peta sebaran kejadian bencana di media sosial *facebook* dan *instagram*.



5. Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan

a. Menentukan dan mendesain media publikasi

Tahapan pertama yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah menentukan dan mendesain media publikasi. Tahapan ini dilakukan pada tanggal 29 September 2025. Dalam penentuan media

publikasi, penulis mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat untuk dapat melihat Peta Sebaran Kejadian Bencana yang telah penulis buat. Penulis memilih untuk mempublikasikan Peta Sebaran Kejadian Bencana melalui media sosial yang sebelumnya telah dimiliki oleh BPBD dengan mempublikasikan peta formal dan non formal sebaran kejadian bencana di Kabupaten Kerinci. Sosial media yang akan digunakan untuk publikasi adalah sosial media facebook yang masih aktif dan akun sosial akun instagram yang diaktifkan kembali. Kedua akun tersebut penulis pilih karena agar mampu menjangkau generasi muda hingga dewasa. Peta Formal yang akan penulis publikasikan adalah peta sebaran kejadian bencana yang telah dibuat pada tahapan kegiatan di kegiatan sebelumnya sedangkan peta non formal adalah peta yang telah didesain ulang agar lebih menarik audiens untuk tertarik membaca dan melihat peta sehingga informasi sebaran kejadian bencana yang terdapat di Kabupaten Kerinci dapat maksimal dipahami oleh masyarakat. Peta sebaran kejadian bencana dalam bentuk non formal tersebut penulis desain melalui bantuan Canva sehingga peta non formal yang dipublikasikan menjadi lebih menarik. Peta Formal yang dipublikasikan sebanyak 5 Peta yaitu Peta Sebaran Kejadian Bencana, Peta Sebaran Jumlah Korban, Peta Sebaran Kerusakan Rumah, Peta Sebaran Kerusakan Lahan, dan Peta Sebaran Kerusakan Fasilitas yang diupload dalam bentuk *barcode google*

drive agar kualitas peta tidak berubah dan dapat dilihat secara detail untuk masing-masing jenis peta. Sedangkan peta non formal yang penulis pulikasikan adalah Peta Sebaran Kejadian Bencana yang didalamnya sudah secara komprehensif memuat informasi sebaran kejadian bencana setiap kecamatan, jumlah kejadian per masing-masing jenis bencana, jumlah kerusakan rumah berdasarkan tingkat kerusakannya, jumlah kerusakan fasilitas dan jumlah kerusakan lahan. Peta non formal yang penulis buat di Canva tersebut menggunakan pemilihan warna yang terang sehingga tidak monoton dan cenderung berwarna-warni agar terlihat lebih menarik namun tidak mengurangi esensi penyampaian informasi yang disampaikan. Hasil/output dari tahapan kegiatan ini adalah draft dan desain konten publikasi.

- b. Melakukan konsultasi kepada mentor terkait media publikasi yang tepat dan desain publikasi yang disetujui mentor

Tahapan selanjutnya adalah penulis melakukan konsultasi kepada mentor terkait media publikasi yang tepat dan desain publikasi yang sebelumnya sudah penulis buat yang dilaksanakan pada tanggal 30 September. Penulis mengajukan 2 desain yang sedikit berbeda untuk diajukan kepada mentor dan menunjukkan juga hasil revisi Peta Formal yang akan dipublikasikan juga yang sebelumnya mendapatkan revisi terkait penambahan jaringan jalan.

Penulis menunjukkannya melalui *print out* desain yang sudah penulis buat untuk memudahkan mentor melakukan pengecekan. Saat berkonsultasi, mentor menyetujui salah satu desain namun masih ada yang perlu diperbaiki terkait dengan penambahan logo Kabupaten Kerinci di samping logo BPBD Kabupaten Kerinci. Selain itu, mentor juga menyetujui bahwa media publikasi yang digunakan adalah media sosial *facebook* dan *instagram* dimana nanti yang diupload adalah Peta Formal dan Non Formal. Disamping itu, penulis juga menyampaikan terkait revisi peta formal yang sebelumnya disampaikan mentor pada konsultasi di tahapan sebelumnya terkait dengan penambahan jaringan jalan. Saat melakukan konsultasi kembali mentor juga menyarankan untuk menambahkan tanda tangan pembuat sebelum meminta tanda tangan Kepala Pelaksana di Peta Formal yang akan dipublikasikan sebagai bentuk keabsahan peta yang dibuat. Saat melaksanakan konsultasi, penulis juga membawa lembar format laporan konsultasi yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Setelah melakukan konsultasi ini, penulis langsung kembali melakukan revisi peta formal maupun desain peta non formal sesuai dengan arahan dari mentor. Setelah merevisi, penulis lalu menyerahkan kepada mentor selaku Plt Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan kemudian dilanjutkan dengan menyerahkan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kerinci untuk meminta tanda tangan

sebagai bentuk persetujuan dan keabsahan atas peta yang akan penulis publikasikan ke sosial media. Hasil/output dari tahapan kegiatan ini adalah catatan hasil konsultasi disertai dengan dokumentasi foto saat berkonsultasi dengan mentor.

c. Mengunggah peta sebaran kejadian bencana ke sosial media

Setelah menyelesaikan dua tahap sebelumnya, tahapan terakhir dalam kegiatan ini adalah mengunggah peta sebaran kejadian bencana baik peta formal dan non formal ke sosial media di *weekend* tanggal 4 Oktober 2025. Penulis juga menyiapkan *caption* yang menarik untuk dibaca masyarakat sesuai dengan konten publikasi yang dibagikan yaitu mendukung informasi Peta Sebaran Kejadian Bencana. Penulis membaginya ke dalam 2 postingan yang berbeda untuk masing-masing akun sosial media dimana peta formal dan peta non formal sebaran kejadian bencana yang diposting akan memiliki *caption* postingan yang berbeda di kedua jenis peta tersebut. Penulis juga menambahkan *sound* yang sedang viral namun tetap dapat mendukung isi konten yang disampaikan. Penulis juga menambahkan tagar yang relevan untuk postingan Peta Sebaran Kejadian bencana ini. Hasil/output dari tahapan kegiatan ini adalah unggahan peta formal dan non formal sebaran kejadian bencana di media sosial.

6. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tugas organisasi

Kegiatan ini mendukung Misi ke-4 Kabupaten Kerinci yaitu Meningkatkan Infrastruktur Kewilayahan dan Ketahanan Bencana, karena penyebaran peta sebaran kejadian bencana melalui media sosial BPBD merupakan upaya strategis dalam mengatasi minimnya informasi spasial kebencanaan yang selama ini menghambat efektivitas penanggulangan bencana di Kabupaten Kerinci. Hal ini menjadi instrumen krusial untuk meningkatkan ketahanan bencana karena memungkinkan perencanaan dan pengambilan keputusan penanggulangan bencana menjadi lebih tepat, serta menggeser fokus dari yang semula hanya berorientasi pada respon darurat menuju pencegahan dan kesiapsiagaan. Selain itu, ketersediaan informasi spasial yang disebarluaskan ini juga menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang tepat sasaran, karena pemerintah daerah dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memerlukan prioritas penanganan berdasarkan historis kejadian bencana. Dengan demikian, upaya peningkatan infrastruktur kewilayahan dan ketahanan bencana dapat dilaksanakan secara terukur dan berbasis pada data yang akurat.

Kegiatan ini juga mendukung Misi ke-5 yaitu Pengembangan Inovasi untuk Kemandirian dan Daya Saing Daerah serta Mewujudkan

Kesinambungan Pembangunan karena pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi kebencanaan melalui Peta Sebaran Kejadian Bencana merupakan bentuk inovasi yang meningkatkan daya saing daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Inovasi ini mengatasi keterbatasan metode konvensional yang memiliki jangkauan terbatas dengan memanfaatkan platform digital yang mampu menjangkau ribuan masyarakat. Kemudahan akses informasi ini turut membangun kepercayaan publik serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kebencanaan. Jadi, inovasi penyebarluasan informasi spasial ini berkontribusi pada kesinambungan pembangunan karena perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan berbasis data dan informasi yang akurat sehingga mengurangi potensi dampak bencana terhadap infrastruktur dan masyarakat yang dapat menghambat proses pembangunan daerah.

7. Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS

a. Dampak terhadap satuan kerja

Jika kegiatan menyebarluaskan peta sebaran kejadian bencana melalui sosial media tidak dilaksanakan sesuai nilai dasar BerAKHLAK, maka satuan kerja BPBD akan berpotensi mengalami kegagalan dalam menyebarkan informasi

kebencanaan kepada publik. Tanpa sikap adaptif dalam menentukan media publikasi yang tepat, pemilihan platform dan format konten akan tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan audiens, sehingga jangkauan informasi menjadi sangat terbatas dan tidak efektif. Ketiadaan kompetensi dalam menyusun konten publikasi yang informatif dan mudah dipahami akan mengakibatkan informasi kebencanaan yang disampaikan terlalu teknis, membingungkan, atau bahkan tidak menarik perhatian masyarakat, sehingga tujuan edukasi tidak tercapai.

Tanpa adanya konsultasi yang harmonis dan kolaboratif dengan mentor terkait strategi publikasi dan desain konten, BPBD berpotensi menghasilkan konten publikasi yang tidak efektif atau bahkan mengandung kesalahan dalam penyampaian informasi. Hal ini juga berpotensi menyebabkan konten yang diunggah hanya akan menjadi formalitas administratif belaka tanpa mempertimbangkan apakah informasi tersebut benar-benar bermanfaat dan mudah diakses oleh masyarakat. Kondisi ini akan mengakibatkan BPBD gagal memenuhi Standar Pelayanan Minimal dalam hal penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018. BPBD juga kehilangan momentum untuk membangun komunikasi

dan keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, serta tidak dapat memanfaatkan teknologi digital sebagai alat untuk meningkatkan literasi kebencanaan di tingkat masyarakat. Pada akhirnya informasi spasial tidak tersampaikan dengan baik kepada sasaran yang dituju.

b. Dampak terhadap masyarakat

Jika kegiatan publikasi peta sebaran kejadian bencana melalui sosial media tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak berdasar atas nilai dasar BerAKHLAK, maka masyarakat akan kehilangan akses terhadap informasi kebencanaan yang seharusnya menjadi hak mereka untuk mengetahui. Informasi yang tidak disebarluaskan dengan strategi yang tepat atau menggunakan desain yang tidak menarik akan membuat masyarakat tidak tertarik untuk membaca, memahami, atau membagikan informasi tersebut kepada orang lain. Hal ini mengakibatkan jangkauan informasi sangat terbatas dan hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui tentang peta sebaran kejadian bencana yang telah dibuat.

Tanpa adanya informasi spasial kejadian bencana yang mudah diakses dan dipahami melalui media sosial, kesadaran masyarakat terhadap potensi ancaman bencana di wilayah mereka akan tetap rendah. Masyarakat tidak akan memiliki

gambaran yang jelas mengenai wilayah-wilayah mana yang paling sering terdampak bencana berdasarkan data historis, sehingga mereka tidak dapat mengambil langkah-langkah antisipasi yang tepat. Padahal media sosial merupakan platform yang paling efektif dan cepat untuk menjangkau masyarakat luas di era digital saat ini, terutama generasi muda yang aktif menggunakan media sosial sebagai sumber informasi utama mereka.

Minimnya penyebaran informasi kebencanaan melalui media sosial akan mengakibatkan pengetahuan masyarakat tentang risiko bencana di lingkungan mereka tetap minim, sehingga budaya kesiapsiagaan tidak akan tumbuh dengan baik. Masyarakat akan kesulitan untuk memahami pola sebaran bencana dan tidak memiliki rujukan informasi yang mudah diakses untuk meningkatkan kewaspadaan mereka. Hal ini pada akhirnya akan mempertahankan kondisi rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan membuat masyarakat Kabupaten Kerinci tetap rentan terhadap dampak bencana karena kurangnya informasi, pengetahuan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta		: Revia Kusuma Wardani, S.P.W.K.		
Satuan Kerja		: BPBD Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		: BPBD Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/ Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil capaian/ Output	Paraf Mentor
1	30 September 2025	-Tambahkan logo Pemda di desain peta non formal yang akan di bagikan ke sosial media -Untuk legalitas peta formal ditambah dengan tanda tangan Kepala Pelaksana, Pembuat, dan Plt Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan -Peta non formal dan formal diupload di Medsos IG dan FB BPBD	Catatan hasil konsultasi	
2				

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta		: Revia Kusuma Wardani, S.P.W.K.		
Satuan Kerja		: BPBD Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		: BPBD Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil capaian/ Output	Paraf Coach
1				
2				

Lampiran 5. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-5

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan 5	Melakukan evaluasi terkait pelaksanaan aktualisasi
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	6 – 10 Oktober 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/ <i>Evidence</i>	1. Tersedianya laporan implementasi publikasi peta sebaran kejadian bencana Kabupaten Kerinci dan dokumentasi pengerjaannya 2. Tersedianya <i>draft</i> laporan aktualisasi 3. Tersedianya <i>draft</i> laporan hasil aktualisasi yang sudah mendapat persetujuan mentor, catatan hasil konsultasi dan dokumentasi konsultasi
Uraian Kegiatan yang dilaksanakan :	
1. Uraian kegiatan yang memuat nilai dasar yang melandasi a. Membuat laporan implementasi publikasi peta sebaran kejadian bencana Kabupaten Kerinci	

Dalam tahapan kegiatan ini penulis memulai dengan menyusun laporan implementasi publikasi peta sebaran kejadian bencana Kabupaten Kerinci yang berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, kegiatan yang dilaksanakan, hasil, kesimpulan dan saran. Proses penyusunan laporan ini tidak hanya sekadar menulis dokumentasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap informasi yang tercantum benar-benar mencerminkan kegiatan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan publikasi peta melalui media sosial. Di tahapan ini nilai Akuntabel penulis terapkan dengan menyusun laporan implementasi secara penuh tanggung jawab dan sesuai dengan data yang valid. Penulis memastikan bahwa setiap informasi yang dituangkan dalam laporan benar-benar sesuai dengan apa yang telah penulis lakukan dan hasilkan dari kegiatan publikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menginformasikan informasi spasial kepada masyarakat. Akuntabilitas ini penulis wujudkan dengan mencantumkan data-data yang akurat, menyusun laporan berdasarkan fakta sebenarnya, dan memastikan bahwa laporan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk keberlanjutan kegiatan publikasi peta sebaran kejadian bencana ke depannya.

Selain itu, nilai Kompeten juga penulis praktikkan dengan memanfaatkan kemampuan teknis untuk menyusun laporan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Kompetensi ini penulis wujudkan dengan menyusun struktur laporan runtut serta menyajikan data dan informasi dengan benar. Penulis memastikan bahwa setiap komponen laporan mulai dari latar belakang hingga kesimpulan dan saran tersusun dengan baik sehingga pembaca dapat memahami alur kegiatan publikasi dan manfaat yang dihasilkan. Laporan implementasi ini juga penulis susun dengan memperhatikan kaidah penulisan laporan yang baik agar dapat menjadi referensi yang berkualitas untuk kegiatan serupa di masa mendatang.

b. Membuat laporan aktualisasi

Setelah menyelesaikan laporan implementasi publikasi, penulis melanjutkan kegiatan dengan menyusun laporan aktualisasi secara menyeluruh. Tahapan kegiatan ini penulis jalani dengan proses yang sistematis dimulai dari perbaikan latar belakang, penginputan laporan mingguan, penyempurnaan profil instansi dan peserta, pengerjaan capaian pelaksanaan kegiatan, penyusunan matriks pelaksanaan dan rekapitulasi habituasi, hingga penulisan kesimpulan dan rekomendasi. Di tahapan ini nilai Akuntabel penulis terapkan dengan menyusun laporan aktualisasi secara penuh

tanggung jawab sesuai dengan aktualisasi yang telah penulis kerjakan selama masa habituasi. Penulis memastikan bahwa setiap bagian dalam laporan aktualisasi ditulis berdasarkan sebenarnya apa yang telah penulis lakukan dan alami selama proses aktualisasi. Akuntabilitas ini penulis wujudkan dengan mendokumentasikan seluruh kegiatan secara jujur dan transparan, mencantumkan data-data yang akurat dari hasil pelaksanaan kegiatan, serta memastikan bahwa setiap perubahan yang terjadi dari rancangan awal dicatat dan dijelaskan dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas proses pembelajaran yang telah dijalani.

Selain itu, nilai Kompeten juga penulis praktikkan dengan memastikan bahwa laporan aktualisasi tersusun sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Kompetensi ini penulis wujudkan dengan mempelajari dan memahami pedoman penyusunan laporan aktualisasi, mengikuti format dan struktur yang telah ditentukan, serta memastikan kelengkapan seluruh komponen laporan sesuai dengan standar yang berlaku. Penulis menggunakan kemampuan teknis penulisan untuk menyajikan laporan yang sistematis, runtut, dan mudah dipahami, serta memastikan bahwa matriks pelaksanaan, capaian penyelesaian *core issue*, manfaat, dan rencana tindak lanjut tersusun dengan

baik dan sesuai dengan kaidah pelaporan yang telah dipelajari selama pelatihan dasar.

c. Menyampaikan laporan hasil aktualisasi kepada mentor.

Tahapan selanjutnya adalah menyampaikan laporan hasil aktualisasi yang telah disusun kepada mentor untuk mendapatkan arahan dan persetujuan. Dalam proses penyampaian ini penulis menyampaikan progres pengerjaan dan berdiskusi mengenai kelengkapan serta hal-hal yang perlu diperbaiki. Di tahapan ini nilai Akuntabel penulis terapkan dengan bertanggung jawab penuh terhadap hasil aktualisasi yang penulis sampaikan. Meskipun laporan belum selesai secara final, penulis memastikan bahwa kerangka kasar laporan aktualisasi telah penulis selesaikan dan siap untuk didiskusikan. Akuntabilitas ini penulis wujudkan dengan menyampaikan secara jujur progress pengerjaan laporan, menjelaskan bagian-bagian yang sudah dikerjakan dan yang masih perlu diselesaikan, serta menerima tanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh draft laporan sesuai dengan arahan mentor. Penulis juga bertanggung jawab menyampaikan laporan implementasi publikasi peta yang telah selesai untuk mendapatkan persetujuan dari mentor.

Selain itu, nilai Harmonis juga penulis praktikkan dengan membangun komunikasi yang baik dengan mentor untuk

mendapatkan masukan yang konstruktif. Sikap harmonis ini penulis wujudkan dengan bersama-sama mentor mengecek kelengkapan dan apa saja yang perlu diperbaiki dalam laporan aktualisasi. Penulis mendengarkan dengan seksama arahan mentor untuk menyelesaikan draft laporan dan menerima dengan positif bahwa apa yang telah penulis kerjakan sudah sesuai dengan hasil diskusi sebelumnya dan sudah disesuaikan dengan pedoman yang ada. Komunikasi yang baik ini menciptakan suasana konsultasi yang kondusif dimana penulis dapat memahami dengan jelas ekspektasi dan standar yang diharapkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan aktualisasi dengan baik dan mendapatkan persetujuan dari mentor.

2. Teknik aktualisasi yang dipergunakan dan bukti fisik kegiatan/evidence

- a. Membuat laporan implementasi publikasi peta sebaran kejadian bencana Kabupaten Kerinci yang sudah dikerjakan penulis sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mengetahui kegiatan dan hasil yang sudah dicapai. Bukti fisik kegiatan ini adalah laporan implementasi publikasi peta sebaran kejadian bencana serta dokumentasi pengerjaannya.

LAPORAN IMPLEMENTASI
PUBLIKASI PETA SEBARAN KEJADIAN BENCANA

A. Latar Belakang

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jambi dengan potensi bencana alam yang cukup tinggi. Kondisi geografis yang berbukit serta berada di kaki Gunung Kerinci mengakibatkan wilayah Kabupaten Kerinci rentan terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan angin kencang. Setiap tahunnya, BPBD Kabupaten Kerinci menerima berbagai laporan bencana yang menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik dari segi kerusakan infrastruktur maupun kerugian ekonomi.

Selain itu, data kejadian bencana telah diunggah oleh BPBD secara rutin namun masih bersifat statis dan belum banyak dimanfaatkan secara visual. Padahal, pemetaan data bencana menjadi penting agar informasi yang disajikan lebih mudah dipahami oleh masyarakat maupun pemerintah kabupaten. Melalui pemanfaatan teknologi *Geographic Information System (GIS)*, data yang sebelumnya berupa tabel dapat divisualisasikan menjadi peta tematik yang menggambarkan sebaran kejadian bencana di tiap wilayah kecamatan.

Sebagai tindak lanjut dan dukungan aktualisasi Lektor CPNS yang telah disusun, kegiatan publikasi peta sebaran kejadian bencana ini menjadi bentuk nyata penerapan nilai ASN BERAKHLAK dan mewujudkan kontribusi terhadap misi ke-4 dan ke-5 Pemerintah Kabupaten Kerinci, yaitu meningkatkan kehidupan bencana serta mendorong inovasi daerah. Dengan publikasi peta ini, masyarakat dapat memperoleh informasi spasial sebaran kejadian dan dampak bencana, sehingga meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaannya terhadap potensi bencana di sekitarnya.

B. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
- Kepersona Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 581/K.1.PDP/67/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

C. Maksud dan Tujuan

- Maksud
 Publikasi Peta Sebaran Kejadian Bencana di sosial media *facebook* dan *instagram* BPBD Kabupaten Kerinci dimaksudkan untuk memberikan informasi spasial kepada masyarakat terkait sebaran kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Kerinci beserta dengan informasi kretas, kerusakan rumah, kerusakan fasilitas dan kerusakan lain akibat bencana yang terjadi di tahun 2024.
- Tujuan
 1. Menyediakan informasi spasial sebaran kejadian bencana yang mudah dipahami oleh masyarakat.
 2. Mengoptimalkan pemanfaatan data kebencanaan yang dimiliki BPBD melalui sistem pemetaan berbasis GIS.

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BPBD dalam menyampaikan informasi kebencanaan.
- Mendukung transformasi digital dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kerinci.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penanggulangan bencana berbasis informasi spasial berbasis data bencana kejadian bencana
- Meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana.

D. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah publikasi peta sebaran kejadian bencana Kabupaten Kerinci dalam format formal dan non-formal melalui media sosial atau media sosial BPBD Kabupaten Kerinci, yaitu *Instagram* dan *Facebook*. Penyelenggaraan ini dilakukan agar informasi spasial kejadian bencana dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Setelah dipublikasikan, sudah dipastikan bahwa peta sudah diunggah dan diunggah oleh Pti Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan selaku mentor dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kerinci sehingga peta yang dipublikasikan memiliki legalitas.

E. Hasil yang Dicapai

Dari pelaksanaan kegiatan ini, diperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

- Terpublikasinya peta tematik dalam format formal yang diunggah dalam bentuk postingan *barcode* terdapat Peta Sebaran Kejadian Bencana, Peta Sebaran Kerusakan Rumah Akibat Bencana, Peta Sebaran Kerusakan Fasilitas Akibat Bencana, dan Peta Sebaran Kerusakan Lahan Akibat Bencana Kabupaten Kerinci Tahun 2024. Pertanggal 6 Oktober 2025 postingan *instagram* telah diarak 20 orang, dan di *facebook* telah diarak 10 orang.



- Terpublikasinya peta tematik dalam format non-formal. Sebaran Kejadian Bencana Kabupaten Kerinci Tahun 2024 dengan informasi ini mengoptimalkan dampak kebencanaan, dampak kerusakan rumah, kerusakan fasilitas, dan kerusakan lain. Pertanggal 6 Oktober 2025 postingan *instagram* telah diarak 18 orang, dan di *facebook* telah diarak 18 orang.



F. Kesimpulan dan Saran

Kegiatan publikasi peta sebaran kejadian bencana merupakan langkah nyata dalam optimalisasi pemanfaatan data kebencanaan berbasis GIS di BPBD Kabupaten Kerinci. Melalui publikasi ini, masyarakat dapat lebih mudah memahami sebaran kejadian bencana dan tingkat dampaknya. Selain itu, dengan publikasi ini juga *stakeholder* terkait penanggulangan bencana dapat mengetahui kondisi sebaran kejadian bencana dan dampak akibat bencana untuk pertimbangan pengambilan keputusan penanggulangan bencana di Kabupaten Kerinci. Kegiatan ini juga menjadi bentuk penerapan nilai ASN BerAKHLAK dalam memberikan pelayanan publik yang inovatif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kegiatan publikasi peta sebaran kejadian bencana ini diharapkan tidak hanya dilakukan sekali waktu saja melainkan menjadi agenda tahunan rutin yang dilakukan BPBD sebagai upaya perwujudan pemberian informasi kebencanaan kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Kerinci.

Sulak, 09 Oktober 2025

Disetujui
PIL Kepala Bidang Pencegahan
dan Kesiapsiagaan


Supriyastuti, S.Hut., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.198009302006042020

Pengirim

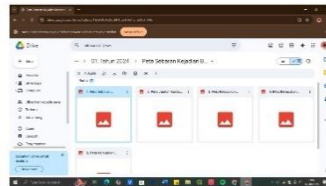

Reris Kusuma Wardani, S.P.W.K.
Penata Muda (III/a)
NIP.200169242025052001

CS Dipindai dengan CamScanner

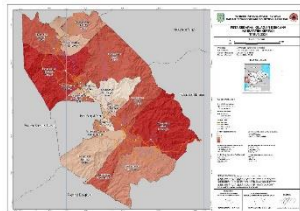
LAMPIRAN



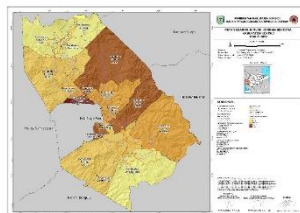
Gambar 1. Pengesahan Peta oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kerinci



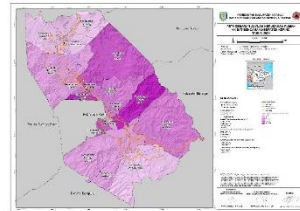
Gambar 2. Akses Peta Formal di Google Drive Hasil Scan Barcode



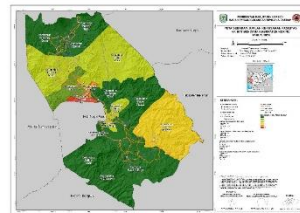
Gambar 3. Peta Sebaran Kejadian Bencana Tahun 2024



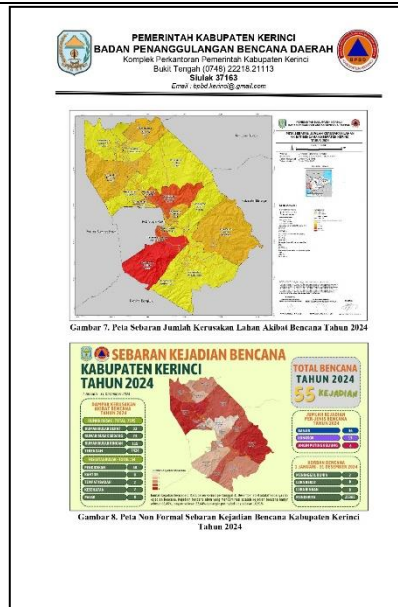
Gambar 4. Peta Sebaran Jumlah Korban Bencana Tahun 2024



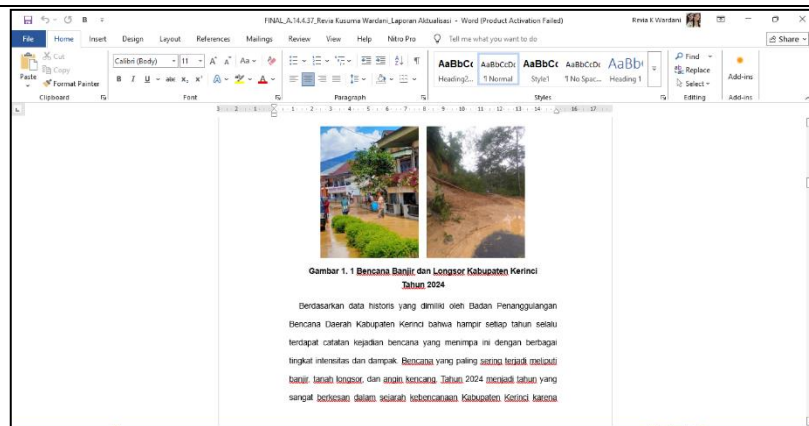
Gambar 5. Peta Sebaran Jumlah Kerusakan Rumah Akibat Bencana Tahun 2024



Gambar 6. Peta Sebaran Jumlah Kerusakan Fasilitas Akibat Bencana Tahun 2024



- b. Membuat laporan aktualisasi sesuai dengan pedoman yang telah diberikan dengan bukti fisik kegiatan berupa *draft* laporan akhir aktualisasi.



- c. Menemui mentor untuk menyampaikan *draft* laporan hasil aktualisasi kepada mentor yang telah dilakukan penulis selama masa habituasi. Bukti fisik kegiatan ini adalah catatan hasil konsultasi disertai dengan dokumentasi foto saat bertemu dengan mentor.




PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kerinci
 Bukit Tinggi (0743) 22218.21115
 Staluk 37163
 Email: bptb.kerinci@gmail.com

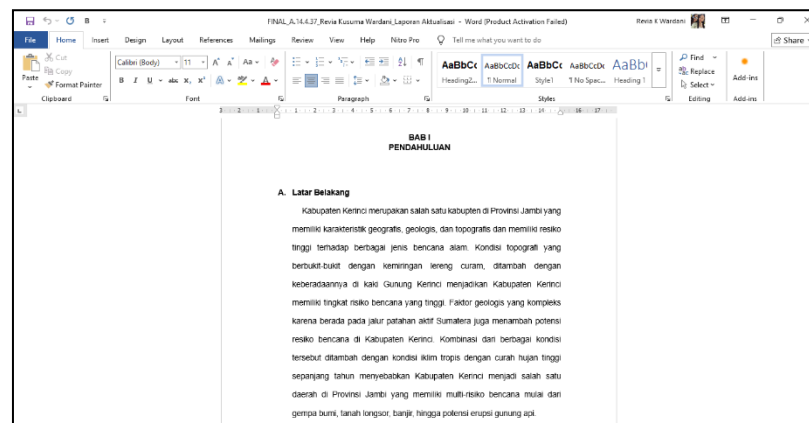

LAPORAN HASIL KONSULTASI

Penyerta Latsar CPNS

Nama : Revisi Kusuma Wardani, S.P.W.K
 NIP : 200109042020505001
 Pangkat/Go : Penata Muda / IIIa
 Jabatan : Analis Kebencanaan Ahli Pertama

No	Tanggal	Hasil Konsultasi	Paraf Mentor
1.	9 Okt 2025	Selanjutnya di finalisasi	

Dipindai dengan CamScanner



3. Deskripsi proses dan kualitas produk kegiatan

- a. Membuat laporan implementasi publikasi peta sebaran kejadian bencana Kabupaten Kerinci

Tahapan pertama yang dilakukan penulis dalam kegiatan ini adalah membuat laporan implementasi publikasi peta sebaran kejadian bencana Kabupaten Kerinci. Pembuatan laporan implementasi ini dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2025. Laporan implementasi publikasi peta sebaran kejadian bencana di media sosial *instagram* dan *facebook* BPBD Kabupaten Kerinci berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, kegiatan yang dilaksanakan, hasil, kesimpulan dan saran. Laporan implementasi ini sejatinya berisikan kegiatan dan hasil pelaksanaan kegiatan untuk kemudian diketahui manfaat dan dijadikan bahan evaluasi demi keberlanjutan kegiatan publikasi peta sebaran kejadian bencana yang dilaksanakan paling tidak satu tahun terhitung bencana yang terjadi dari 1 Januari - 31 Desember. Saat penulis membuat laporan implementasi publikasi peta sebaran kejadian bencana Kabupaten Kerinci Tahun 2024, penulis benar-benar menyesuaikan apa saja yang telah penulis lakukan dan hasilkan dari kegiatan publikasi sebagai bentuk tanggung jawab penulis menginformasikan informasi spasial kepada masyarakat. Hasil/output dari tahapan kegiatan ini adalah laporan implementasi publikasi peta sebaran kejadian bencana yang sudah dibubuhi

tanda tangan mentor. Pemberian tanda tangan ini dilakukan bersamaan dengan tahapan ketika penulis menemui mentor untuk menyampaikan laporan hasil aktualisasi kepada mentor.

b. Membuat laporan aktualisasi

Tahapan lain yang dilakukan penulis dalam kegiatan ini adalah membuat laporan aktualisasi. Penyusunan laporan aktualisasi ini dilakukan dalam satu minggu mulai dari tanggal 6-10 Oktober 2025. Penyusunan laporan aktualisasi ini dimulai dari perbaikan latar belakang menyesuaikan data-data kebencanaan yang sudah didapatkan penulis sebagaimana yang sudah didapatkan ketika mencari data untuk menyusun peta, selanjutnya menginput laporan mingguan yang sudah penulis susun setiap minggunya. Setelahnya penulis melengkapi kelengkapan dan menyempurnakan sub bab yang sebelumnya sudah termuat di rancangan aktualisasi seperti profil instansi dan peserta serta ringkasan rancangan aktualisasi. Kemudian penulis mengerjakan capaian pelaksanaan kegiatan aktualisasi dimana terdapat perubahan di kegiatan 5 pada tahapan pertama yaitu dari laporan implementasi pembuatan peta menjadi laporan implementasi publikasi peta sebaran kejadian bencana hasil olahan penulis kemudian penulis menyempurnakan matriks pelaksanaan aktualisasi, matriks rekapitulasi realisasi habituasi, capaian penyelesaian core isu, manfaat terselesaikannya core isu

dan rencana tindak lanjut hasil aktualisasi. Setelah itu semua terselesaikan baru selanjutnya penulis mengerjakan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis mengerjakan laporan dengan penuh tanggung jawab dan ditulis berdasarkan sebenar-benarnya apa yang penulis lakukan selama masa habituasi. Hasil/output dari tahapan kegiatan ini adalah draft laporan aktualisasi.

c. Menyampaikan laporan hasil aktualisasi kepada mentor.

Tahapan selanjutnya dalam kegiatan ini adalah menyampaikan laporan hasil aktualisasi yang telah penulis tulis kepada mentor. Tahapan ini penulis lakukan pada tanggal 9 Oktober 2025. Sejatinya saat penulis menyampaikan laporan hasil aktualisasi, draft laporan hasil aktualisasi masih ada yang belum penulis selesai kerjakan secara final namun penulis sudah menyelesaikan seluruh kerangka kasar laporan aktualisasi. Saat penulis menyampaikan laporan hasil aktualisasi kepada mentor, penulis juga menyampaikan laporan implementasi publikasi peta sebaran kejadian bencana yang sebelumnya telah penulis kerjakan. Saat menyampaikan progres laporan hasil aktualisasi, penulis dan mentor bersama mengecek kelengkapan dan apa saja yang perlu diperbaiki. Secara garis besar, mentor mengarahkan penulis untuk menyelesaikan draft laporan hasil aktualisasi tersebut untuk kemudian mendapatkan persetujuan dari mentor karena apa yang penulis kerjakan di

laporan aktualisasi sudah sesuai dengan hasil diskusi bersama mentor dan sudah disesuaikan dengan pedoman yang ada. Hasil/output dari tahapan kegiatan ini adalah catatan konsultasi.

4. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi dan tugas organisasi

Kegiatan ini mendukung Misi ke-1 Kabupaten Kerinci yaitu Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Berkualitas dan Pelayanan Publik Adaptif serta Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan. Kontribusi ini terwujud melalui penyusunan laporan implementasi dan laporan aktualisasi yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai pedoman menunjukkan komitmen dalam menciptakan kultur kerja birokrasi yang berkualitas. Kegiatan ini juga berkontribusi pada misi nomor 4 yaitu Meningkatkan Infrastruktur Kewilayahan dan Ketahanan Bencana. Kontribusi terhadap misi ini terwujud melalui pengembangan informasi kebencanaan yang menjadi fondasi penting dalam sistem penanggulangan bencana yang kemudian pertanggungjawabannya dituangkan dalam bentuk laporan aktualisasi. Dari laporan aktualisasi secara keseluruhan yang dibuat maka dapat dilaporkan pengapilkasian nilai dasar ASN BerAKHLAK sebagai bentuk pertanggung jawaban atas optimalisasi pemanfaatan data sebaran kejadian bencana melalui pemetaan tematik menggunakan GIS di BPBD Kabupaten Kerinci dalam rangka meningkatkan ketahanan

bencana dengan cara meningkatkan literasi, kesadaran, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, sehingga ketahanan bencana tidak hanya dibangun dari aspek infrastruktur fisik tetapi juga dari kapasitas dan pengetahuan masyarakat.

5. Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan NDS

a. Dampak terhadap satuan kerja

Jika kegiatan evaluasi terkait pelaksanaan aktualisasi yang meliputi pembuatan laporan implementasi publikasi, pembuatan laporan aktualisasi, dan penyampaian laporan kepada mentor tidak dilaksanakan sesuai nilai dasar BerAKHLAK, maka satuan kerja BPBD akan mengalami kerugian signifikan dalam hal pengelolaan pengetahuan dan pengembangan program. Tanpa nilai akuntabel dalam penyusunan laporan implementasi publikasi, dokumentasi kegiatan akan disusun secara asal-asalan tanpa mencerminkan data dan fakta yang sebenarnya terjadi, sehingga laporan tidak dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang valid untuk perbaikan di masa mendatang. Ketiadaan kompetensi dalam menyusun laporan yang sistematis dan sesuai pedoman akan menghasilkan dokumen yang tidak terstruktur, sulit dipahami, dan tidak memenuhi standar pelaporan yang berlaku.

Apabila kegiatan ini juga dilakukan tanpa akuntabilitas dalam penyusunan laporan aktualisasi, dokumentasi proses pembelajaran selama masa habituasi akan tidak lengkap atau bahkan tidak mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan. Hal ini mengakibatkan BPBD kehilangan kesempatan untuk mendokumentasikan *best practice* yang seharusnya dapat menjadi pengetahuan dan informasi yang baru bagi BPBD sendiri. Ketidadaan nilai harmonis dalam menyampaikan laporan kepada mentor akan membuat proses konsultasi berjalan tidak produktif, dimana masukan dan arahan mentor tidak diterima dengan baik sehingga kesalahan atau kekurangan dalam laporan tidak terkoreksi. Tanpa sikap akuntabel dalam bertanggung jawab atas hasil yang disampaikan, laporan yang diserahkan berpotensi mengandung banyak kesalahan atau ketidaklengkapan. Secara garis besar, apabila kegiatan ini tidak dilakukan berdasarkan nilai dasar ASN BerAKHLAK maka BPBD kesulitan dalam mengembangkan kegiatan serupa karena tidak ada referensi yang jelas mengenai proses, tantangan, dan solusi yang telah diterapkan sebelumnya. Tanpa adanya evaluasi yang akuntabel dan kompeten, BPBD akan terus melakukan pekerjaan yang sama tanpa ada peningkatan kualitas karena tidak ada mekanisme

pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan yang terdokumentasi dengan baik.

b. Dampak terhadap masyarakat

Jika kegiatan evaluasi pelaksanaan aktualisasi tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak berdasar atas nilai dasar BerAKHLAK, maka masyarakat akan mengalami dampak negatif meskipun bersifat tidak langsung namun signifikan dalam jangka panjang. Tanpa laporan implementasi publikasi yang akuntabel dan kompeten, BPBD tidak dapat mengidentifikasi sejauh mana efektivitas penyebaran informasi kebencanaan melalui media sosial dalam menjangkau dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan BPBD tidak mengetahui apakah strategi komunikasi yang digunakan sudah tepat, apakah konten yang dibagikan mudah dipahami masyarakat, atau aspek mana yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di masa mendatang.

Ketiadaan evaluasi yang baik berarti tidak ada mekanisme perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan informasi kebencanaan kepada masyarakat. BPBD akan terus mengulang pola yang sama tanpa mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pendekatan yang digunakan, sehingga kualitas informasi yang diterima masyarakat tidak mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Masyarakat

berpotensi terus menerima informasi yang tidak optimal karena tidak ada upaya evaluasi untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka dalam mengakses informasi kebencanaan.

Tanpa keberlanjutan program publikasi informasi, masyarakat Kabupaten Kerinci akan kembali pada kondisi minimnya akses informasi spasial kebencanaan, sehingga kesadaran dan kesiapsiagaan yang mulai tumbuh menjadi tidak terpelihara dengan baik. Pada akhirnya, masyarakat tetap rentan terhadap dampak bencana karena tidak ada upaya sistematis dan berkelanjutan dari BPBD untuk terus memberikan edukasi dan informasi kebencanaan yang berkualitas kepada mereka.

b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta		: Revia Kusuma Wardani, S.P.W.K.		
Satuan Kerja		: BPBD Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		: BPBD Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/ Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil capaian/ Output	Paraf Mentor
1	9 Oktober 2025	Lanjutkan finalisasi laporan aktualisasi	Catatan hasil konsultasi	
2				

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta		: Revia Kusuma Wardani, S.P.W.K.		
Satuan Kerja		: BPBD Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		: BPBD Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil capaian/ Output	Paraf Coach
1				
2				

